



Terakreditasi SINTA Peringkat 3
No : 21/E/KPT/2018

Vol 20 No 2 Agustus 2021
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Peran Dukungan Sosial bagi Siswa Penyandang Disabilitas dalam Meraih Prestasi Nonakademis
The Role of Social Support for Students with Disabilities in Achieving Nonacademic Achievements
Yuniar Adelia Sabila, Dwi Amalia Chandra Sekar, dan Annisah

Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup
Activation of Social Capital as a Strategy to Maintain Survival
Reza Amarta Prayoga

Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Implementation and Level of Community Satisfaction with the Non-Cash Food Assistance Program
Eddy Kiswanto

Fenomena Relawan GACA dalam Pendampingan Anak di Lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah
The Phenomenon of Gaca Volunteer in Assisting The Children at PWA Environment of Central Java Province
Istiqomah Risa Wahyuningsih, Suparmi, dan Sri Kustiyati

Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia
Public Perception of Violence against Women in Indonesia
Yustina Fendrita dan Gandhi Pawitan

Kehadiran Ayah dalam Pengasuhan Mengurangi Kenakalan Remaja: Studi Kasus pada Narapidana Anak
Father's Existence in Parenting to Reduce Juvenile Delinquency: Case Study of Child Prisoner
Tiaradiqta Rizky Asharia Putri, Mentari Anugrah Imsa, dan Alfiasari

Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas
The Effect of Smart Indonesia Program for Disabilities
Achmad Kautsar, Grace Wulandari, Jihan D.N, Qori'atul Septiavin, Ni Putu Mia Tarani, Amri Umu Amiroh, Annisa Fitri, dan Citra Kumala

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

VOL 20 No 2 Agustus 2021 : 103 - 192

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 20	No 2	Hal 103 - 192	Yogyakarta Agustus 2021	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
--	--------	------	---------------	-------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No : 21/E/KPT/2018
Volume 20 No 2 Agustus 2021 ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 15 Tahun 2021)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc (Science, Technology and Innovation Policy,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagong Suyanto Drs., M.Si (Sosiologi, Universitas Airlangga)
Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Drs. Latiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
Dwi Harsono, MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Redaktur / Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Dewan Redaksi / Editor

Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dr. Soetji Andari, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Trilaksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Sri Yuni Murtiwiidayanti (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dr. Astri Hanjarwati, M.A. (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga

Desain Grafis / Layout Editor

Isneningtyas Yulianti, S.S., MA

Sekretariat

Dwi Astuti Andariyani, S.ST, MA
Dra. Sri Rahayu, M.Si

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpksy.yogyakarta@kemsos.go.id
portal web: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks>

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Deskripsi permasalahan sosial meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat serta konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik, benar dan baku.
2. Format penulisan naskah/artikel disusun tanpa penomoran sub judul, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Untuk penulisan judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, setiap kata harus diawali dengan huruf kapital kecuali kata sambung atau kata depan, nama penulis (ditulis tanpa gelar akademik dan diletakkan di bawah judul teks/artikel), beserta nama dan alamatnya. institusi dan alamat email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, dicantumkan nama penulis utama, nama penulis lain dicantumkan pada footer halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis); Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri dari 200-250 kata, ditulis dengan huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf dan memuat tujuan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, rekomendasi dan kata kunci.
 - b. Sistem penulisan naskah/artikel, yaitu: Pendahuluan berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan pustaka dan tujuan penelitian; Penggunaan Metode Penelitian memuat narasi tentang pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sasaran, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan; Hasil dan Pembahasan memuat hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian; Penutup berisi kesimpulan dan saran. Ucapan terimakasih ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukung penelitian;
3. Pustaka Referensi menggunakan format APA (American Psychological Association), dengan ukuran font Times New Roman 10 dengan berbagai referensi yang berasal dari jurnal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, ilmu sosial lain yang relevan, hasil penelitian, website dan buku terkait, dengan menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan menurut abjad nama keluarga/penulis. Setidaknya 80% referensi berasal dari sumber terkini (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Referensi dari internet termasuk tanggal akses. Sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi referensi seperti MENDELEY, ZOTERO, ENDNOTE.

Panjang Tulisan:

1. Jumlah kata minimal 5000-7000 kata atau 10 – 15 halaman.
2. Artikel/naskah ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: judul ditulis dengan huruf tebal Times New Roman 14, nama penulis ditulis dengan huruf tebal Times New Roman 12, abstrak dicetak tebal dengan huruf Times New Roman 10, sedangkan isi abstrak tidak ditulis dengan huruf tebal. Kata kunci diketik dengan huruf tebal Times New Roman 10, diikuti dengan titik koma (;). Kata kunci minimal dua kata dan maksimal 3 kata, jarak titik koma dengan kata berikutnya 1 spasi, panjang naskah berkisar 10-15 halaman dengan kertas ukuran A4 dan diserahkan dalam bentuk soft copy dengan docx format dan penulis harus melakukan pengajuan pada halaman jurnal <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/about/submissions#onlineSubmissions>
3. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pembuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 20 No 2 Agustus 2021
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Peran Dukungan Sosial bagi Siswa Penyandang Disabilitas dalam Meraih Prestasi Nonakademis
<i>The Role of Social Support for Students with Disabilities in Achieving Nonacademic Achievements</i>
<i>Yuniar Adelia Sabila, Dwi Amalia Chandra Sekar, dan Annisah</i> | 103 - 114 |
| 2. | Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup
<i>Activation of Social Capital as a Strategy to Maintain Survival</i>
<i>Reza Amarta Prayoga</i> | 115 - 128 |
| 3. | Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
<i>Implementation and Level of Community Satisfaction with the Non-Cash Food Assistance Program</i>
<i>Eddy Kiswanto</i> | 129 - 144 |
| 4. | Fenomena Relawan GACA dalam Pendampingan Anak di Lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah
<i>The Phenomenon of Gaca Volunteer in Assisting The Children at PWA Environment of Central Java Province</i>
<i>Istiqomah Risa Wahyuningsih, Suparmi, dan Sri Kustiyati</i> | 145 - 156 |
| 5. | Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia
<i>Public Perception of Violence against Women in Indonesia</i>
<i>Yustina Fendrita dan Gandhi Pawitan</i> | 157 - 170 |
| 6. | Kehadiran Ayah dalam Pengasuhan Mengurangi Kenakalan Remaja: Studi Kasus pada Narapidana Anak
<i>Father's Existence in Parenting to Reduce Juvenile Delinquency: Case Study of Child Prisoner</i>
<i>Tiaradiqta Rizky Asharia Putri, Mentari Anugrah Imsa, dan Alfiasari</i> | 171 - 180 |
| 7. | Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas
<i>The Effect of Smart Indonesia Program for Disabilities</i>
<i>Achmad Kautsar, Grace Wulandari, Jihan D.N, Qori 'atul Septiavin, Ni Putu Mia Tarani, Amri Umu Amiroh, Annisa Fitri, dan Citra Kumala</i> | 181 - 192 |

EDITORIAL

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Volume 20 No. 2 Agustus 2021, diawali dengan tulisan berjudul “Peran Dukungan Sosial bagi Siswa Penyandang Disabilitas dalam Meraih Prestasi Nonakademis” yang ditulis oleh Yuniar Adelia Sabila dkk. Tulisan ini memaparkan, bahwa dukungan sosial dari sekolah (guru dan teman sekelas) dan keluarga memainkan peran utama dalam prestasi nonakademik siswa penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan kerjasama antara sekolah dan keluarga untuk mendukung prestasi non akademis siswa penyandang disabilitas. Tulisan kedua berjudul “Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup”, ditulis oleh Reza Amarta Prayoga. Tulisan ini mengulas persoalan kemiskinan dengan fokus modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga miskin. Selanjutnya, Tulisan ketiga berjudul “Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)”, yang ditulis oleh Eddy Kiswanto. Secara umum program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah dilaksanakan dengan baik dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program sangat tinggi (90% KPM menyatakan cukup puas dan puas terhadap program BPNT). Tulisan keempat ditulis oleh Istiqomah Risa Wahyuningsih dkk, berjudul “Fenomena Relawan GACA dalam Pendampingan Anak di Lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah”. Tulisan ini menjabarkan beberapa aspek pada relawan Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA) seperti motivasi menjadi relawan, hambatan atau kendala, perilaku prososial relawan, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan, proses pendampingan GACA dan respon keluarga klien terhadap GACA. Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak, direkomendasikan agar Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam optimalisasi GACA. Tulisan kelima, ditulis oleh Yustina Fendrita dan Gandhi Pawitan dengan judul “Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia”. Tulisan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan berada pada situasi yang baik, hal ini dipicu oleh gencarnya sosialisasi dan pendidikan publik. Mayoritas masyarakat mempersepsikan, bahwa korban kekerasan terhadap perempuan adalah orang lain dan penyebab kekerasan adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Menurut penulis, persoalan ekonomi dan kemiskinan tidak dapat terlihat secara kasat mata, sementara relasi kuasa yang timpang sebagai akar penyebab kekerasan tidak dapat dilihat secara kasat mata untuk dapat memahami relasi ini dibutuhkan proses analisis yang lebih mendalam. Tulisan berikutnya dengan judul “Kehadiran Ayah dalam Pengasuhan Mengurangi Kenakalan Remaja: Studi Kasus pada Narapidana Anak” ditulis oleh Tiaradiqta Rizky Asharia Putri dkk. Tulisan ini menelusuri keterkaitan antara kehadiran ayah dengan kenakalan 55 anak yang berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di DKI. Penulis menemukan, bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting untuk meningkatkan konsep diri remaja serta pengendalian diri sehingga remaja akan memiliki kemampuan dalam mengurangi perilaku negatif. Hasil penelitian ini berimplikasi bagi pemerintah khususnya Kementerian Sosial agar dapat memberikan konseling kepada para narapidana anak dengan orang tuanya khususnya ayah agar memiliki interaksi yang lebih baik ke depannya. Tulisan terakhir atau ketujuh berjudul “Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas” yang ditulis oleh Achmad Kautsar dkk. Hasil kajian tulisan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terjadi, probabilitas individu yang tinggal di perkotaan memiliki peluang untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Peningkatan subsidi di sektor pendidikan menjadi solusi agar ketimpangan pendidikan antara para penyandang disabilitas dan nondisabilitas dapat diperkecil. Pemerataan gedung sekolah juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dari Editor

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 20 No 2 Agustus 2021

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Yuniar Adelia Sabila, Dwi Amalia Chandra Sekar, dan Annisah (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)
Peran Dukungan Sosial bagi Siswa Penyandang Disabilitas dalam Meraih Prestasi Nonakademis

The Role of Social Support for Students with Disabilities in Achieving Nonacademic Achievements

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 103 - 114

The existence of inclusive schools provides opportunities for students with disabilities to get formal education like other normal children. Support from various parties is needed so that they can participate in the learning process and even reach both academic and nonacademic achievements. This is a descriptive qualitative research and aims to describe social support for students with special needs at SMP Negeri 226 Jakarta. Data were collected through in-depth interviews with two outstanding students with disabilities, parents and siblings, classmates, and teachers. The data was deepened by making observations, literature studies, and documentation studies. The data were analyzed in stages, through the process of data organizing, categorizing, and interpreting and drawing conclusions. The results of this study indicate that social support from schools (teachers and classmates) plays a major role in the nonacademic achievement of students with disabilities. In addition, family support also plays a very crucial role. The social support received by students with disabilities are in form of emotional, instrumental, appreciative, and informational support. The conclusion of this study is that cooperation between school and families of students with disabilities is very necessary to support their academic education in school and to reach achievements in their special

Keberadaan sekolah inklusif memberikan kesempatan bagi siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan formal seperti anak normal lainnya. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dan meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan dukungan sosial bagi siswa penyandang disabilitas di SMP Negeri 226 Jakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada dua orang siswa penyandang disabilitas yang berprestasi, orang tua dan saudara kandung, teman, dan guru. Data diperdalam dengan melakukan observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara bertahap yaitu melalui proses pengorganisasian, kategorisasi, dan interpretasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dari sekolah (guru dan teman) berperan besar dalam pencapaian prestasi non akademik siswa penyandang disabilitas. Selain itu, dukungan keluarga juga berperan sangat krusial. Bentuk dukungan sosial yang diterima siswa penyandang disabilitas berupa dukungan emosional, instrumental, apresiasi, dan informasional. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kerjasama antara sekolah dan keluarga siswa penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan akademik mereka di sekolah

abilities. Recommendations are aimed to the government and schools to create more inclusive environment and to increase the social support for students with disabilities having special achievement.

Keywords: *children with disabilities; social support; achievement; inclusive school*

dan untuk meraih prestasi di kemampuan khusus yang mereka miliki. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan sekolah untuk menciptakan lebih banyak lingkungan inklusif bagi siswa penyandang disabilitas dan meningkatkan dukungan sosial bagi siswa penyandang disabilitas sehingga berprestasi.

Kata Kunci: *siswa penyandang disabilitas; dukungan sosial; prestasi; sekolah inklusif*

Reza Amarta Prayoga (Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup

Activation of Social Capital as a Strategy to Maintain Survival

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 115 - 128

This paper examines the problem of poverty with a focuses on social capital as a strategy for the survival of poor families. Poverty indicates a crucial reality. Various strategies have been used by poor families in order to meet their daily needs to survive and continue their daily lives. This paper aims to describe and identify strategies to maintain survival in poor families in Tegalpanggung Yogyakarta. The research method used is qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques were involved observation and in-depth interviews. The results show that poor families employ intangible assets in the form of social capital. Forms of social capital built by poor families are family relatives, neighbors, co-workers or colleagues, and arisan networks. Furthermore, social capital can be an alternative strategy to act as an alternative as a safety valve that can be used to maintain survival. For this reason, poor families need to strengthen their social capital through exploiting the potential of the community's collectivity, besides that, there is a need for strengthening poverty alleviation programs based on empowering social capital so that these programs will create community independence and cut community individuality.

Tulisan ini mengulas persoalan kemiskinan dengan fokus modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga miskin. Kondisi miskin menunjukkan realitas yang krisis. Berbagai strategi dimanfaatkan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat bertahan dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi strategi menjaga kelangsungan hidup (*survival*) pada keluarga miskin di Tegalpanggung Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga miskin menerapkan pemanfaatan aset tidak nyata (*intangible asset*) dalam bentuk modal sosial. Bentuk modal sosial yang dibangun oleh keluarga miskin berupa kerabat famili, tetangga, rekan kerja atau sejawat, dan jaringan arisan. Lebih lanjut, modal sosial dapat menjadi strategi pilihan bertindak alternatif sebagai katub penyelamat (*safety valve*) yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk itu, keluarga miskin perlu memperkuat modal sosial yang mereka miliki melalui pemanfaatan potensi kolektivitas masyarakat. Selain itu, diperlukan

Keywords: survival strategy; poverty; social capital

penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan modal sosial untuk menciptakan kemandirian komunitas serta memangkas individualitas masyarakat.

Kata Kunci: strategi kelangsungan; kemiskinan; modal sosial

Eddy Kiswanto¹² (¹Mahasiswa Doktorat Kepemimpinan dan Inovasi kebijakan, UGM, ²Staf Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM)

Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Implementation and Level of Community Satisfaction with the Non-Cash Food Assistance Program

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 129 - 144

The assessment of the community as program beneficiaries should be known because it is one of important materials in evaluating and improving the implementation of the program. This study tries to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) and the satisfaction level of the Beneficiary Families (KPM) of this program. This research uses a quantitative approach with a survey method. The survey was carried out by direct or face-to-face interview with 700 KPM in Medan, Bandar Lampung, North Jakarta, Tasikmalaya, Surakarta, Tegal, Malang, Probolinggo, Mataram and Makassar. The results shows that 82.9 percent of KPM already knew that BPNT is a substitute program for Rastra / Raskin program. Most of the KPM had disbursed BPNT with foodstuffs such as rice and sugar. All of the KPM PKH in the ten cities have disbursed BPNT. KPM that have not made BPNT disbursement are 52.8 percent. It is because they have not received the disbursement schedule. Meanwhile, 15.5 percent of the KPM have not received a BPNT card. Many of the KPM do not know yet that balances can be exchanged at any time outside of the predetermined time or can be left. The problem that arises related to this program is that 50.3 percent of the KPM complained about the rice quality is poorer than the rice in other shops / stalls. In

Penilaian masyarakat sebagai penerima manfaat dari suatu program sangat penting untuk diketahui sebagai bahan evaluasi dan peningkatan implementasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pelaksanaan survey dilakukan dengan wawancara langsung atau tatap muka dengan 700 KPM di Kota Medan, Bandar Lampung, Jakarta Utara, Tasikmalaya, Surakarta, Tegal, Malang, Probolinggo, Mataram, dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 82,9 persen KPM mengetahui bahwa program ini merupakan pengganti program Rastra/Raskin. Sebagian besar KPM telah mencairkan BPNT dengan jenis bahan pangan berupa beras dan gula. Semua KPM PKH di sepuluh kota tersebut telah mencairkan BPNT. KPM yang belum melakukan pencairan BPNT sebanyak 52,8 persen karena belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan. Sementara sebanyak 15,5 persen belum mendapatkan kartu BPNT. KPM banyak yang belum mengetahui bahwa saldo dapat ditukarkan kapan saja di luar waktu yang telah ditentukan atau dapat disisakan. Permasalahan yang muncul terkait program ini adalah sebesar 50,3 persen

addition, 72.9 percent of the KPM complained about the absence of transaction evidence (receipts / notes) when making transactions at E-Warong. The level of community satisfaction with the BPNT program was very high because almost 90 percent stated that they were quite satisfied and satisfied. The important recommendations from this study include 1) it is necessary to increase the socialization of the BPNT program; 2) it is necessary to increase the quality of foodstuffs; 3) it is necessary to improve the quality of E-Warong services; 4) it is needed to establish an institution addressing public complaints; and 5) it is needed to monitor and evaluate of the program regularly.

Keywords: *noncash food assistance; program implementation; beneficiary families; level of satisfaction*

mengeluhkan kualitas beras yang kurang baik jika dibandingkan dengan kualitas beras di toko/warung lainnya. Selain itu, sebesar 72,9 persen mengeluhkan tidak adanya bukti transaksi (bon/nota) ketika melakukan transaksi di E-Warong. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPNT sangat tinggi karena hampir 90 persen menyatakan cukup puas dan puas. Rekomendasi penting dari penelitian ini antara lain 1) Perlu peningkatan sosialisasi program BPNT; 2) Peningkatan kualitas bantuan pangan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan E-Warong; 4) Pembentukan lembaga untuk menangani keluhan masyarakat; dan 5) Perlunya monitoring dan evaluasi program BPNT.

Kata Kunci: *bantuan pangan nontunai; implementasi program; keluarga penerima manfaat; tingkat kepuasan*

Istiqomah Risa Wahyuningsih, Suparmi, Sri Kustiyati (Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Surakarta)

Fenomena Relawan GACA dalam Pendampingan Anak di Lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah

The Phenomenon of Gaca Volunteer in Assisting The Children at PWA Environment of Central Java Province

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 145 - 156

Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA) is a community-based program designed by the Central Bureau of Aisyiyah as a respond to increasing cases of violence against children in Indonesia. This movement encourages community especially member of Aisyiyah to participate actively in child protection efforts, to promote children's rights and to prevent violence against children. GACA has developed in various regions, including in Central Java Province. Number of GACA Volunteer has increased and becomes potential human resource in child protection. The purpose of the study was to describe the movement of GACA volunteers in addressing child issues in Banjarnegara Regency. This research used a qualitative method. It was conducted in April-November 2019 in Banjarnegara Regency. A purposive sampling

GACA merupakan sebuah gerakan masif dalam upaya membentuk generasi penerus yang kokoh, unggul dan berkemajuan dalam hal mengantisipasi terjadinya kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gerakan Aisyiyah ini selaras dengan program Pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat yang bersedia melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan pada anak di bawah Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Propinsi Jawa Tengah disebut relawan GACA. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan April-November 2019 di PWA Jawa Tengah

was used to select the informant. Ten GACA volunteers were selected as main informant. Data and information were collected by using in-depth interviews, observations and document studies. Most of the informants are activist in the Organization of Aisyiyah Muhammadiyah. The study shows an overview about GACA volunteers. It describes their motivation to become volunteers, existing obstacles, prosocial behaviour of GACA volunteers, GACA mentoring processes and the client's family response to GACA volunteer. This study recommends the Government and the Central Bureau of Aisyiyah through GACA to develop a collaboration in child protection efforts, prevention and reduction of violence against children.

Keywords: *Child Violence, Child Assistance, GACA Volunteers.*

hususnya PDA Kabupaten Banjarnegara. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada 10 orang informan, rata-rata berumur 61 tahun. Informan ini sebelum masuk sebagai relawan GACA sudah aktif dalam organisasi Aisyiyah Muhammadiyah, dimulai dari IPM, NA, PCA/PCM dan PDA/PDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena relawan GACA digambarkan dalam beberapa aspek antara lain motivasi menjadi relawan, hambatan atau kendala, perilaku prososial relawan, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan, proses pendampingan GACA dan respon keluarga klien terhadap GACA dari sisi relawan. Rekomendasi penelitian ini adalah upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak, Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam optimalisasi GACA.

Kata kunci: *Kekerasan pada anak, Pendampingan Anak, Relawan GACA.*

Yustina Fendrita¹ dan Gandhi Pawitan^{1,2} (Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 40141)
Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia
Public Perception of Violence against Women in Indonesia
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 157 - 170

Violence against women is a complex and multi-caused social problem, almost all women are vulnerable to being victims regardless of age, race, culture, social and economic status. Stereotypes of violence against women are personal problems caused by wrong perceptions that prevent victims from getting recovery and justice. The study of public perceptions related to violence against women is still very limited, so the authors formulate the research question as "How are Indonesian people's perceptions related to violence against women?". The purpose of this study was to determine the public's perception of violence against women. The

Kekerasan terhadap perempuan, merupakan masalah sosial yang kompleks dan multi sebab, hampir semua perempuan rentan menjadi korban tidak memandang usia, ras, budaya, status sosial dan ekonomi. Stereotipe kekerasan terhadap perempuan adalah masalah pribadi yang diakibatkan oleh persepsi yang keliru sehingga menghambat korban untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan. Studi tentang persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan masih sangat terbatas, sehingga penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, "Bagaimana Persepsi masyarakat Indonesia terkait kekerasan terhadap

mixed research method framework was used in carrying the research, by combining qualitative and quantitative methods, with the type of sequential explanatory research. In the quantitative stage collected 2764 respondents who filled in the questionnaire. Then in the qualitative stage, six informants were selected to do indepth interview. The results showed that the perception of forms of violence against women was in a good situation, this was triggered by the incessant socialization and public education. In the perception dimension of who is the victim of violence, the majority of the community shows: victims of violence against women are other people, this condition reflects the majority of people's views that violence against women is a problem outside of themselves. The dimension of perception of the causes of violence shows that the majority of Indonesian people perceive that the causes of violence are economic problems or poverty. Economic problems and poverty were not only the main causes, while unequal power relations as the root cause of violence cannot be seen with the naked eye. In order to understand this relationship, an in-depth analysis process is required. Conclusion: The government still has a lot of homework to do to straighten out the perception of violence against women. It is time for participatory education methods to be used to foster critical public awareness so that they can clearly see social reality.

Keywords: *Public Perception, Violence against Women, Poverty*

perempuan?'. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan. Kerangka kerja metode penelitian campuran digunakan dalam penelitian ini, dengan menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris sekuensial. Pada tahap kuantitatif terkumpul 2764 responden yang mengisi kuesioner. Kemudian, pada tahap kualitatif, dipilih 6 informan untuk dilakukan *indept interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan berada pada situasi yang baik, hal ini dipicu oleh gencarnya sosialisasi dan pendidikan publik. Pada dimensi persepsi siapa korban kekerasan mayoritas masyarakat menunjukkan: korban kekerasan terhadap perempuan adalah orang lain, kondisi ini mencerminkan mayoritas pandangan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan diluar diri mereka. Dimensi persepsi penyebab kekerasan menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mempersepsikan penyebab kekerasan adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Persoalan ekonomi dan kemiskinan tidak dapat terlihat secara kasat mata sementara relasi kuasa yang timpang sebagai akar penyebab kekerasan tidak dapat dilihat secara kasat mata untuk dapat memahami relasi ini dibutuhkan proses analisis yang mendalam. Kesimpulan: Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah untuk meluruskan persepsi kekerasan terhadap perempuan. Sudah saatnya metode pendidikan partisipatif digunakan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sehingga jernih melihat realita sosial.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Kekerasan terhadap Perempuan, Kemiskinan

Tiaradiqta Rizky Asharia Putri¹, Mentari Anugrah Imsa², Alfiasari³ (¹Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor)

Kehadiran Ayah dalam Pengasuhan Mengurangi Kenakalan Remaja:

Studi Kasus pada Narapidana Anak

Father's Existence in Parenting to Reduce Juvenile Delinquency:

Case Study of Child Prisoner

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 171 - 180

Crime committed by teenagers is closely related to juvenile delinquency. Juvenile delinquency can occur because their self-concept and self-control have not grown up optimally. In addition, juvenile delinquency can happen because of inappropriate parenting patterns. This study aims to analyse the characteristic of adolescents, self-concept, and self control of adolescents co-related to the parenting manner; especially father's role and juvenile delinquency behavior. Data were collected using a retrospective technique, which is a technique to obtain information about child and father relationship experiences. The research location and respondents as research samples were selected purposively. This research was conducted at one of the Child Development Offices (LPKA) in DKI Jakarta Province with a total of 55 juvenile detainees as respondents. Data collection was conducted by self-administered technique. The data were processed and analyzed descriptively and inferentially. The results show that there was a positive correlation between paternal parenting and adolescent self-concept and self-control; and adolescent self-control has a positive correlation with delinquency. These findings can be interpreted that in case of child prisoners, better paternal parenting increase the self-concept and self-control of the adolescents significantly. Better self-control encourages teenagers not to commit a delinquency. It shows that having close relationship and personal experience with father significantly improves self esteem and self-control of adolescents. They are able to control their behavior and not doing a negative thing. The results of this study recommend the government, especially the Ministry of Social Affairs, to provide

Kriminalitas yang dilakukan oleh remaja berhubungan erat dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi karena konsep diri dan pengendalian diri mereka belum berkembang optimal. Selain itu, kenakalan remaja dapat bersumber dari pola pengasuhan orang tua yang belum tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik remaja, konsep diri, dan kontrol diri remaja serta kaitannya dengan pengasuhan orang tua terutama ayah dan perilaku kenakalan yang pernah dilakukan tahanan anak. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik retrospektif yaitu teknik untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman masa lalu tahanan anak bersama ayah mereka. Lokasi penelitian dan responden sebagai sampel penelitian dipilih secara *purposive*. Penelitian ini dilakukan di salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 55 orang tahanan remaja. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *self-administered*. Data diolah dan dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat korelasi positif yang signifikan antara pengasuhan ayah dengan konsep diri dan kontrol diri remaja; dan kontrol diri remaja mempunyai korelasi positif signifikan dengan kenakalan. Temuan tersebut dapat dimaknai bahwa pada kasus tahanan remaja, pengasuhan ayah yang semakin baik berbanding lurus dengan semakin baiknya konsep diri dan kontrol diri para tahanan remaja. Kontrol diri yang semakin baik mendorong semakin rendahnya kenakalan yang dilakukan para tahanan remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting dalam meningkatkan konsep diri serta pengendalian diri remaja. Mereka

counseling program for child prisoners and their parents particularly to build a better interactions and relationships between the children and their fathers. Counseling activities hopefully can reduce the criminal tendencies of the child prisoners.

Keywords: *adolescent's self-concept; adolescent's self-control; child prisoner; paternal parenting*

jadi mampu mengurangi perilaku negatif. Hasil penelitian ini merekomendasikan pemerintah khususnya Kementerian Sosial agar memberikan konseling kepada para narapidana anak dan orang tuanya khususnya ayah agar membangun interaksi dan relasi ayah dan anak yang lebih baik ke depannya. Kegiatan konseling diharapkan dapat mengurangi kecenderungan anak untuk melakukan tindakan kriminal di kemudian hari.

Kata Kunci: *narapidana anak; konsep diri remaja; kontrol diri remaja; pengasuhan ayah*

Achmad Kautsar¹, Grace Wulandari², Jihan D.N³, Qori'atul Septiavin⁴, Ni Putu Mia Tarani⁵, Amri Umu Amiroh⁶, Annisa Fitri⁷, Citra Kumala⁸ (^{1,2,3,4,5,6,7} **Universitas Pertamina, ⁸Alumni University of Warwick, Coventry CV4 7AL (UK))**

Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas

The Effect of Smart Indonesia Program For Disabilities

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 2 Agustus 2021, hal 181 - 192

People with disabilities are generally in a close position to poverty or trapped in so-called vicious cycle. One of the reasons is that because their education level is very low. This study aims to analyze factors that can increase the education level of the disabilities. This study uses four logit models that compare people with mild disabilities with severe disabilities. The logit model is used to analyze the probability of events. The results show that government subsidies in the education sector (PIP) have a significant positive effect on increasing the education level of the disabilities. The education inequality between urban and rural areas still occurs, the results show that the probability of individuals living in urban areas has a higher chance of going to school than rural areas. Increasing subsidies in the education sector is a solution to reduce the educational inequality between the disabilities and non-disabled persons. An equitable development of school buildings is needed to reduce the disparity between urban and rural areas.

Keywords: *disable; education; subsidy*

Penyandang disabilitas memiliki permasalahan dimana para penyandang disabilitas sangat dekat dengan kemiskinan atau terjebak dalam vicious cycle. Situasi tingkat pendidikan untuk kelompok para penyandang disabilitas sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi para penyandang disabilitas dapat meningkatkan tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan empat model logit yang membandingkan antara para penyandang disabilitas ringan dengan disabilitas berat. Model logit digunakan untuk menganalisis probabilitas kejadian. Hasil menunjukkan bahwa subsidi pemerintah di sektor pendidikan (PIP) memberikan dampak yang positif signifikan meningkatkan tingkat pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terjadi, hasil menunjukkan bahwa probabilitas individu yang tinggal di perkotaan memiliki peluang untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Peningkatan subsidi di sektor pendidikan menjadi solusi agar ketimpangan pendidikan

antara para penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat diperkecil. Pemerataan gedung sekolah juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kata kunci: disabilitas; pendidikan; subsidi

Peran Dukungan Sosial bagi Siswa Penyandang Disabilitas dalam Meraih Prestasi Nonakademis

The Role of Social Support for Students with Disabilities in Achieving Nonacademic Achievements

Yuniar Adelia Sabila¹, Dwi Amalia Chandra Sekar², Annisah³

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,

Gedung Nusantara 2, Lantai 2, Kampus FISIP-UI, Depok. Nomor Telp (021) 7270228,

Email: yuniar.223@gmail.com/ amaliasekar@yahoo.com/ annisah88@ui.ac.id.

Diterima : 28 September 2020, direvisi : 17 Oktober 2020, disetujui 6 Mei 2021

Abstract

The existence of inclusive schools provides opportunities for students with disabilities to get formal education like other normal children. Support from various parties is needed so that they can participate in the learning process and even reach both academic and nonacademic achievements. This is a descriptive qualitative research and aims to describe social support for students with special needs at SMP Negeri 226 Jakarta. Data were collected through in-depth interviews with two outstanding students with disabilities, parents and siblings, classmates, and teachers. The data was deepened by making observations, literature studies, and documentation studies. The data were analyzed in stages, through the process of data organizing, categorizing, and interpreting and drawing conclusions. The results of this study indicate that social support from schools (teachers and classmates) plays a major role in the nonacademic achievement of students with disabilities. In addition, family support also plays a very crucial role. The social support received by students with disabilities are in form of emotional, instrumental, appreciative, and informational support. The conclusion of this study is that cooperation between school and families of students with disabilities is very necessary to support their academic education in school and to reach achievements in their special abilities. Recommendations are aimed to the government and schools to create more inclusive environment and to increase the social support for students with disabilities having special achievement.

Keywords: *children with disabilities; social support; achievement; inclusive school*

Abstrak

Keberadaan sekolah inklusif memberikan kesempatan bagi siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan formal seperti anak normal lainnya. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dan meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan dukungan sosial bagi siswa penyandang disabilitas di SMP Negeri 226 Jakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada dua orang siswa penyandang disabilitas yang berprestasi, orang tua dan saudara kandung, teman, dan guru. Data diperdalam dengan melakukan observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara bertahap yaitu melalui proses pengorganisasian, kategorisasi, dan interpretasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dari sekolah (guru dan teman) berperan besar dalam pencapaian prestasi non akademik siswa penyandang disabilitas. Selain itu, dukungan keluarga juga berperan sangat krusial. Bentuk dukungan sosial yang diterima siswa penyandang disabilitas berupa dukungan emosional, instrumental, apresiasi, dan informasional. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kerjasama antara sekolah dan keluarga siswa penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan akademik mereka di sekolah dan untuk meraih prestasi di kemampuan khusus yang mereka miliki. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan sekolah untuk menciptakan lebih banyak lingkungan inklusif bagi siswa penyandang disabilitas dan meningkatkan dukungan sosial bagi siswa penyandang disabilitas sehingga berprestasi.

Kata Kunci: *siswa penyandang disabilitas; dukungan sosial; prestasi; sekolah inklusif*

Pendahuluan

Seorang anak sudah dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) sejak lahir. HAM dan hak-hak anak yang melekat di dalam diri anak harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak anak ini tertuang dalam Konvensi PBB yang secara umum membagi hak-hak anak menjadi empat kategori, yakni: 1) hak untuk hidup yang merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu; 2) hak untuk tumbuh kembang; 3) hak untuk diberikan perlindungan; dan 4) hak untuk berpartisipasi (Prinst 2003). Hak-hak anak melekat pada semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Namun demikian, dalam prakteknya, perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas masih dijumpai, seperti terbatasnya kesempatan anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas terhadap mobilitas fisik dan sosial, rekreasi dan persamaan dalam hukum dan politik (Hidayatullah and Pranowo 2018). Perlakuan diskriminatif ini berdampak terhadap capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pemuda penyandang disabilitas. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Dewi 2020) menunjukkan bahwa IPP pemuda penyandang disabilitas hanya ada di angka 30,50 dan jauh tertinggal dibandingkan IPP bukan pemuda penyandang disabilitas yang mencapai 52,00. Kondisi ini mengharuskan intervensi yang lebih serius dari negara agar capaian IPP pemuda penyandang disabilitas menjadi lebih baik.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan negara, yaitu intervensi di bidang pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak, termasuk anak penyandang disabilitas. Hal ini kemudian muncul konsep pendidikan inklusif. Menurut (Smith 2006), istilah inklusif dapat diartikan sebagai penerimaan siswa penyandang disabilitas ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri sekolah sehingga siswa penyandang disabilitas dapat

terlibat secara langsung dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa terdapat 1,6 juta siswa penyandang disabilitas di Indonesia dan baru 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Dari jumlah itu, ada sekitar 115 ribu siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan siswa penyandang disabilitas yang lain (sekitar 299 ribu siswa penyandang disabilitas) bersekolah di sekolah inklusif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) berharap pada tahun 2017 siswa penyandang disabilitas dapat menikmati akses pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini karena terbatasnya sekolah reguler yang hanya berjumlah 250 dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berjumlah 2.200 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017). Seiring dengan berjalannya waktu, setiap sekolah yang berada di DKI Jakarta sudah diwajibkan untuk menyediakan kuota yang diperuntukan untuk siswa penyandang disabilitas bersekolah di sekolah negeri reguler bersama dengan anak reguler lainnya. Kuota yang diberikan adalah dua siswa penyandang disabilitas di setiap kelasnya. Meskipun sekolah telah menyediakan kuota lebih dari 10 untuk siswa penyandang disabilitas, namun peminat terhadap pendidikan inklusif masih rendah (Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru 2019).

Terlepas dari adanya sekolah inklusif dengan peminat jumlah pendaftar yang rendah, terdapat beberapa sekolah SMP inklusif di Jakarta yang memiliki *track record* sebagai penyelenggara inklusif yang baik, seperti SMPN 226 Jakarta. Adanya fasilitas yang memadai serta dukungan yang baik dari sekolah membuat siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di SMPN 226 Jakarta memiliki prestasi yang baik. Prestasi tersebut antara lain terdapat siswa

penyandang disabilitas yang sudah berhasil menerbitkan komik; mendapatkan kejuaraan di bidang seni lukis, tari, dan musik; dan olah raga catur.

Keberhasilan siswa penyandang disabilitas dalam mencapai prestasi tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan sosial dari berbagai pihak. Dukungan sosial merupakan satu aspek penting dalam perkembangan diri siswa penyandang disabilitas. Dukungan sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri individu (Jenaabadi 2013) dan berpengaruh terhadap pencapaian prestasi (Kusrini and Prihartanti 2014; Maslihah 2011; Nurwati 2009).

Penelitian sebelumnya mengenai dukungan sosial pada siswa penyandang disabilitas, lebih banyak membahas peran sekolah yang dikhususkan untuk siswa penyandang disabilitas. Dengan demikian, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai cakupan yang lebih spesifik dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Tulisan ini menggambarkan dukungan sosial yang diterima oleh siswa penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang nonakademis dan bersekolah di sekolah inklusi (SMPN 226 Jakarta).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dukungan sosial yang diterima siswa penyandang disabilitas berasal dari berbagai pihak, mulai dari keluarga (orang tua dan saudara kandung), guru, dan teman sekelas. Dukungan yang diterima terbagi ke dalam berbagai bentuk, yaitu dukungan sosial emosional, instrumental, penghargaan, dan informasional. Berbagai dukungan sosial ini yang mendorong siswa penyandang disabilitas memiliki prestasi yang baik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Neuman 2006), penelitian kualitatif menggunakan kasus dan konteks, melihat proses sosial dan kasus dalam konteks sosialnya dan melihat interpretasi atau penciptaan makna

dalam *setting* tertentu. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana dukungan sosial yang diterima dan dimiliki oleh siswa penyandang disabilitas di sekolah inklusif sehingga membantunya dalam mendapatkan prestasi di SMPN 226 Jakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui wawancara mendalam dan observasi sebagai data primer, serta studi literatur dan studi dokumentasi sebagai data sekunder. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang telah disusun atau *purposive sampling*, sebagai berikut: 1) Siswa penyandang disabilitas: siswa penyandang disabilitas yang memiliki prestasi nonakademis, mampu menjelaskan dukungan yang diterima saat di rumah dan sekolah; 2) Keluarga: memiliki hubungan darah dengan informan siswa penyandang disabilitas, memiliki hubungan yang dekat dengan siswa penyandang disabilitas, mampu menjelaskan dukungan sosial yang diberikan keluarga ke siswa penyandang disabilitas dan mampu menjelaskan bagaimana proses siswa penyandang disabilitas dalam mencapai prestasinya; 3) Guru: telah mengenal dekat siswa penyandang disabilitas, mampu menjelaskan dukungan sosial yang diberikan ke siswa penyandang disabilitas, dan pelaksanaan pendidikan inklusif di SMPN 226 Jakarta; 4) Pimpinan sekolah: mampu menjelaskan kurikulum dan pelaksanaan sekolah inklusif di SMPN 226 Jakarta, mampu menjelaskan upaya yang dilakukan sekolah dalam mendukung pencapaian prestasi siswa penyandang disabilitas; 5) Teman: orang yang sering berinteraksi dengan siswa penyandang disabilitas, telah mengenal siswa penyandang disabilitas minimal 1 tahun, pendamping dari siswa penyandang disabilitas, dan mampu menjelaskan dukungan sosial yang diberikan ke siswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan kriteria tersebut, yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu pimpinan sekolah (1 orang), guru sekolah (3 orang), siswa penyandang disabilitas yang berprestasi nonakademis (2 orang), keluarga

mencakup orang tua dan saudara kandung siswa penyandang disabilitas (2 orang), teman dekat siswa penyandang disabilitas (1 orang).

Data yang terkumpul dianalisis secara induktif melalui empat tahapan. Tahap pertama, yaitu melakukan organisir data yang telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi, studi pustaka maupun studi dokumentasi. Tahap kedua yaitu pengolahan data. Data yang telah terorganisir, kemudian dilakukan kategorisasi berdasarkan kesamaan data. Tahap analisis selanjutnya, yaitu penafsiran data. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi data dan menyajikannya secara terorganisir. Tahap terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dengan mengacu pada temuan lapangan dan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Siswa penyandang disabilitas, yaitu anak-anak yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya (Ramadhan 2012), dan mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional (Kementrian Perlindungan Anak dan Perempuan, 2013). Oleh karena itu, siswa penyandang disabilitas memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka (Aphrodita, 2013). Pendidikan untuk siswa penyandang disabilitas dapat berupa pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan terbuka untuk semua individu yang mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu (Kustawan and Meimulyani, 2013).

Siswa penyandang disabilitas tidak hanya mampu beradaptasi dan mengikuti pelajaran dengan baik, tetapi juga dapat berprestasi. Handayani membedakan prestasi belajar menjadi dua, akademis dan nonakademis. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu prestasi nonakademis (Handayani, 2010). Prestasi nonakademis merupakan prestasi atau kemampuan yang dicapai siswa dari kegiatan di luar jam atau dapat disebut dengan

ekstrakurikuler (Mulyono, 2008). Pencapaian prestasi nonakademis dipengaruhi oleh faktor internal, berupa: minat, harapan tertentu, prestasi, rekreasi, kepribadian, dan kesehatan; dan juga faktor eksternal, seperti: lingkungan, keluarga, sarana dan prasarana, dan ekonomi (Syah, 2005).

Berbagai kajian sebelumnya mengemukakan bahwa dukungan sosial berpengaruh besar terhadap pencapaian prestasi akademis siswa (Kusrini and Prihartanti 2014; Maslihah 2011; Nurwati 2009). Dukungan sosial merupakan dukungan berupa bantuan materiil, dukungan fisik, dukungan psikologis berupa semangat, penerimaan, perhatian; yang diperoleh dari orang lain, baik keluarga, teman, tetangga, maupun komunitas (Johnson and Johnson 1991).

Informan utama dalam penelitian ini yaitu ZPE (14 tahun) dan IDS (14 tahun). ZPE merupakan siswa penyandang disabilitas yang memiliki prestasi berupa Juara 1 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Catur. Anak kedua dari dua bersaudara ini, memiliki keterbatasan dalam penglihatan, yaitu *low vision*. Di balik keterbatasan yang dimiliki, ZPE memiliki bakat dalam bermain catur. Keluarga yang mengetahui minat dan bakat ZPE, memberikan dukungan yang sangat positif untuk pengembangan keterampilan ZPE dalam bermain catur. Kondisi ekonomi keluarga yang termasuk kategori menengah, membuat keluarga tidak ada kendala dalam memberikan fasilitas tambahan, seperti alat catur khusus, untuk mengasah bakat ZPE.

IDS yang merupakan siswa penyandang disabilitas dengan kondisi tuna netra, telah meraih Juara 1 pada lomba menyanyi antargereja dan terampil dalam bermain alat musik piano. IDS merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Keluarga yang menyadari kelebihan yang dimiliki IDS, memberikan perhatian lebih untuk IDS, seperti membelikan piano khusus dan mengundang guru untuk mengajarkan IDS bernyanyi dan bermain piano, dan mengikutsertakan IDS dalam berbagai

perlombaan. Hal ini dilakukan karena keluarga IDS merupakan keluarga menengah atas sehingga tidak ada kesulitan untuk memberikan berbagai fasilitas ini.

Adanya prestasi yang dicapai oleh mereka tidak terlepas dari sumber pemberi dukungan sosial yang memberikan berbagai bentuk dukungan sosial. Berikut dukungan sosial yang diterima oleh ZPE dan IDS.

1. ZPE

ZPE memperoleh dukungan sosial dari berbagai pihak, mulai dari keluarganya yang mencakup orang tua dan saudara sepupu, serta lingkungan sekolahnya, yakni guru dan teman dekatnya. Dukungan sosial yang diterima ZPE berupa: sikap peduli, motivasi, sikap perhatian, dan mendengarkan keluhan kesahnya. Selain itu, ZPE juga diberikan dukungan berupa bantuan saat mengerjakan

pelajaran, orang tua yang aktif berkonsultasi dengan guru di sekolah, diberikan sarana dan prasarana, dan diberikan nasihat yang membangun.

2. IDS

Dukungan sosial yang diterima IDS berasal dari berbagai pihak, mulai dari keluarga besarnya (terutama saudara kandungnya) dan lingkungan sekolah yang mencakup guru dan teman. Dukungan yang diterima oleh IDS berupa diberikan sikap peduli, motivasi, mendengarkan keluhan kesahnya, diikutkan kursus bernyanyi dan bermain piano di rumahnya dengan mendatangkan guru, diberikan sarana dan prasarana, diikutkan dalam berbagai acara untuk mengasah kemampuan bernyanyi, dan diberikan sambutan positif atas prestasi yang diraihny.

Tabel 1.
Hasil Temuan Lapangan

Sumber Dukungan	Bentuk Dukungan Sosial Yang Diterima	
	Informan ZPE	Informan IDS
Keluarga (Orang tua atau Saudara Kandung)	1. Diberikan sikap peduli 2. Diberikan motivasi 3. Diberikan sikap perhatian 4. Berkonsultasi dengan guru 5. Diberikan sarana dan prasarana 6. Diberikan nasihat	1. Diberikan motivasi 2. Didengarkan keluhan kesahnya 3. Diikutkan kursus (les piano dan menyanyi) 4. Diberikan sarana dan prasarana 5. Diikutkan dalam berbagai acara 6. Diberikan sambutan positif
Guru	1. Diberikan motivasi 2. Didengarkan keluhan kesahnya 3. Diberikan sikap perhatian 4. Adanya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung siswa penyandang disabilitas 5. Diberikan saran	1. Diberikan sikap peduli 2. Diberikan motivasi 3. Didengarkan keluhan kesahnya 4. Adanya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung siswa penyandang disabilitas 5. Diberikan sambutan positif
Teman	1. Diberikan sikap peduli 2. Didengarkan motivasi 3. Diberikan sikap perhatian 4. Diberikan nasihat	1. Diberikan sikap peduli 2. Diberikan motivasi 3. Diberikan sikap perhatian

Sumber: Olahan Penelitian

Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, siswa penyandang disabilitas ZPE dan IDS dapat mengukir beberapa prestasi dalam bidang olahraga dan seni. ZPE merupakan siswa penyandang disabilitas yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga catur. ZPE pernah memenangkan perlombaan Juara 1 O2SN Catur Tingkat Provinsi. Bakat catur yang dimiliki ZPE berasal dari kakeknya yang terampil dalam

memainkan olahraga catur. Hal ini disampaikan oleh Ibu dari ZPE dalam kutipan wawancara: “Engga, belum.. belum.. Iyakan katanya si dulu ada keturunannya dulu, katanya akungnya dulu pinter catur, jadi dibawa sampe ZPE caturnya” (HA, Ibu ZPE, April 202). Bakat catur yang dimilikinya ini kemudian diasah oleh keluarga ZPE dengan mendukung secara penuh apabila ia ingin bermain catur. ZPE biasanya berlatih

catur dengan ayahnya yang juga bisa bermain catur. Selain itu, ZPE juga sering berlatih dengan keluarga besar lainnya, mulai dari saudara kandungnya (abang), tante dan om, serta kakeknya. Hal ini disampaikan oleh Ibu dari ZPE dalam kutipan wawancara berikut: “Dari anaknya, dari orang tuanya, dari keluarganya ngedukung semua. Apalagi uti-nya, mbahnya, nenek” (HA, Ibu ZPE, April 2020).

IDS pernah memenangkan juara 1 perlombaan menyanyi antargereja. Selain itu, IDS terampil dalam memainkan piano sehingga ia sering mewakili sekolah ketika pihak sekolah mendapatkan kunjungan tamu. Selain itu, IDS juga pernah tampil bernyanyi dalam berbagai acara di luar rumah, seperti Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. “Kalo tampil, aku pernah ngajak dia tampil pas di Atma.....Nyanyi... Di Atmajaya. Nah, kalo lomba-lomba, lomba antargereja, lomba-lomba yang di RT, di sekolah, dan event-event lomba tuh dia ikut.” (SC, Kakak Kandung IDS, Agustus 2020). Prestasi yang dicapai oleh IDS dan ZPE ini termasuk ke dalam prestasi nonakademis sebagaimana yang disampaikan oleh Mulyono (2008) karena prestasi di bidang catur dan seni musik merupakan bentuk keterampilan.

Prestasi yang dimiliki oleh ZPE dan IDS juga tidak terlepas dari dukungan yang diterima oleh berbagai pihak. Dukungan sosial merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Johnson dan Johnson (1991), dukungan sosial adalah keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberikan bantuan, semangat, penerimaan, dan perhatian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi individu yang bersangkutan. Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, berbagai bentuk dukungan yang diterima oleh ZPE dan IDS ini dibagi ke dalam empat bentuk dukungan sosial, yakni emosional, instrumental, penghargaan, dan informasional.

Dukungan Emosional

Bentuk dukungan sosial pertama yang diterima oleh siswa penyandang disabilitas SMPN 226 Jakarta adalah dukungan sosial emosional. Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, bentuk dukungan sosial emosional berupa diberikan sikap peduli, motivasi, didengarkan keluh kesahnya, dan diberikan sikap perhatian dari orang tua, saudara kandung, guru, dan teman dekat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh House (Smet 1999) yang mengungkapkan bahwa dukungan emosional biasanya berasal dari orang terdekat, seperti keluarga dan teman dekat, serta merupakan bentuk paling umum dalam pemberian dukungan sosial.

Berdasarkan dari temuan lapangan, ZPE menerima dukungan sosial yang berasal dari semua elemen keluarganya, mulai dari keluarga besarnya yang berusia anak-anak hingga neneknya dan juga tetangganya. Hal ini disampaikan oleh Ibu dari ZPE dalam kutipan wawancara: “Kalo dari kitanya sendiri si, ya pasti selalu ngedukung buat anak. Kita biasanya di lingkungan Kemayoran ya, tetangga-tetangga juga pada care, gimana ya susah diungkapin. Ya, pokoknya semua ngedukung.. Kalo temen, ya pastilah ada temen-temen yang ngedukung. Kalo guru juga ngedukung, kalo dari sistem pembelajaran sama aja, namanya orang tua ke guru suka komunikasi” (HA, Ibu ZPE, April 2020). Seluruh elemen lingkungan dari ZPE sudah memahami dan menerima kondisi ZPE sehingga seluruh elemennya saling bahu membahu dan membantu antarsesama, Penerimaan inilah yang menjadikan ZPE dapat menerima dukungan sosial. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Myers (Maslihah, 2011) bahwa adanya pertukaran sosial merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk memberikan dukungan sosial.

Keluarga ZPE memberikan dukungan emosional dalam bentuk sikap peduli. Dengan adanya sikap peduli yang diberikan oleh sumber dukungan sosial ini yang membuat mereka merasa senang karena diperhatikan

dan dihargai. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kusrini dan Prihati (Rif'ati et al. 2018) yang menyatakan bahwa manfaat dari penerimaan dukungan sosial dari orang lain yang dipercaya akan membuat individu merasa diperhatikan, dihargai, serta merasa dicintai. Adanya perasaan diperhatikan dan dihargai ini, kemudian yang memberikan kepercayaan diri kepada siswa penyandang disabilitas. Kepercayaan diri ini yang kemudian menjadi salah satu pendorong motivasi berprestasi. Hal ini sesuai dengan teori Lautser (Metri, Zulhelmi, and Rahmad 2014) yang menyatakan bahwa untuk mencapai hasil belajar yang baik diperlukan rasa percaya diri.

Siswa penyandang disabilitas juga merasa keluh kesahnya didengarkan. MI yang merupakan teman dekat ZPE dan IDS, merasa dirinya memiliki sifat tidak tega terhadap seseorang. Hal ini yang mendorongnya memberikan dukungan kepada ZPE dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ZPE. Hal ini disampaikan oleh MI dalam kutipan wawancara: "ZPE juga ngerasa saya doang yang mau dengerin curhatan dia, soalnya temen-temen yang lain tuh kayak gimana ya, jadi kurang gitu pergaulannya sama temen-temen yang lain sehingga dianggap sama temen-temen yang lain tuh kurang... Suka gak tegaan saya tuh" (MI, Teman Dekat siswa penyandang disabilitas, Maret 2020). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Myers (Maslihah, 2011) yang menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk memberikan dukungan sosial adalah adanya rasa empati.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut sesuai dengan teori dukungan sosial emosional yang diungkapkan oleh (Sarafino 2001) dimana dukungan emosional ini diwujudkan dalam bentuk perhatian, kehangatan relasi, dan refleksi kasih sayang.

Dukungan Instrumental

Bentuk dukungan sosial kedua yang diterima oleh siswa penyandang disabilitas SMPN 226

Jakarta adalah dukungan sosial instrumental. Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, bentuk dukungan sosial instrumental mencakup: ditemani saat pergi, diikutkan les terkait dengan bidang sesuai bakat yang dimiliki, dan disediakan sarana prasarana untuk menunjang aktivitas di sekolah ataupun di rumah.

IDS mengikuti les piano dan bernyanyi karena kondisi ekonomi keluarga yang berkecukupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan IDS dalam bermain piano dan bernyanyi. Hal ini sesuai dengan teori (Syah 2005) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi nonakademis adalah adanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor penunjang seseorang dalam proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dorongan lebih kepada individu untuk berprestasi.

Sarana dan prasarana yang disediakan baik di rumah maupun sekolah berkontribusi positif terhadap pengembangan keterampilan siswa penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang disediakan keluarga di rumah, seperti disediakan piano untuk informan IDS. "Misalnya piano langsung kita cari karena kan sebelumnya *keyboard*. *Trus* dia butuh piano, kita cari piano paling bagus. Pokoknya gak ada, harus kita adain lah.." (SC, Kakak Kandung IDS, Agustus 2020).

Penyediaan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh pihak sekolah, seperti catur khusus untuk orang dengan kondisi tuna netra yang dapat mengeluarkan suara. Selain catur khusus, sekolah juga menyediakan peralatan yang dibutuhkan siswa penyandang disabilitas saat akan mengikuti lomba dan biaya pendaftaran lomba ditanggung oleh sekolah. "Betul, memfasilitasi *kalo* ada lomba-lomba, memberi alat-alatnya, digratiskan" (FS, Guru Mata Pelajaran, Maret 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan

keterampilan siswa penyandang disabilitas dan telah menjalankan fungsi intervensi dalam pendidikan inklusi (Kustawan and Meimulyani, 2013).

Berbagai dukungan sosial instrumental ini merupakan bentuk *tangible support*, yaitu bantuan nyata berupa tindakan atau bantuan fisik yang berkontribusi dalam pengembangan bakat informan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh (Sarafino 2011) yang mengungkapkan bahwa dukungan dalam bentuk instrumental berkaitan dengan materi, bantuan secara langsung yang diberikan kepada individu yang membutuhkan.

Dukungan Penghargaan

Bentuk dukungan sosial ketiga yang diterima oleh siswa penyandang disabilitas SMPN 226 Jakarta adalah dukungan sosial penghargaan. Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, bentuk dukungan sosial penghargaan mencakup diberikan sambutan positif, dorongan terhadap ide yang diajukan, dan bimbingan umpan balik. Sambutan positif yang diberikan pihak sekolah kepada informan IDS di saat IDS berani menampilkan kemampuannya di depan umum, seperti kutipan wawancara: “Sambutan positif dari kepala sekolah biasanya, kayak tamunya ya,.. *Kan lagi itu* pertemuan antarkepala, bukan kepala sekolah yah, kebanyakan yang datang tamunya bapak dan ibu kepala sekolah. Aku bisa *maen* piano, waktu sesi *akutuh*, ada.. ‘Ohh, hebat, Pak. Anaknya bagus Pak.’ (IDS, Siswa penyandang disabilitas, Mei 2020).

Dukungan penghargaan tidak hanya berasal dari pihak sekolah, tetapi juga dari keluarga dan teman siswa penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh House (Smet 1999) bahwa dukungan penghargaan diberikan melalui ungkapan hormat (penghargaan positif) bagi penerima dukungan.

Menurut Sarafino, dukungan penghargaan termasuk ke dalam dukungan pada harga diri (*esteem support*) yang berupa penghargaan positif terhadap individu dan perbandingan

positif dengan individu lainnya (Sarafino, 2001). Dukungan penghargaan yang diterima IDS memberikan semangat lebih kepada siswa berkebutuhan untuk terus mengukir prestasi dan mengasah keterampilannya. Kepercayaan yang lebih, membuat individu mampu mencapai prestasi. Hal ini sesuai dengan teori Lautser (Metri et al. 2014) bahwa hasil belajar yang baik memerlukan modal potensi berupa percaya diri.

Dukungan Informasional

Bentuk dukungan sosial keempat yang diterima oleh siswa penyandang disabilitas yang bersekolah SMPN 226 Jakarta adalah dukungan sosial informasional. Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, orang tua ZPE juga sering kali memberikan nasihat kepada ZPE ketika ia sedang mendengarkan cerita ZPE. Dukungan-dukan yang diberikan oleh berbagai pihak ini termasuk ke dalam dukungan sosial informasional. Hal ini sesuai dengan teori (Sarafino 2001) yang mengungkapkan bahwa dukungan sosial informasional merupakan pemberian informasi berupa saran, nasihat, dan petunjuk tentang situasi dan kondisi yang dihadapi individu. Sementara, menurut Cohen dan Hoberman (Isnawati and Suhariadi 2013) dukungan informasional dapat berupa *appraisal support*.

Saran yang diberikan guru kepada siswa berkebutuhan khusus menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Pihak guru menyampaikan bahwa siswa penyandang disabilitas pasti memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan. Hal ini sesuai dengan teori (Sarafino 2011) bahwa seseorang yang mempunyai dukungan sosial yang tinggi akan memiliki perasaan dan kepercayaan yang tinggi juga. Kepercayaan diri yang tinggi ini kemudian yang memberikan motivasi dan semangat lebih kepada siswa untuk mengukir prestasi dalam bidang nonakademis. Hal ini sesuai dengan teori Lautser (Metri et al. 2014) menyatakan bahwa individu yang mempunyai tingkat percaya diri tinggi dapat lebih mencapai prestasi.

Peran Keluarga dan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Nonakademis Sekolah

Prestasi yang dimiliki ZPE dan IDS tidak terlepas dari adanya lingkungan keluarga dan sekolah yang mendukung mereka. Di dalam keluarga, ZPE terus berlatih untuk meningkatkan keterampilannya. Latihan rutin bersama ayah dan anggota keluarga lain membuat kemampuan bermain catur ZPE terus meningkat. Hal ini disampaikan oleh ZPE dalam kutipan wawancara: “Kayak tadi, suka ngasih semangat apa kalo aku *pengen* main catur ‘Yaudah ayo’” (ZPE, Siswa penyandang disabilitas, April 2020).

Keluarga IDS juga sangat mendukung pengembangan bakat IDS dengan mendatangkan guru les piano ke rumah. Hal ini disampaikan oleh saudara kandung IDS bernama SC dalam kutipan wawancara: “harus diikutkan les, les piano, les nyanyi. Kita privat di rumah. Jadikan waktu proses belajarnya bisa lebih lama, kita bisa kontrol. Les piano sama privat juga ke rumah. Pokoknya anak-anak ini fasilitas harus kita sediain.” (SC, Kakak Kandung IDS, Agustus 2020). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berpengaruh besar terhadap pencapaian prestasi siswa (Wibowo dan Susanto 2014) termasuk dalam pencapaian prestasi nonakademis (Syah, 2005).

Latar belakang keluarga kedua informan ini merupakan keluarga dengan status sosial ekonomi menengah dan menengah atas sehingga tidak ada kesulitan berarti bagi keluarga dalam memberikan dukungan materiil yang lebih besar untuk siswa penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap bagaimana keluarga memberikan dukungan sosial terhadap siswa penyandang disabilitas dalam mengasah bakat hingga meraih sebuah prestasi. Hal ini seperti kajian yang dilakukan oleh Syah (2005) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi nonakademis adalah adanya faktor ekonomi. Namun demikian, tidak semua keluarga siswa penyandang disabilitas memiliki

status sosial ekonomi yang baik, seperti keluarga IDS dan ZPE. Banyak siswa penyandang disabilitas yang lahir dan besar di keluarga miskin, yang kesulitan dalam mengeluarkan biaya tambahan untuk mendukung bakat anak-anak mereka. Untuk itu, peran aktif dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat berperan besar dalam memberikan dukungan sosial kepada semua siswa penyandang disabilitas untuk mengembangkan minat dan bakatnya dengan optimal.

Kajian yang dilakukan oleh Wibowo dan Susanto (2014) menunjukkan bahwa kontribusi dukungan sosial yang diberikan sekolah tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian prestasi siswa. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Berbagai dukungan yang diberikan sekolah berupa disediakannya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembiayaan untuk lomba, serta adanya perhatian dan sikap peduli guru ataupun teman siswa penyandang disabilitas, berkontribusi besar terhadap pencapaian prestasi nonakademis siswa penyandang disabilitas.

SMPN 226 Jakarta menyediakan catur yang dapat mengeluarkan suara dan alat musik khusus untuk tuna netra merupakan bentuk dukungan nyata dari pihak sekolah kepada siswa penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah berkontribusi positif terhadap pengembangan keterampilan kedua siswa penyandang disabilitas. Kondisi ini seperti yang dikemukakan oleh Syah (2005) bahwa tersedianya sarana dan prasarana dapat memberikan kesempatan siswa penyandang disabilitas dalam mencapai prestasi. Demikian juga dengan adanya perhatian, nasihat, dan kepedulian yang diberikan guru ataupun teman sekolah siswa penyandang disabilitas, mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia pada siswa penyandang disabilitas. Kepedulian yang tinggi dari para guru di SMP 226 Jakarta kepada siswa penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang baik mengenai siswa penyandang disabilitas dan pelaksanaan sekolah inklusif yang

ideal. Lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif yang menjadikan siswa penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal.

Uraian mengenai dukungan yang diberikan sekolah memperlihatkan bahwa meskipun prestasi yang diraih siswa penyandang disabilitas merupakan prestasi nonakademis, namun demikian, kontribusi dari sekolah cukup besar. Sayangnya, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana, juga dukungan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh siswa penyandang disabilitas dalam mengembangkan bakat dan minatnya dengan optimal. Tidak semua guru sekolah memiliki pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan sekolah inklusif. Hal ini seperti kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu guru kepada siswa penyandang disabilitas di Bekasi pada tahun 2019 (Nugroho 2019).

Hasil temuan penelitian yang juga penting yaitu adanya komunikasi terbuka dan kerja sama yang terjalin antarpihak sekolah dan orang tua. Keterbukaan komunikasi dan kerja sama ini membuat proses belajar menjadi optimal, termasuk pengembangan keterampilan di luar kemampuan akademis. Hal ini seperti kajian yang dilakukan oleh (Hornby 2015) bahwa penerapan praktik pendidikan inklusif yang didukung oleh berbagai pihak dapat memfasilitasi pendidikan yang optimal untuk semua siswa penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan tingkat pencapaian prestasi siswa penyandang disabilitas.

Penutup

Kesimpulan

Sekolah inklusif memberikan kesempatan siswa penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak atas pendidikannya dan sebagai wadah untuk mengukir prestasi. Dalam proses pencapaian prestasi nonakademis, siswa penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, saudara kandung, keluarga besar, guru, teman, dan lingkungan di sekitarnya.

Beragam bentuk dukungan sosial yang diterima informan, antara lain: diberikan sikap peduli, motivasi, didengarkan keluhan kesahnya, dan perhatian. Bentuk dukungan lainnya, yaitu diikutkan kursus keterampilan, diberikan sarana dan prasarana yang menunjang bakat siswa, diberikan nasihat dan sambutan positif.

Dukungan yang diberikan keluarga, guru, dan teman membentuk energi positif bagi siswa penyandang disabilitas untuk mencapai prestasi dalam bidang keterampilan yang mereka miliki. Dari berbagai sumber dukungan ini, yang paling kuat, yaitu dukungan sosial yang berasal dari keluarga. Sumber dukungan yang kuat berikutnya berasal dari sekolah. Meskipun prestasi yang diraih siswa penyandang disabilitas merupakan prestasi nonakademis, namun demikian dukungan sosial yang diberikan sekolah cukup beragam dan berpengaruh positif terhadap pencapaian prestasi ini.

Rekomendasi

Kerjasama dan sinergisitas antara orang tua dan sekolah menjadi sebuah keharusan agar keterampilan siswa penyandang disabilitas dapat berkembang dengan optimal. Sementara itu, untuk sekolah-sekolah inklusif perlu memberikan perhatian lebih dan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan keterampilan siswa penyandang disabilitas.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya pihak sekolah SMPN 226 Jakarta, keluarga siswa, dan teman siswa yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan:

- Aphrodita. 2013. *Terapi Jus Buah Dan Sayur*. Jogjakarta: Katahati.
- Dewi, Freshy Windy Rosmala. 2020. "Pemuda Penyandang Disabilitas: The Ones Left Behind?" *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 19(1):1–10.

- Handayani, Rita. 2010. "Hubungan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X Dan XI IPS SMAN 1 Minggir Sleman Tahun Ajaran 2009/2010." *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Hidayatullah, A. Nururrochman, and Pranowo Pranowo. 2018. "Membuka Ruang Asa Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17(2):195–206.
- Hornby, Garry. 2015. "Inclusive Special Education: Raising Achievement for All Students with Special Needs and Disabilities." *Australian Educational Leader* 37(3):22.
- Isnawati, Dian, and Fendy Suhariadi. 2013. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim." *Jurnal Psikologi Industri Dan Organisasi* 2(1):1–6.
- Jenaabadi, Hossein. 2013. "On The Relationship Between Perceived Social Support and Blind and Lowvision Students Life Satisfaction and Self-Confidence." *Journal of Educational & Instructional Studies in the World* 3(1).
- Johnson, David W., and Frank P. Johnson. 1991. *Joining Together: Group Theory and Group Skills*. Prentice-Hall, Inc.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. "Pendidikan Inklusi Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus."
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. "Sekolah Inklusif Dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusif."
- Kementrian Perlindungan Anak dan Perempuan. 2013. "Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, Dan Masyarakat)." *Kementrian Perlindungan Anak Dan Perempuan*.
- Kusrini, Woro, and Nanik Prihartanti. 2014. "Hubungan Dukungan Sosial Dan Kepercayaan Diri Dengan Prestasi Bahasa Inggris Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Boyolali." *Jurnal Penelitian Humaniora* 15(2):131–40.
- Kustawan, Dedy, and Yani Meimulyani. 2013. "Mengenal Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya."
- Maslihah, Sri. 2011. "Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial, Penyesuaian Sosial Di Lingkungan Sekolah Dan Prestasi Akademik Siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa Barat." *Jurnal Psikologi* 10(2):103–14.
- Metri, Yulia Hadi, Zulhelmi, and M. Rahmad. 2014. "Hubungan Percaya Diri Dan Keyakinan Diri Terhadap Hasil Belajar IPA Fisika Siswa Kelas VII SMP Negeri 17 Pekanbaru."
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi*. Jogjakara: Arruz Media.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. six edition. Allyn and Bacon.
- Nugroho, Adi. 2019. "Siswa Berkebutuhan Khusus Di Bekasi Diduga Dianiaya Guru Hinggaamar." *Merdeka.Com*, February 13.
- Nurwati, Andi. 2009. "Hubungan Antara Interaksi Sosial Siswa Dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 2(2).
- Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru, DKI Jakarta. 2019. "Hasil Seleksi Inklusi."
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan. 2012. *Pendidikan Ketrampilan Dan Kecakapan Hidup Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Rif'ati, Mas Ian, Azizah Arumsari, Nurul Fajriani, Virgin S. Maghfiroh, Ahmad Fathan Abidi, Achmad Chusairi, and Cholichul Hadi. 2018. "Konsep Dukungan Sosial." *Jurnal Penelitian: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya*.
- Sarafino, Edward P. 2001. *Health Psychology: Bio-Psychosocial Interaction*. New York: John Willey & Sons Inc.
- Sarafino, Edward P. 2011. *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction*. 7th ed. USA: John Willey & Sons Inc.
- Smet, Bart. 1999. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Grasindo.
- Smith, David. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Syah, Muhibbin. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, Moersito Wimbo, and Dwi Yulis Susanto. 2014. "Dinamika Dukungan Sosial Pada Prestasi Siswa Sekolah Dasar Berbasis Pendekatan Indigenous Psychology." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 9(1).

Aktivasi Modal Sosial sebagai Strategi Menjaga Kelangsungan Hidup

Activation of Social Capital as a Strategy to Maintain Survival

Reza Amarta Prayoga

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Anyar Km. 4 Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat
Email: reza.amarta@kemdikbud.go.id HP: 085210029089

Diterima tanggal 3 November 2020, diperbaiki tanggal 11 Maret 2021, disetujui tanggal 14 April 2021

Abstract

This paper examines the problem of poverty with a focuses on social capital as a strategy for the survival of poor families. Poverty indicates a crucial reality. Various strategies have been used by poor families in order to meet their daily needs to survive and continue their daily lives. This paper aims to describe and identify strategies to maintain survival in poor families in Tegalpanggung Yogyakarta. The research method used is qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques were involved observation and in-depth interviews. The results show that poor families employ intangible assets in the form of social capital. Forms of social capital built by poor families are family relatives, neighbors, co-workers or colleagues, and arisan networks. Furthermore, social capital can be an alternative strategy to act as an alternative as a safety valve that can be used to maintain survival. For this reason, poor families need to strengthen their social capital through exploiting the potential of the community's collectivity, besides that, there is a need for strengthening poverty alleviation programs based on empowering social capital so that these programs will create community independence and cut community individuality.

Keywords: *survival strategy; poverty; social capital*

Abstrak

Tulisan ini mengulas persoalan kemiskinan dengan fokus modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga miskin. Kondisi miskin menunjukkan realitas yang krisis. Berbagai strategi dimanfaatkan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat bertahan dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi strategi menjaga kelangsungan hidup (*survival*) pada keluarga miskin di Tegalpanggung Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga miskin menerapkan pemanfaatan aset tidak nyata (*intangible asset*) dalam bentuk modal sosial. Bentuk modal sosial yang dibangun oleh keluarga miskin berupa kerabat famili, tetangga, rekan kerja atau sejawat, dan jaringan arisan. Lebih lanjut, modal sosial dapat menjadi strategi pilihan bertindak alternatif sebagai katub penyelamat (*safety valve*) yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk itu, keluarga miskin perlu memperkuat modal sosial yang mereka miliki melalui pemanfaatan potensi kolektivitas masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan modal sosial untuk menciptakan kemandirian komunitas serta memangkas individualitas masyarakat.

Kata Kunci: *strategi kelangsungan; kemiskinan; modal sosial*

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi persoalan sosial yang kompleks karena menyangkut dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemiskinan tidak hanya berakut pada persoalan aset nyata (*tangible asset*) yang dimiliki. Ukurannya kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi riil

dari orang miskin. Pandangan umum mengenai miskin kadangkala diukur dengan luas rumah, ketersediaan MCK (mandi cuci kakus), dinding rumah, lantai rumah, kepemilikan kendaraan, penghasilan atau pendapatan, dan isi rumah. Standar penilaian tersebut memang terukur secara aset kepemilikan. Di sisi lain, cenderung

diskriminatif jika hal ini dikaitkan dengan orang atau kelompok miskin baru. Kerentanan ini dapat menyasar kelompok atau orang yang terkategori berpotensi menjadi golongan miskin baru. Misalnya kelompok buruh industri, atau karyawan kontrak swasta (pekerja sektor informal). Kelompok ini sangat rentan dan potensial masuk kategori miskin baru. Hal ini dikarenakan adanya sistem kontrak kerja, kerapuhan pembiayaan industri, atau lebih buruk lagi gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Rilis data dari Badan Pusat Statistik, di tengah pandemi terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, berikut datanya.



Gambar. 1 Data Kemiskinan Indonesia tahun 2020
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi ledakan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta orang pada maret 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan 1,63 juta orang dibandingkan pada September 2019. Artinya, ada potensi gelombang orang miskin baru tercipta dari kondisi ini. Di sisi lain, jika mengacu pada standar angka kemiskinan dari Bank Dunia, penduduk sangat miskin saat ini berjumlah 9,9 juta orang. Gejala ini menunjukkan ada perbedaan jauh jumlah penduduk miskin antara standar BPS dan Bank Dunia. Terlepas dari angka tersebut, persoalan carut marut kemiskinan ini telah menjadi perhatian pemerintah. Upaya pemerintah dilakukan melalui program jaring pengentasan kemiskinan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako. Tetapi, melihat situasional lebih buruk seperti pandemi Covid-19, upaya ini belum maksimal sebagai langkah kuratif katup penyelamat (*safety valve*) kemiskinan. Padahal jika dilihat dari tren tiga tahun belakang, ada penurunan besar jumlah penduduk miskin. Pulau Jawa masih menjadi konsentrasi jumlah kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu 7,49 juta. Angka tersebut terkonsentrasi pada perkotaan di Pulau Jawa. Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta (2020) merilis jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 mencapai 448.470 orang. Sedangkan, khusus di Kota Yogyakarta jumlah penduduk miskin mencapai 29.450 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta masih tinggi.

Temuan mengenai strategi bertahan hidup pada penduduk miskin telah menjadi sorotan banyak peneliti. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Kornita dan Yusuf (2013) tentang strategi bertahan hidup penduduk miskin di Batu Teritip Sungai Sembilan dengan cara memanfaatkan hubungan patron klien. Strategi ini memberikan akses berhutang kepada *tauke arang* atau *tauke* penampung penjualan ikan. Strategi berhutang kepada *tauke* ini dimanfaatkan oleh responden untuk mengatasi masalah keuangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sumber nafkah lain untuk bertahan hidup responden dengan mencari kayu bakar di pesisir pantai. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bertahan hidup masih mengharapkan akses hutang dari hubungan patron klien. Tentunya ini hanya menjadi strategi bertahan prematur bagi responden sehingga hanya memperburuk kondisinya. Temuan Al Arif (2012) mengenai keterkaitan wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan, menunjukkan bahwa pendistribusian uang wakaf mempunyai andil penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program

pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan wakaf uang berperan sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Penelitian ini masih melihat adanya ketergantungan pasif dengan mengharapkan uang wakaf sebagai solusi sementara pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, Nasution (2017) melihat korelasi modal sosial dalam pengurangan kemiskinan. Dalam temuannya, peran penting modal sosial sebagai upaya pengurangan kemiskinan di pedesaan. Komponen kepercayaan menjadi pembentuk modal sosial rumah tangga miskin. Mahendra (2018) menunjukkan bahwa ada keterhubungan modal sosial dengan strategi kelangsungan hidup pedagang sektor informal. Modal sosial dibangun dalam jaringan asosiasi RT/RW, kelompok studi, Pasar Asosiasi Pedagang, dan siklus hidup (bantuan-bantuan), terdapat hubungan berbasis rasa saling percaya (*trust*), jaringan ini kemudian membangun kolaborasi, saling membantu, dan memperoleh banyak manfaat bersama, yang ditopang oleh norma formalitas, rasa hormat, dan timbal balik. Di sisi lain, Saheb dkk, (2018) menegaskan bahwa modal sosial berperan penting dalam menopang kehidupan rumah tangga bagi petani miskin. Mikro relasi sosial seperti kerabat dekat dan tetangga menjembatani modal sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga petani miskin. Temuan berbeda dari Habib & Laksono, (2019) melihat keterkaitan program pengentasan kemiskinan pemerintah tidak menyingkirkan resiprokal modal sosial yang tumbuh di masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dari pemerintah semestinya dapat menumbuhkan dan menguatkan modal sosial masyarakat.

Uraian di atas memiliki kesamaan dengan tulisan berikut, yaitu pada cakupan strategi kelangsungan hidup. Letak perbedaannya adalah pada lokasi pengambilan data (studi kasus) di Tegalpanggung Yogyakarta. Selain itu, fokus pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses pemanfaatan modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga

miskin dalam menyiasati keterbatasan baik aset maupun akses di Tegalpanggung Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk 1) menguraikan dan menjelaskan variasi nilai strategi kelangsungan hidup dalam bentuk modal sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Tegalpanggung Kota Yogyakarta; 2) menjelaskan capaian serta pelajaran berharga dari pemanfaatan modal sosial pada keluarga miskin sebagai salah satu strategi kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan fenomena pemanfaatan modal sosial sebagai strategi menjaga kelangsungan hidup (*survival*) pada keluarga miskin. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena makna dari pengalaman hidup atau sudut pandang keluarga miskin dalam menjaga kelangsungan hidup dan menyiasati kesulitan memenuhi kebutuhan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Tegalpanggung Kota Yogyakarta. Unit analisis penelitian ini adalah individu dalam keluarga. Informan yang dibutuhkan sebagai sumber data merupakan individu (suami dan istri) yang ditentukan secara *purposive*. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga miskin (suami dan istri) berdasarkan data kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima keluarga miskin (suami dan istri) mempergunakan pedoman terbuka. Informan tersebut diwawancarai melalui interaksi intensif untuk mencari dan mendalami informasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data diperoleh juga dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan harian keluarga miskin (observasi partisipatif), artinya peneliti berbaur ikut serta mengikuti kegiatan sehari-hari dari keluarga miskin, mulai dari bekerja, mencari makan,

interaksi sesama mereka (keluarga miskin), hingga ikut tidur di pinggir jalan. Selain itu, untuk mendapatkan data tambahan ditelusuri literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Keluarga Miskin di Kelurahan Tegalpanggung

Terbatasnya kepemilikan aset dan sulitnya akses membuat keluarga miskin selalu mencari cara untuk dapat menjaga kelangsungan hidup mereka. Masalah utama yang selalu menghantui setiap keluarga miskin pada umumnya seperti kondisi pekerjaan yang tidak tetap, pekerjaan yang tidak memungkinkan dapat menaikkan taraf hidup keluarga, penghasilan kepala keluarga yang tak menentu, latar pendidikan rendah, tidak adanya keberlanjutan kebijakan pemerintah terhadap jaminan kesejahteraan orang miskin, dan minimnya lapangan pekerjaan.

Kondisi di atas, senyatanya tergambar pada Kelurahan Tegalpanggung yang berada di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. Jumlah keluarga miskin di Kelurahan Tegalpanggung tahun 2007 mencapai 1020 KK, dan tahun 2008 dinyatakan sebagai wilayah dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Kota Yogyakarta (Soebanto, 2012).

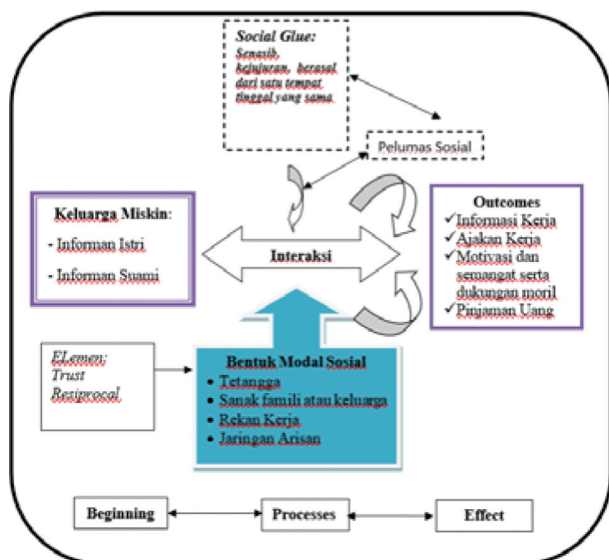
Latar belakang keluarga miskin di Kelurahan Tegalpanggung khususnya RT 35 yang menjadi informan berdasarkan temuan penelitian, sebagai berikut. Pertama, kondisi pendidikan kepala keluarga paling tinggi berpendidikan setingkat SMP dan anggota keluarga berpendidikan paling tinggi lulusan SMA dan SMP. Kedua, pekerjaan kepala keluarga kebanyakan di sektor informal seperti buruh bengkel las, sopir, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, penjaga warung, tukang ojek dan penjual gorengan. Ketiga, pendapatan rata-rata per bulan tidak lebih dari Rp. 450.000,-.

Keempat, status kepemilikan tempat tinggal bukan milik sendiri dan hanya mampu sewa/kontrak dengan luas kurang dari lima meter persegi. Kelima, kepala keluarga tidak mampu memberi makan anggota keluarganya tiga kali setiap hari. Kondisi tersebut membuat keluarga miskin di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung menjadi sulit dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan latar belakang himpitan hidup semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka.

Variasi Nilai Strategi *Survival* (Kelangsungan Hidup) Keluarga Miskin

Putnam, (1993) menyatakan bahwa modal sosial dapat menghubungkan dan mempersatukan orang dari berbagai domain sosial (menyatukan orang dari berbagai kebutuhan yang berbeda). Modal sosial juga cenderung mengikat identitas eksklusif untuk mempertahankan homogenitas. Modal sosial akan memobilisasi solidaritas pada saat akan menjadi perekat (*social glue*) yang kuat dalam melanggengkan kesetiaan dalam kelompok dan mempertahankan identitas idiosinkratik (spesifik). Lebih lanjut, menurut Bourdieu (Field, 2010) modal sosial sebagai modal relasi sosial yang bila dibutuhkan akan menjadi sokongan yang bermanfaat.

Menurut Lawang (2005), modal sosial tidak berdiri sendiri, namun tertanam (*embedded*) dalam sistem sosial. Adapun yang dimaksud dengan sistem sosial adalah merujuk pada hubungan relasi, jaringan, kewajiban, asa yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan dan sifat dapat dipercayai. Modal sosial itu berfungsi sama seperti modal-modal lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (pemenuhan kebutuhan hidup). Dalam konteks keluarga miskin, modal sosial juga menunjukkan fungsi sebagai memperlancar (*lubricants*) dan mempererat (*glue*) ikatan sosial untuk menjaga kelangsungan hidup. Penjelasan tersebut secara ringkas dapat diskemakan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Alur Modal Sosial Keluarga Miskin
Sumber: Hasil Analisis dan Temuan, diolah Peneliti

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa proses interaksi dalam relasi keluarga miskin melahirkan bentuk-bentuk modal sosial seperti tetangga, sanak famili, rekan kerja dan jaringan arisan. Setiap bentuk modal sosial itu terdapat atau tertambat (*embedded*) di dalamnya nilai kepercayaan (*trust*) dan saling timbal-balik kebaikan atau saling membalas (*resiprocal*). Kemudian, modal sosial itu lahir dari sebuah proses nilai yang dipercaya oleh keluarga miskin sebagai kekuatan interaksi untuk perekat sosial (*social glue*) sekaligus menjadi pelumas (*lubricants*) yang mempermudah dan memperkuat ikatan dalam relasi di antara keluarga miskin.

Nilai ikatan tersebut menghasilkan dukungan-dukungan manfaat (*outcomes*) untuk kelangsungan hidup mereka. Penjelasan ini senada dengan Hasbullah (2006) bahwa nilai sebagai sesuatu ide yang telah diwarisi secara turun temurun dianggap sakral, benar dan penting oleh setiap anggota kelompok masyarakat. Berdasarkan data temuan di lapangan, nilai yang menjadi perekat sosial (*social glue*) dan pelumas (*lubricants*) dalam mempermudah kuatnya ikatan dalam relasi di antara keluarga miskin sebagai berikut:

a. Senasib dan sepenanggungan

Pandangan itulah yang terus menjadi nilai penting yang ditekankan oleh para keluarga miskin di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung dan menjadi nilai landasan dari terjadinya kontak sosial yang melahirkan kuatnya ikatan sosial di antara sesama keluarga miskin. Senasib dan sepenanggungan menjadi sebuah perekat (*social glue*), dan pelumas (*lubricants*) yang mendasari para keluarga miskin untuk saling menjaga dan peduli satu sama lain. Dari pandangan para informan terungkap bahwa yang melandasi keluarga miskin di RT 35 untuk saling membantu satu sama lain adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan di antara para keluarga miskin. Prinsipnya sesuai hakikat manusia sebagai makhluk sosial; makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri juga mendukung tumbuhnya nilai perekat dan pelumas sosial senasib sepenanggungan.

b. Rasa Saling Menjaga, Membantu dan Melindungi

Pandangan inilah juga yang menjadi landasan keluarga miskin di Kelurahan Tegalpanggung merasa kuat dan merasa memiliki satu sama lain. Para keluarga miskin khususnya di RT 35 mempunyai cara pandang yang sama untuk menguatkan relasi keakraban dalam interaksi sehari-hari. Dalam pandangan informan terinisiasi miskin harta, tetapi tidak boleh miskin rasa kasih sayang. Kasih sayang dimaknai oleh para informan untuk saling menjaga, membantu dan melindungi satu sama lain, seperti ketika salah satu informan sakit dan membutuhkan dana lebih untuk pengobatan. Keluarga miskin RT 35 secara sukarela, ber-*guyub* (sama-sama) kompak untuk ber-*serkileran* (sumbangan seikhlasnya) dalam rangka membantu meringankan beban dari informan yang sakit.

Nilai di atas melandasi para keluarga miskin di RT 35 untuk saling membantu dan menjaga satu sama lain. Cara pandang para informan yang terpatri dalam nilai kehidupan mereka,

yaitu biar miskin harta tetapi tidak boleh miskin kasih sayang. Artinya, selalu peduli, saling menjaga dan membantu semampunya baik itu dukungan berupa materi dan tenaga sehingga bermanfaat untuk bersama.

c. Kejujuran

Kejujuran ternyata menjadi sebuah penguat (*social glue*) interaksi dalam membangun relasi sosial yang kuat. Nilai ini menjadi landasan dari setiap informan keluarga miskin baik berinteraksi dengan tetangga, rekan kerja ataupun dalam arisan. Nilai kejujuran menjadi suatu penguat yang melanggengkan relasi sosial antarsetiap aktor di sekitar lingkungan keluarga miskin. Kejujuran ini juga memperlancar (*lubricants*) dan mempererat (*glue*) ikatan sosial. Nilai ini seringkali menjadi daya tawar beberapa informan untuk bisa diterima kerja atau tetap dipertahankan kerja. Kejujuran dipandang informan sebagai nilai penting yang selalu dipertahankan untuk memperkokoh relasi sosial.

Hal ini juga ditemukan pada informan UW yang dipercaya selain sebagai buruh las, juga sebagai penagih uang kepada pelanggan. Perkara uang ketika dipercayakan kepada orang lain yang notabene tidak memiliki hubungan relasi sosial kerabat atau saudara menjadi hal yang sensitif karena ini menyangkut kepada kepercayaan besar yang diberikan kepada seseorang. Nilai kejujuran dalam pekerjaan menjadi nilai tawar lebih yang dimiliki para keluarga miskin khususnya informan UW. Di tengah kondisi miskin, informan tetap bekerja dengan kejujuran dalam bertingkah laku kesehariannya sehingga membuat informan tetap dipekerjakan hampir lebih tujuh tahun lamanya. Selain itu, kejujuran yang terbangun di antara relasi pekerja (informan UW) dan Juragan (Informan IJ) menjadi salah satu perekat sekaligus pelumas dalam mempererat hubungan relasi sosial di antara kedua informan sehingga mendatangkan manfaat kepercayaan lebih dari hubungan interaksi yang kuat dan langgeng.

d. Ikatan berasal dari satu tempat tinggal yang sama

Keberadaan modal sosial juga tidak dapat dilepaskan dari adanya kesamaan tempat asal atau tempat tinggal. Terlebih lagi ikatan berasal dari tempat tinggal yang sama juga merupakan salah satu bagian perekat sosial dan pelumas dalam memperkuat interaksi atau relasi sosial. Dalam konteks keluarga miskin di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung, sebagian besar sudah hidup berdampingan dalam waktu yang lama, memiliki ikatan atau relasi yang terjalin lebih erat antarsesama mereka dibandingkan dengan hubungan yang terjalin dengan pihak luar.

Relasi atau hubungan sosial yang sudah terbangun lebih dari puluhan tahun hidup bersama di tempat yang sama membuat ikatan di antara para keluarga miskin di RT 35 sangat erat. Mereka lebih cenderung yakin, peduli, percaya dan saling tolong-menolong antara keluarga miskin yang tinggal di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung. Padahal, di Kelurahan Tegalpanggung ini tersebar keluarga miskin yang sama di beberapa RT dan RW lainnya. Tetapi, ikatan dalam keluarga miskin di RT 35 lebih kuat (*in group*), kompak dan erat relasinya di antara mereka yang berasal dari tempat tinggal yang sama.

Nilai kesamaan tempat tinggal ini menjadi corong kuatnya relasi sosial yang diikat di antara keluarga miskin di RT 35 itu sendiri. Inilah poin penting sebagai salah satu perekat sosial (*social glue*) dan pelumas (*lubricants*) terbentuknya modal sosial dari suatu proses relasi yang erat dan kuat yang berasal dari satu tempat tinggal yang sama. Para keluarga miskin di RT 35 lebih saling melindungi dan peduli satu sama lain di antara warga yang sama asal tempat tinggalnya sehingga untuk hal yang manfaatnya bersama lebih mengutamakan keluarga miskin di RT 35.

Mengurai Bentuk Modal Sosial Keluarga Miskin

Tiga ilmuwan arus utama yang banyak merintis penelitian tentang modal sosial adalah

Bourdieu & Richardson, (1986), James Coleman (1994) dan Robert Putnam (1993). Perspektif Bourdieu mengenai modal sosial merupakan “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif” (Pratikno, 2001). Konsep tersebut menegaskan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang dapat dihidupkan melalui keanggotaan jejaring sosial. Pandangan teoritik Bourdieu juga berupaya menyelami bagaimana kelompok periferi atau pinggiran (*subordinate group*) misalnya kelompok miskin mampu meningkatkan level status sosial-ekonomi mereka dengan merancang, melaksanakan kegiatan dan investasi berbagai ragam modal di luar modal ekonomi (Dwyer dkk., 2006).

Sama halnya Coleman (1994) memaparkan modal sosial sebagai kesatuan sumber daya yang melekat pada relasi keluarga dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bermanfaat bagi pengembangan sosial. Hal ini berarti, dalam perspektifnya menekankan modal sosial terdiri dari aspek-aspek struktur sosial, keharusan dan asa, kanal informasi, dan akumulasi norma dan sanksi yang mangkus untuk menghambat dan menentukan jenis perilaku tertentu.

Dalam definisi Coleman, keterkaitan antara pendidikan sekolah dan pencapaian, temuannya mengulas ketercapaian SMU Katolik dalam memberikan berbagai keuntungan kepada para siswa yang berlatar belakang sosial kurang beruntung (miskin). Selain itu, Coleman menegaskan modal sosial sebagai fungsi fondasi dasar dalam relasi yang memberikan utilitas (keuntungan). Ia menyejajarkan konsep modal sosial sama dengan modal finansial, modal fisik, dan modal manusia; dengan membatasi modal sosial tersebut berwujud dalam relasi antarpribadi (Huang dkk., 2003).

Oleh karena itu, modal sosial yang kokoh dalam bentuk norma, nilai, dan jaringan keluarga

serta sekumpulan nilai dan jejaring masyarakat dapat mengkompensasi ketidakmujuran secara ekonomi (*economic disadvantages*). Jika perspektif ini dibenturkan dengan kemiskinan, pada umumnya orang miskin tidak memiliki ketercukupan modal ekonomi sehingga alternatif seperti modal sosial dapat didayagunakan bagi mereka untuk menjaga kelangsungan hidup.

Perintis modal sosial lain yang berasal dari Rochester, New York Robert Putnam, (2000), menjabarkan modal sosial sebagai “*features of social life networks, norms, and trust- that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives*”. Menurutnya, jaringan (*network*) berhubungan erat dengan aspek perilaku sedangkan norma dan kepercayaan merupakan sikap yang berkaitan dengan aspek sosio-psikologis (Rose, 1999). Putnam, (2000), kemudian mengulas konsep modal sosial ini, dengan mempertegas bahwa sekatan dari kehidupan sosial – jaringan, norma dan kepercayaan – yang membangkitkan partisipasi tindakan kolektif secara lebih mangkus untuk mencapai tujuan bersama.

Intinya penelitian ini mengolaborasi ketiga pandangan tersebut. Modal sosial merupakan kapital relasi interaksi antarpribadi individu atau kelompok, yang memiliki kesamaan nilai bersama. Selain itu, nilai bersama ini dimanifestasikan ke dalam bentuk relasi sosial dengan memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial. Penjelasan ini sejalan juga dengan pemikiran Sherraden (2006) melihat modal sosial sebagai aset tidak nyata yang lebih bersifat fleksibel, tidak secara legal diatur dan sering kali diatur secara tidak jelas oleh relasi sosial dan ekonomi. Dalam pandangannya terminologi modal sosial informal (*informal social capital*) seperti relasi keluarga, teman, koneksi yang sering kali disebut jaringan sosial dengan aktualisasi keuntungan dukungan materi, ikatan emosional, akses informasi dan kemudahan akses pada pekerjaan, kredit pinjaman, dan jenis aset lain.

Hubungan sosial informal ini secara potensial sangat penting dalam menciptakan

kelancaran atau kemudahan aktivitas sosial dan ekonomi. Pada sisi lain, orang miskin mungkin sangat tergantung pada jaringan sosial yang mereka miliki untuk menjaga kelangsungan hidup. Hal ini juga ditangkap oleh Fathy (2019), melihat modal sosial sebagai kapital nyata dari relasi individu dan kelompok. Ditambah, pemanfaatan relasi-relasi sosial merangkul nilai-norma, jaringan dan rasa kepercayaan untuk mendapatkan kemujuran ekonomi dan sosial.

Modal Sosial dalam Bentuk Relasi Ketetanggaan

Tetangga merupakan istilah yang menggambarkan perilaku kerja sama dan saling mendukung serta tolong-menolong antara dua atau lebih entitas sosial. Senada dengan pemikiran Michael Woolcock (2001a) bahwa modal sosial yang mengikat, yang berarti adanya ikatan antarorang dalam situasi yang sama seperti tetangga. Kondisi keluarga miskin mungkin sangat bergantung pada modal sosial yang mereka miliki. Salah satunya adalah modal sosial dalam bentuk ketetanggaan di lingkungan tempat tinggal. Tetangga dalam hubungannya dengan keluarga miskin di dalam lingkungan tempat tinggal mendeskripsikan pola hubungan saling membantu, mengisi dan bekerja sama. Ditambah lagi, diikat dalam situasi yang sama.

Adanya bantuan dari tetangga didasarkan atas perekat sosial (*social glue*) seperti senasib sepenanggungan, rasa kebersamaan dalam lingkungan tempat tinggal yang sama dan rasa kepedulian antara sesama golongan keluarga prasejahtera. Selain itu, ada *building trust* yang dibangun dari para informan kepada tetangga, yakni: pertama, adanya rasa percaya dari tetangga kepada informan meminjamkan uangnya untuk kebutuhan mendesak tanpa adanya jaminan apapun. Kedua, tetangga membantu dengan menitipkan jualannya kepada informan untuk dijual kembali tanpa harus membayar terlebih dahulu. Ketiga, tetangga memberi bantuan modal bukan pinjaman kepada informan untuk

membuka usaha kecil warung dengan sistem bagi hasil tanpa jaminan. Keempat, tetangga memberikan kepercayaan kepada anak sulung informan, meminjamkan sepeda motor untuk digunakan jasa ojek tanpa meminta uang sewa. Keempat hal tersebut menekankan adanya rasa kepercayaan yang dibalut ikatan kebersamaan antara informan dan tetangganya.

Terlihat elemen kepercayaan (*trust*) antara informan dan tetangga yang mengesampingkan adanya rasa curiga, sentimen negatif dan ketakutan berlebih harta atau modal yang dipinjamkan akan hilang. Kepercayaan di antara anggota komunitas menjadi elemen penting dalam modal sosial, tumbuh di antara interaksi aktor yang terlibat dalam proses yang panjang. Dalam relasi antarindividu, kepercayaan tumbuh ketika pengharapan aktor tertentu memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada aktor lain dengan harapan aktor tersebut dapat memegang dengan penuh tanggung jawab (Usman, 2018).

Selain itu, adanya elemen resiprositas atau kewajiban membantu dan membalas kembali kebaikan kepada tetangga. Resiprositas ini diwujudkan informan dengan menjaga kepercayaan tetangga dengan baik karena telah dibantu dengan menjaga motor pinjaman, membagi hasil keuntungan warung dengan transparan dan adil serta menjaga amanah dan mengelola titipan modal usaha. Selain itu, disaat tetangga mengalami kesulitan atau kemalangan, informan dengan cepat membantu. Seperti ketika orang tua dari tetangga mengalami kemalangan, informan dengan cekatan membantu menyiapkan segala keperluan dan koordinasi ke warga lain untuk pengurusan makam.

Realitas ini menegaskan bahwa modal sosial dalam bentuk tetangga memberikan manfaat satu sama lain antara informan dan tetangga. Modal sosial tersebut menjadi langkah alternatif dari para informan ibu-ibu mengatasi kesulitan hidup di lingkungan tempat tinggal.

Modal Sosial dalam Bentuk Kekerabatan atau Keluarga

Keluarga sebagai sebuah lembaga sosial yang paling dasar, keluarga memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup semua anggotanya. Ada beberapa fungsi keluarga seperti fungsi moralitas religius, fungsi sosiokultural, fungsi renjana (cinta kasih), fungsi proteksi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan edukasi, fungsi ketahanan ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Modal sosial keluarga miskin salah satunya adalah modal sosial berbentuk kekerabatan keluarga. Dalam modal sosial tersebut, peranan keluarga menjadi indikasi penting ketika informan mengalami kesulitan baik dalam memperoleh pekerjaan, menghadapi kesulitan keuangan dan mendapatkan penghasilan. Selain itu, informan juga memperoleh bentuk keuntungan seperti sokongan materi, emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan (Sherraden, 2006). Dalam konteks keluarga miskin, modal sosial dalam bentuk kekerabatan atau keluarga merupakan relasi antarpribadi yang hanya dipahami melalui intensitas interaksi secara lebih personal. Relasi ini kemudian disatukan dalam ikatan sedarah yang memiliki nilai kebersamaan yang sangat dekat.

Kekerabatan dalam keluarga luas baik itu dari orang tua, dan saudara informan menjadi katub penyelamat dalam mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi oleh keluarga miskin. Bantuan materi yang diberikan seperti dana keperluan sehari-hari dan pinjaman dana sangat ditekankan oleh informan. Sedangkan, bantuan nonmateri yang diberikan oleh keluarga juga berkontribusi dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh informan keluarga miskin, seperti bantuan moril atau nasehat-nasehat (*wejangan*) dari keluarga. Selain itu, akses informasi dan kemudahan pada pekerjaan dari keluarga juga sangat membantu para informan ketika sedang tidak memiliki pekerjaan.

Bantuan yang diberikan itu tanpa adanya jaminan, hanya kepercayaan atau *trust* sebagai

elemen modal sosial yang ada didalam keluarga atau kerabat. Kepercayaan dari kerabat atau ikatan darah keluarga juga menjadi jaminan dan nilai tawar bagi para informan. Ditambah lagi, terdapat juga elemen modal sosial *reciprocity* dalam hubungan kekerabatan untuk saling membalas kebaikan atau timbal balik dalam menjaga dan membantu satu sama lain.

Keberadaan sanak famili dan kerabat dekat sangat penting bagi keluarga miskin. Terlebih beberapa permasalahan yang sangat sensitif untuk diketahui oleh orang lain, hanya sanak famili atau kerabat dekat yang diperbolehkan mengetahui dan mengintervensi dalam pengentasan permasalahan tersebut. Selain itu, keluarga dapat memberikan jaminan rasa aman, dan nyaman serta lebih dapat mengerti persoalan yang dihadapi oleh keluarga miskin itu sendiri. Hal ini sesuai pendapat Field, (2010) yang menyatakan bahwa modal sosial secara khusus diekpresikan melalui ikatan primordial seperti hubungan kekerabatan, secara khusus ia menekankan bahwa asal-usul dari bentuk modal sosial yang paling efektif adalah hubungan yang dibangun sejak lahir atau memiliki ikatan tali darah.

Modal Sosial dalam Bentuk Pertemanan atau Rekan Kerja

Modal sosial dimaknai sebagai teman atau kolega merupakan bentuk kontak perilaku antara individu-individu untuk saling bekerja sama, dan tolong-menolong. Sejalan dengan pemikiran Michael Woolcock (Field, 2010) menjelaskan tipe modal sosial yang menjembatani, dan mencakup ikatan longgar dari beberapa orang seperti teman jauh dan rekan kerja. Modal sosial pertemanan yang dibangun oleh informan bapak-bapak atau suami di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung lebih menekankan pada pertemanan dalam kerja (rekan kerja). Rekan kerja tidak bisa dianggap sebagai bagian pelengkap, tetapi sebagai bagian utama dalam strategi keluarga miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Modal sosial berbentuk pertemanan atau rekan kerja dari para informan suami seperti bantuan informasi lowongan kerja, akses kemudahan pada pekerjaan, dan ajakan kerja. Bantuan ini didasarkan atas kebersamaan kolektif dari hubungan sosial yang baik antara informan dan teman rekan kerja. Ditambah lagi, kebersamaan kolektif timbul berdasarkan kepercayaan (*trust*) yang relatif lama antarrekan kerja dan informan suami. Selain itu, terendap (*embedded*) adanya resiprositas dalam memberikan bantuan, membuat modal sosial dari para informan dengan rekan kerja menjadi langgeng dalam relasional di tempat kerja. Resiprositas ini berwujud seperti adanya timbal balik dalam hal saling mengajak atau berbagi informasi kerja.

Modal Sosial dalam Bentuk Jaringan Arisan

Jaringan dapat digambarkan dalam bentuk arisan. Arisan dipahami sebagai pelembagaan hubungan tatap muka (*face to face relationship*). Hal itu dapat dijelaskan berdasarkan temuan data di lapangan, yakni sekelompok keluarga miskin di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung yang memiliki kesamaan tujuan, terakomodir dalam suatu wadah. Tujuan wadah arisan ini adalah sebagai perkumpulan warga yang diikat dalam status yang sama (sama-sama tergolong keluarga miskin). Modal sosial dalam wadah arisan, terwujud seperti kemudahan peminjaman uang, mendapatkan uang melalui sistem bagi-bagi, informasi kerja atau ajakan kerja serta melaksanakan tabungan bersama (dana kolektif) yang bertujuan agar setiap anggotanya bisa memperoleh segala kebutuhan ketika di hari raya.

Arisan terendap (*embedded*) elemen-elemen kepercayaan (*trust*) dan resiprositas (saling membalas dan mendatangkan kebaikan atau keuntungan satu sama lain). Senasib-sepenanggungan (sama-sama dalam kondisi miskin) menjadi nilai bersama para informan keluarga miskin di RT 35. Nilai bersama itu muncul dari suatu proses interaksi (*face to face*)

yang lama dan intens sehingga ikatan warga sangat kuat.

Dalam jaringan arisan, elemen kepercayaan (*trust*) yang ada dalam komunitas ini dibangun dengan tidak adanya rasa saling curiga dan kecurangan dalam proses pengocokan penerima arisan. Selain itu, tindakan memberikan uang kepada anggota bukan penerima hasil kocokan arisan (anggota yang sangat membutuhkan dana) dan penerima dengan rela serta percaya memberikan bagian jatah arisan kepada anggota yang pada saat itu memerlukan dana pinjaman. Hal inilah yang menjadi keistimewaan dari jaringan arisan. Elemen kepercayaan (*trust*) menjadi nilai penguat untuk saling membantu. Selain itu, terdapat elemen resiprositas (*reciprocity*), yakni ada kewajiban bagi para anggota yang menerima pinjaman uang dari arisan untuk membalas kembali kepada pemberi pinjaman disaat mereka membutuhkan.

Capaian dan Pelajaran Berharga dari Modal Sosial sebagai Strategi Keluarga Miskin dalam Menyiasati Kesulitan Hidup Keluarga Miskin dan Kegagalan Menyiasati Kesulitan Hidup

Strategi kelangsungan hidup merupakan segala upaya atau solusi dalam mengatasi kondisi krisis yang serba terbatas dalam menjaga kelangsungan penghidupan. Dalam kerangka pemikiran Chambers (1987) dan Widiyanto (2010), ada beberapa cara atau upaya untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar hidup bagi keluarga miskin, seperti: 1) adanya fragmentasi tugas pencarian nafkah anggota keluarga antarsuami, istri dan anak; 2) membangun kerja sama dengan anggota komunitas lain sebagai upaya mempertahankan garansi (jaminan) sosial masyarakat; 3) untuk tetap bertahan, usahakan menjalin dan memelihara relasi patronase, hal ini dilakukan karena keluarga miskin cenderung memiliki posisi inferior; 4) *mutual help* dengan tetangga dan saudara; 5) pekerjaan sambilan; 6) mengadaikan dan menjual aset; dan 7) penghematan makanan dan konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian, dari lima keluarga miskin yang dijadikan informan, diketahui terdapat dua keluarga miskin yang masih tetap terperangkap dalam kondisi kemiskinan. Kondisi ini menuntut mereka tetap berusaha keras dalam mempertahankan kelangsungan hidup, tetapi tetap saja belum mampu mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dua keluarga miskin ini terdiri dari satu keluarga utama lengkap (suami, istri dan anak) serta satu keluarga tunggal seorang *single parents* tanpa anggota keluarga atau anak. Kedua keluarga miskin ini hidup dan tinggal sudah lebih belasan tahun di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung. Pendidikan rendah dan pekerjaan serabutan, serta usia yang sudah tidak produktif menjadi kendala dua keluarga ini tetap terbelenggu dalam kemiskinan.

Berdasarkan temuan data di lapangan, penyebab dua informan keluarga miskin di RT 35, yaitu keluarga KP beserta informan istri Ibu BNF dan keluarga tunggal (*single parents*) informan HL tetap terperangkap miskin. Pertama, hubungan rekan kerja yang tidak bisa berjalan dengan baik disebabkan informan KP bekerja tanpa mengedepankan kejujuran yang berakibat memudahkan kepercayaan para rekan kerja sehingga informan beserta istri pun sulit memperoleh akses informasi dan ajakan kerja.

Kedua, para informan cenderung menarik diri untuk tidak terlibat mengakrabkan diri pada arisan. Padahal wadah tersebut sering kali memudahkan koneksi para keluarga miskin lain di RT 35 untuk memperoleh informasi atau ajakan kerja. Tidak hanya itu, *mutual help* yang dapat dijadikan pilihan sebagai strategi kelangsungan hidup dengan meminta bantuan keluarga sanak famili dan tetangga juga belum dapat maksimal karena kondisi tetangga dan keluarga yang tidak jauh berbeda dengan kondisi informan.

Akhirnya, berbagai hal di atas membuat konfigurasi modal sosial baik dalam bentuk kerabat, tetangga, rekan kerja dan jaringan arisan tidak berfungsi baik atau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin bagi beberapa

informan keluarga miskin di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung. Selain itu, ketiadaan aset-aset berharga membuat informan hanya bertahan hidup dengan kondisi kemiskinannya tanpa dapat mencapai kondisi lebih baik.

Keluarga Miskin dan Keberhasilan Menyiasati Kesulitan Hidup

Keadaan yang sulit memaksa keluarga miskin untuk memaksimalkan aset yang ada untuk menjaga kelangsungan hidup. Berdasarkan temuan, keluarga miskin di RT 35 Kelurahan Tegalpanggung diketahui terdapat tiga informan yang penghidupannya (*livelihood*) dapat dikatakan “sudah lebih baik”. Dalam pandangan mereka, sudah “lebih baik” dimaknai seperti makan tiga kali sehari, ada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat tetap bekerja, pendapatan stabil, anak dapat sekolah, ketika sakit dapat diobati, dapat menyisihkan pendapatan untuk tabungan, dan tidak memiliki hutang (mampu membayar cicilan hutang). Namun demikian, kondisi aset nyata (*tangible asset*) tidak mengalami penambahan dan hanya kebutuhan subsisten atau harian yang dapat dipenuhi.

Berdasarkan temuan data di lapangan terdapat tiga keluarga informan yang masih terkategori miskin tetapi kondisinya penghidupannya sudah lebih baik (berhasil menyiasati kesulitan hidup). Kondisi ini dikarenakan mereka dapat memanfaatkan dan mendayagunakan modal sosialnya (*social capital*) sebagai strategi menjaga kelangsungan hidup.

Keluarga miskin yang hidupnya lebih baik melakukan berbagai cara dan upaya untuk menyiasati kesulitan baik aset maupun akses dengan pemanfaatan modal sosial, seperti mengikuti arisan, memanfaatkan *mutual help* (kerabat dan tetangga), dan menjaga relasi yang baik dengan rekan kerja atau juragan. Hal ini merupakan suatu mekanisme dari terbentuknya modal sosial seperti tetangga, teman dan rekan kerja, sanak keluarga (*family*) dan terlibat arisan. Di sisi lain, memperluas relasi melalui modal sosial dalam bentuk keluarga, tetangga,

rekan kerja dan jaringan arisan bisa jadi sebagai investasi sosial.

Selain itu, informan keluarga miskin yang dalam pandangannya sudah “lebih baik” dikarenakan upaya dan cara mereka mendayagunakan modal sosial yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Field (2010) bahwa meminta pertolongan teman, kolega, keluarga atau kenalan yang dapat dipercaya jauh lebih mudah dan lebih cepat membuahkan hasil yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh bahwa keluarga miskin yang kehidupannya lebih baik tidak terlepas dari mendayagunakan modal sosial yang mereka miliki sebagai pilihan untuk strategi menjaga kelangsungan hidup.

Modal sosial muncul dari proses interaksi antara individu, antara individu bersama kelompok dan antarkelompok. Dinamika interaksi memunculkan modal sosial yang terstruktur dari sebuah nilai. Nilai tersebut adalah kebersamaan, kerja sama, kesamaan nasib, kekeluargaan, kepercayaan, kesamaan asal daerah, dan visi.

Modal sosial ini sebagai basis katub penyelamat atau pilihan bertindak alternatif yang dimiliki kelompok manusia. Proses modal sosial ini muncul dari sebuah interaksi secara personal dan kolektif yang relatif panjang dan mendalam. Senyatanya, kualitas ikatan sosial lebih baik jikalau sesama anggota warga disatukan melakukan kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau asosiasi sosial. Modal dasar dari kuatnya ikatan sosial adalah adanya keinginan saling bekerja sama di antara individu dalam kelompok. Saling keterkaitan dan bekerja sama akan membangun relasi yang dilandaskan adanya rasa kepercayaan di antara para anggotanya.

Kecakapan masyarakat untuk bekerja sama demi meraih tujuan kolektif di dalam berbagai kelompok disinyalir sebagai embrio modal sosial. Kecakapan bekerja sama timbul karena adanya landasan rasa saling percaya di dalam sebuah masyarakat atau di unit-unit terkecil seperti keluarga. Modal sosial dapat dirasakan

(menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang terkecil ataupun dalam kelompok masyarakat.

Proses membangun modal sosial dalam bentuk tetangga, kerabat, dan rekan kerja serta jaringan arisan telah dilakukan informan melalui proses interaksi yang relatif lama dan mendalam (bisa sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun agar bisa akrab dan kompak). Proses yang demikian akan memunculkan nilai-nilai dari pembentuk modal sosial. Seperti kebersamaan, kerja sama, kesamaan nasib, kejujuran, kekeluargaan, kesamaan asal tempat tinggal, dan visi. Nilai tersebut memajukan elemen kepercayaan (*trust*) dan resiprositas. Mutu bangun modal sosial tersebut akan jauh lebih baik jika di antara warga terikat untuk melakukan kegiatan-kegiatan berintegrasi dalam berbagai kelompok sosial, seperti gotong-royong dan acara selamatan.

Di sisi lain, upaya memanfaatkan modal sosial (kekerabatan, teman, tetangga dan jaringan) muncul dari situasi dan kondisi krisis pada keluarga miskin. Lebih lanjut, bagi mereka menjadikan tetangga, kerabat, rekan kerja dan jaringan arisan sebagai tumpuan untuk meminta bantuan dan menjaga kelangsungan hidup.

Penutup

Kesimpulan

Keluarga miskin di Tegalpanggung merupakan potret masyarakat yang mendayagunakan modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup. Keluarga atau sanak famili, teman atau rekan kerja, tetangga dan jaringan arisan merupakan bentuk dari modal sosial keluarga miskin. Bentuk modal sosial tersebut merupakan seperangkat pilihan strategi yang sewaktu-waktu dapat diaktivasi. Aktivasi ini memberikan keuntungan bagi keluarga miskin, seperti kemudahan memperoleh dana pinjaman tanpa jaminan, informasi pekerjaan, dana bantuan ketika sakit, dan dukungan moril. Bagi keluarga miskin keuntungan tersebut sudah dapat membantu kehidupan mereka.

Di sisi lain, bagi keluarga miskin modal sosial dapat menjadi suatu katub penyelamat

(*safety valve*). Katup tersebut dimanfaatkan sebagai pilihan strategi kelangsungan hidup dalam mengatasi keterbatasan aset dan akses. Capaian dan pelajaran berharga dari modal sosial keluarga miskin adalah bila relasi dijalin dengan baik maka akan melahirkan akses yang lebih mudah pada barang langka, peluang atau kesempatan. Ditambah lagi, keluarga miskin sangat bergantung dari modal sosialnya.

Rekomendasi

Pertama, keluarga miskin hendaknya dapat menguatkan sisi aset tidak nyata yang dimiliki hampir semua orang yaitu modal sosial. Keluarga miskin perlu memperkuat secara kolektif mendayagunakan potensi kebersamaan dalam hal mengatasi kesulitan hidup. Kedua, pemerintah, sebaiknya tidak mencanangkan program yang hanya bermanfaat temporer sehingga membuat masyarakat golongan pra sejahtera semakin terpuruk dan pasif. Sebaiknya pemerintah menguatkan program-program berbasis pemberdayaan modal sosial dari suatu masyarakat. Program berbasis gotong-royong kolektif masyarakat dapat menciptakan kemandirian komunitas. Ketiga, masyarakat hendaknya tidak menjadi individualis dan harusnya saling membantu. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia kental akan kultur solidaritas gotong-royong. Sebaiknya, didayagunakan kultur tersebut sebagai kunci penumbuh subur adanya modal sosial sehingga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan hidup.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Dr. Sunyoto Usman, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17–29.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2019/11/13/163/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015-2019.html>
- Bourdieu, P., & Richardson, J. G. (1986). *The forms of capital*.
- Chambers, R. (1987). Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. In *Jakarta: LP3ES*.
- Coleman, J. S. (1994). *Foundations of Social Theory*. Harvard university press.
- Dwyer, C., Modood, T., Sanghera, G., Shah, B., & Thapar-Bjorkert, S. (2006). Ethnicity as social capital? Explaining the differential educational achievements of young British Pakistani men and women. *Ethnicity, Mobility and Society' Leverhulme Programme Conference at University of Bristol*, 16–17.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Field, J. (2010). Modal Sosial. *Yogyakarta: Kreasi Wacana*.
- Habib, F., & Laksono, Z. Y. T. (2019). Dual Track Poverty Alleviation : Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital Dual Track Pengentasan Kemiskinan : Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(2).
- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press.
- Huang, Q., Friedman, A., & Nichols, T. (2003). *Social Capital in the West and China*.
- Kornita, S. E., & Yusuf, Y. (2013). Strategi Bertahan Hidup (*Life Survival Strategy*) Penduduk Miskin Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan. *Jurnal Ekonomi*, 19(04).
- Lawang, R. M. Z. (2005). Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik. In *Universitas Indonesia: FISIP UI PRESS*. Fisip UI Press.
- Mahendra, S. (2018). Keterkaitan Modal Sosial Dengan Strategi Kelangsungan Usaha Pedagang Sektor Informal Di Kawasan Waduk Mulur: Studi Kasus Pada Pedagang Sektor Informal Di Kawasan Waduk Mulur Kelurahan Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2).

- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI-Press.
- Nasution, A. (2017). Peranan Modal Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga di pedesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(2), 171–183.
- Pratikno. (2001). *Merajut Modal Sosial untuk Persamaan dan Integrasi Sosial*. FISIPOL UGM.
- Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(Spring), Vol. 4. Available online: <http://www.prospect.org/print/vol/13> (accessed 7 April 2003).
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. In *Culture and politics* (pp. 223–234). Springer.
- Rose, R. (1999). *What Does Social Capital Add to Individual Welfare?: An Empirical Analysis of Russia* (Issue 15). CiteSeer.
- Saheb, S., Slamet, Y., & Zuber, A. (2018). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1).
- Sherraden, M. (2006). *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Raja Grafindo Persada.
- Soebanto, H. (2012). *Segoro Amarto Turunkan Angka Kemiskinan di Tegalpanggung*. AntaraNews Yogya. <https://jogja.antaranews.com/berita/298439/segoro-amarto-turunkan-angka-kemiskinan-di-tegalpanggung>
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Widiyanto. (2010). *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan*. LPP UNS dan UNS PRESS.
- Woolcock, M. (2001a). Microenterprise and Social Capital: A framework for theory, research, and policy. *The Journal of Socio-Economics*, 30(2), 193.
- Woolcock, M. (2001b). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.

Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Implementation and Level of Community Satisfaction with the Non-Cash Food Assistance Program

Eddy Kiswanto¹²

¹ Mahasiswa Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi kebijakan, UGM

² Staf Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM

Jl. Tevesia Bulaksumur Yogyakarta, 55281, E-mail: eddykiswanto_cpss@ugm.ac.id, HP: 081227068373

Diterima tanggal 26 Februari 2021, diperbaiki tanggal 18 Maret 2021, disetujui tanggal 5 Mei 2021

Abstract

The assessment of the community as program beneficiaries should be known because it is one of important materials in evaluating and improving the implementation of the program. This study tries to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) and the satisfaction level of the Beneficiary Families (KPM) of this program. This research uses a quantitative approach with a survey method. The survey was carried out by direct or face-to-face interview with 700 KPM in Medan, Bandar Lampung, North Jakarta, Tasikmalaya, Surakarta, Tegal, Malang, Probolinggo, Mataram and Makassar. The results shows that 82.9 percent of KPM already knew that BPNT is a substitute program for Rastra / Raskin program. Most of the KPM had disbursed BPNT with foodstuffs such as rice and sugar. All of the KPM PKH in the ten cities have disbursed BPNT. KPM that have not made BPNT disbursement are 52.8 percent. It is because they have not received the disbursement schedule. Meanwhile, 15.5 percent of the KPM have not received a BPNT card. Many of the KPM do not know yet that balances can be exchanged at any time outside of the predetermined time or can be left. The problem that arises related to this program is that 50.3 percent of the KPM complained about the rice quality is poorer than the rice in other shops / stalls. In addition, 72.9 percent of the KPM complained about the absence of transaction evidence (receipts / notes) when making transactions at E-Warong. The level of community satisfaction with the BPNT program was very high because almost 90 percent stated that they were quite satisfied and satisfied. The important recommendations from this study include 1) it is necessary to increase the socialization of the BPNT program; 2) it is necessary to increase the quality of foodstuffs; 3) it is necessary to improve the quality of E-Warong services; 4) it is needed to establish an institution addressing public complaints; and 5) it is needed to monitor and evaluate of the program regularly.

Keywords: *noncash food assistance; program implementation; beneficiary families; level of satisfaction*

Abstrak

Penilaian masyarakat sebagai penerima manfaat dari suatu program sangat penting untuk diketahui sebagai bahan evaluasi dan peningkatan implementasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pelaksanaan survey dilakukan dengan wawancara langsung atau tatap muka dengan 700 KPM di Kota Medan, Bandar Lampung, Jakarta Utara, Tasikmalaya, Surakarta, Tegal, Malang, Probolinggo, Mataram, dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 82,9 persen KPM mengetahui bahwa program ini merupakan pengganti program Rastra/Raskin. Sebagian besar KPM telah mencairkan BPNT dengan jenis bahan pangan berupa beras dan gula. Semua KPM PKH di sepuluh kota tersebut telah mencairkan BPNT. KPM yang belum melakukan pencairan BPNT sebanyak 52,8 persen karena belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan. Sementara sebanyak 15,5 persen belum mendapatkan kartu BPNT. KPM banyak yang belum mengetahui bahwa saldo dapat ditukarkan kapan saja di luar waktu yang telah ditentukan atau dapat disisakan. Permasalahan yang muncul terkait program ini adalah sebesar 50,3 persen mengeluhkan kualitas beras yang kurang baik jika dibandingkan dengan kualitas beras di toko/warung lainnya. Selain itu, sebesar 72,9 persen mengeluhkan tidak adanya bukti transaksi (bon/nota) ketika melakukan transaksi di E-Warong. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPNT sangat tinggi karena hampir 90 persen menyatakan cukup puas dan puas. Rekomendasi penting dari penelitian ini antara lain 1) Perlu peningkatan

sosialisasi program BPNT; 2) Peningkatan kualitas bantuan pangan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan E-Warong; 4) Pembentukan lembaga untuk menangani keluhan masyarakat; dan 5) Perlunya monitoring dan evaluasi program BPNT.

Kata Kunci: bantuan pangan nontunai; implementasi program; keluarga penerima manfaat; tingkat kepuasan

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program jaminan sosial khususnya program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan tingkat kepuasan masyarakat penerima program. Produktivitas bahan pangan yang tidak stabil dan harganya yang cenderung meningkat mengakibatkan semakin sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan pangan. Disisi yang lain, terjadi peningkatan inflasi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan (Suryana, 2014). Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi dengan cara memberikan bantuan secara berkesinambungan kepada masyarakat miskin. Pemerintah terus berupaya memperbaiki berbagai program bantuan yang diberikan agar dapat tepat sasaran, efektif dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Beberapa program bantuan pemerintah seperti bantuan langsung pemerintah, bantuan beras untuk rakyat miskin, bantuan pangan secara nontunai, dan subsidi input pertanian diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariani, 2010).

Program BPNT merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang senantiasa diupayakan pemerintah. Untuk itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015- 2019 diarahkan pada: (1) Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif; (2) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar; dan (3) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Salah satu

upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah penyelenggaraan perlindungan sosial dengan menggulirkan program penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan program ini adalah mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (Bappenas et al., 2017).

Program bantuan pangan seperti Raskin dan BPNT diberikan kepada masyarakat miskin dengan pemberian subsidi harga. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*). Program *in-kind transfer* (Program Raskin) dan program *cash-transfer* (Program BLT) memiliki dampak yang berbeda terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun, hasil interaksi antara kedua program tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Program *in-kind transfer* akan menyebabkan peningkatan konsumsi barang-barang tertentu karena harga pada tingkat lokal akan menurun. Sedangkan, program *cash transfer* akan menyebabkan peningkatan harga pada tingkat lokal (Cunha JM, De Giorgi G, 2018). Namun, jika dilihat dari efektivitas penggunaan biaya, program *cash transfer* lebih baik dibandingkan dengan *in-kind transfer* (Currie, JM and Gahvari F., 2008; Grosh, et.al., 2008).

Program bantuan pangan tunai berupa kebijakan Raskin yang telah berjalan beberapa lama, kemudian muncul wacana untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi diberikan kepada penerima manfaat secara nontunai. Kebijakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi nontunai ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial efektif dan lebih tepat sasaran serta mendorong perkembangan keuangan inklusif. Pemerintah menerbitkan

regulasi baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016. Peraturan ini keluar didasarkan pada keprihatinan akan buruknya akses masyarakat berpendapatan rendah dalam mengakses perbankan serta kesulitan mereka dalam mengelola keuangan mereka sehingga diharapkan melalui strategi pengelolaan keuangan dan semakin baiknya akses mereka terhadap bank maka akan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan (Rachman et al., 2018).

Kebijakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi nontunai sebagai sebuah kebijakan publik akan selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birkland, 2011; Heineman, et.al., 2001). Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan oleh pengambil kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan output atau *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh faktor kebijakan itu sendiri dan faktor diluar kebijakan. Menurut Keban, kategori faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi antara lain ditunjukkan melalui: a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, b) dukungan publik, c) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, d) dukungan dari pejabat atau atasan, serta e) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007).

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana program BPNT tersebut diimplementasikan di masyarakat. Perlu digali informasi mengenai bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPNT. Tulisan ini berusaha mengetahui implementasi program BPNT dan penilaian masyarakat terhadap program ini. Rumusan masalah dalam tulisan ini dapat diringkas menjadi bagaimana implementasi program BPNT dan tingkat kepuasan masyarakat di Indonesia.

Metode Penelitian

Survei BPNT dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dan menggunakan wawancara terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Pemilihan lokasi survei didasarkan pada pertimbangan sudah adanya proses pencairan program BPNT di lokasi tersebut. Basis data yang digunakan adalah data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dimiliki TNP2K. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *Probability Proportion to Size (PPS)*, yaitu suatu prosedur pengambilan sampling dimana probabilitas yang dipilih adalah proporsional dengan ukuran unit utama, kelompok yang lebih besar memiliki probabilitas lebih besar untuk terpilih dibandingkan dengan kelompok yang lebih kecil.

Pemilihan sampel untuk survei dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan. Di tingkat kabupaten/kota dipilih dua kecamatan dengan jumlah KPM paling besar. Berikutnya dari setiap kecamatan terpilih kemudian ditentukan tiga desa/kelurahan sebagai lokasi survei. Desa/kelurahan pertama dan kedua merupakan wilayah dengan jumlah KPM terbesar, sementara wilayah ketiga memiliki jumlah KPM terkecil.

Alasan pemilihan desa/kelurahan yang memiliki KPM terbesar dibandingkan dengan lokasi yang memiliki KPM terkecil untuk membandingkan perbedaan isu dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan BPNT. Jumlah responden di setiap desa/kelurahan ditetapkan secara proporsional terhadap total KPM di kecamatan tersebut. Desa/kelurahan dengan proporsi KPM yang lebih besar akan memiliki calon responden yang juga lebih besar dibanding desa/kelurahan dengan proporsi KPM kecil. Selanjutnya responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu responden penerima PKH dan non-PKH. Penentuan jumlah responden menggunakan perbandingan antara jumlah penerima PKH dan non-PKH secara keseluruhan. Dari setiap kelompok,

calon responden dipilih secara acak (*random sampling*) dari daftar KPM yang ada.



Gambar 1
Tahap Penentuan Responden BPNT
Sumber: PSKK UGM, 2017

Kegiatan survei dilakukan di delapan provinsi dan mencakup 10 kota di Indonesia. Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Dalam survei ini dilakukan kunjungan dan wawancara secara tatap muka terhadap rumah tangga penerima BPNT yang mencapai 700.

Tabel 1
Lokasi Survei dan Jumlah Responden

No	Prov	Kab/Kota	Jumlah Responden
1	Sumut	Medan	70
2	Lampung	Bandar Lampung	70
3	NTB	Mataram	70
4	Sulsel	Makassar	70
5	Jakarta	Jakarta Utara	70
6	Jabar	Tasikmalaya	70
7	Jateng	Tegal	70
		Surakarta	70
8	Jatim	Probolinggo	70
		Malang	70
Total		10	700

Sumber: PSKK UGM, 2017

Di bagian awal tulisan ini diuraikan mengenai transformasi program BPNT. Selanjutnya akan dibahas tentang implementasi program BPNT

dan terakhir membahas tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi program BPNT dari perspektif penerima program.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Program BPNT di Indonesia

Pada tahun 2016/2017 Pemerintah Indonesia mulai menjalankan program BPNT. BPNT adalah transformasi program Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), yang memungkinkan penerima manfaat menggunakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk membeli beberapa makanan tertentu di outlet/agen bank yang ditunjuk yang disebut “E-Warong” (Kube PKH, Rumah Pangan Kita/RPK Bulog). Tujuan BPNT adalah untuk meningkatkan penargetan program Raskin/Rastra. Pada saat bersamaan, program ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak penerima manfaat dalam memilih kuantitas serta kualitas makanan yang mereka butuhkan.

Implementasi awal BPNT dilaksanakan di 17 provinsi meliputi 44 sampai 50 kota di Indonesia. Provinsi tersebut antara lain adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai merupakan transformasi subsidi Rastra yang telah berjalan selama ini dan diluncurkan agar seluruh bantuan sosial diberikan secara nontunai melalui sistem perbankan sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol penyalurannya. Skema bantuan tersebut mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi didapatkan oleh KPM dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan nontunai yang telah disediakan.

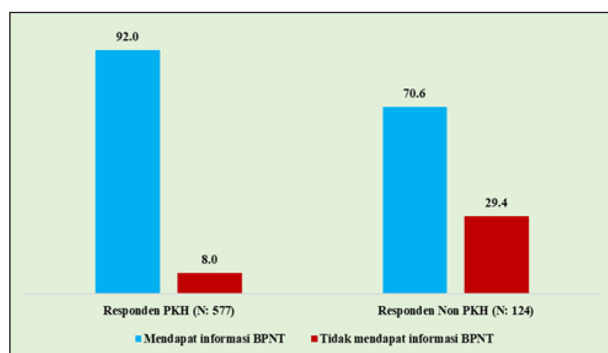
Tabel 2
Perubahan Program Rastra Menjadi BPNT

Beras Sejahtera (RASTRA)	Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT)
- Masalah Program Rastra yang sulit diselesaikan, khususnya pada ‘ketidaktepatan’ mulai dari sasaran atau penerima manfaat, jumlah yang seharusnya diterima, harga tebus, keterlambatan waktu, kualitas beras, dan persoalan administratif lainnya - KPM tidak dapat memilih bahan pangan lain kecuali beras	- Penyaluran bantuan melalui bank memberi kemudahan mengontrol, memantau penyalurannya, dan mengurangi penyimpanan - KPM memiliki kebebasan membeli bahan pangan yang dibutuhkan, selain beras (telur, minyak goreng, gula, bawang, daging) - Mendorong perluasan inklusi keuangan

Sumber: Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, 2017.

Pengetahuan Rumah Tangga terhadap Program BPNT

Pengetahuan responden tentang program BPNT diketahui bahwa sebagian besar telah mendapatkan informasi umum tentang program BPNT tersebut. Dari 700 KPM dalam survei ini, diketahui hampir 90 persen telah mendapatkan informasi tersebut meskipun ada sepersepuluh responden yang tidak mendapatkan informasi. Apabila dibedakan antara keluarga penerima PKH dan Non-PKH diketahui pengetahuan keluarga PKH lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga Non-PKH tentang informasi umum mengenai program BPNT. Keluarga PKH yang mengetahui program BPNT mencapai 92 persen, sementara keluarga Non-PKH hanya sebesar 70,6 persen.



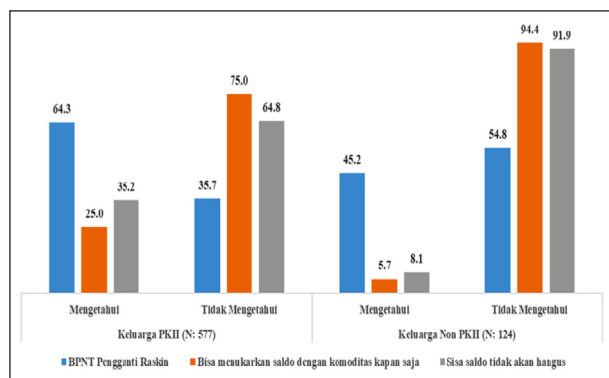
Gambar 2

Pengetahuan Responden tentang Informasi Umum Program BPNT

Sumber: PSKK UGM, 2017

Secara umum KPM mengetahui bahwa BPNT sebagai pengganti program Rastra atau Raskin, meskipun persentasenya tidak terlalu tinggi. Menurut keluarga penerima PKH yang mengetahui bahwa program BPNT adalah pengganti program Rastra/Raskin mencapai 64,3 persen. Sementara keluarga Non-PKH hanya sebanyak 45,2 persen yang mengetahui bahwa BPNT adalah program pengganti program Rastra/Raskin.

Pengetahuan terkait program BPNT lainnya adalah penerima bantuan dapat menukarkan saldo dengan komoditas kapan saja. Pada keluarga PKH, pengetahuannya mencapai 25 persen, sedangkan keluarga non-PKH hanya sebesar 5,7 persen. Artinya, banyak KPM yang tidak mengetahui secara pasti kapan waktu penukaran saldo dengan barang dapat dilakukan. Pengetahuan selanjutnya terkait program BPNT adalah jika penerima manfaat tidak menukarkan seluruh saldo mereka, saldo yang tersisa tersebut tidak akan hangus. Pengetahuan dalam hal sisa saldo tidak akan hangus ini lebih tinggi pada keluarga PKH dibanding keluarga non-PKH masing-masing sebesar 35,2 persen dan 8,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat BPNT menilai bahwa sisa saldo akan hangus jika tidak dimanfaatkan untuk ditukar dengan berbagai komoditas.



Gambar 3

Pengetahuan Rumah Tangga tentang BPNT

Sumber: PSKK UGM, 2017

Implementasi Program BPNT

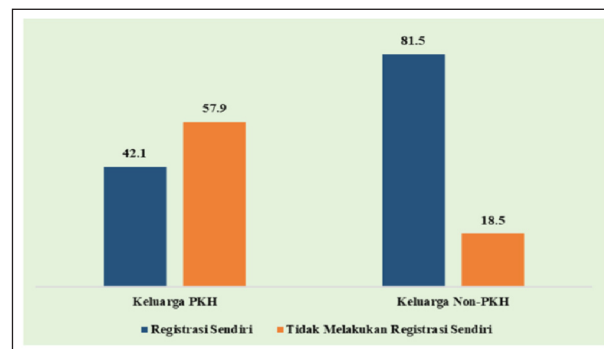
Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui empat tahapan yaitu: 1) registrasi dan/atau pembukaan rekening; 2) edukasi dan sosialisasi; 3) penyaluran bantuan; dan 4) pembelian barang (Permensos Nomor 11/2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2018).

Registrasi/Aktivasi Kartu BPNT

Registrasi atau aktivasi adalah tahap pengesahan kartu yang dilakukan di kantor kecamatan atau agen yang ditunjuk oleh pemerintah. Registrasi ini merupakan proses yang harus dilalui oleh KPM untuk mendapatkan bantuan pangan, melalui penukaran *e-voucher*.

Hasil survei menunjukkan bahwa proses registrasi atau aktivasi kartu BPNT hampir setengah dari total keluarga (49,1 persen) yang melakukan sendiri registrasi atau aktivasi rekening BPNT. Selebihnya tidak melakukan registrasi atau aktivasi sendiri mencapai 50,9 persen. Apabila dibedakan antara keluarga penerima PKH dan Non-PKH yang melakukan

registrasi atau aktivasi sendiri, diketahui keluarga Non-PKH lebih banyak dibandingkan dengan keluarga PKH yaitu masing-masing 81,5 persen dan 42,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keluarga Non-PKH dalam melakukan registrasi/aktivasi kartu BPNT jauh lebih tinggi dibanding dengan keluarga penerima PKH.



Gambar 4

Keluarga Melakukan Registrasi/Aktivasi BPNT

Sumber: PSKK UGM, 2017

Sebagian KPM yang belum melakukan registrasi atau aktivasi sendiri rekening BPNT memiliki berbagai alasan. Alasan paling banyak disebabkan belum diterimanya kartu BPNT yaitu sebanyak 71 persen. Selanjutnya alasan lain karena proses registrasi atau aktivasi sudah dilakukan oleh orang lain yang mencapai 21,9 persen dan sebagian karena dapat menggunakan KKS lama (7,2%). Terdapat perbedaan alasan belum dilakukannya registrasi atau aktivasi rekening BPNT antara keluarga PKH dan Non-PKH. Alasan terbanyak untuk keluarga PKH adalah belum memperoleh BPNT, sedangkan keluarga Non-PKH paling banyak karena alasan utamanya sudah dilakukan oleh orang lain.

Tabel 3
Alasan Keluarga Tidak Melakukan Registrasi/Aktivasi BPNT

Alasan Tidak Melakukan Registrasi/ Aktivasi Sendiri	Keluarga PKH		Keluarga Non-PKH		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sudah didaftarkan oleh orang lain	58	17,1	21	100,0	79	21,9
Dapat menggunakan KKS lama	26	7,6	0	0,0	26	7,2
Belum memperoleh kartu BPNT	257	75,4	0	0,0	257	71,0
Total	341	100,0	21	100,0	362	100,0

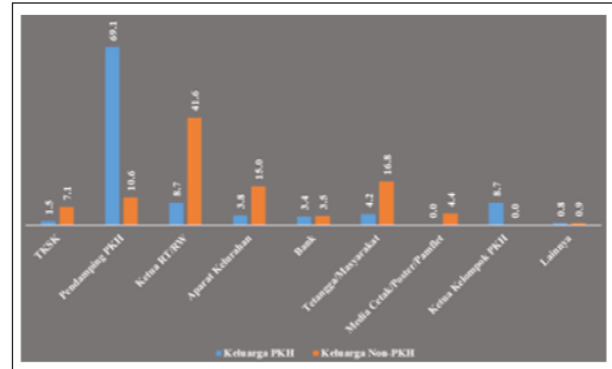
Sumber: PSKK UGM, 2017

Edukasi dan Sosialisasi

Tahapan kedua dalam penyaluran BPNT adalah edukasi dan sosialisasi. Hal ini dapat diukur dari tingkat pengetahuan keluarga KPM tentang program BPNT. Pengetahuan adalah kemampuan untuk menerima, mempertahankan, dan menggunakan informasi, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keterampilan. Sebagian besar dari pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari pendidikan baik formal maupun informal, pengalaman pribadi maupun orang lain, lingkungan, serta media massa (Siltrakool, 2017). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh (Ajzen, 1991) disebutkan, bahwa seseorang akan berencana untuk terlibat dalam suatu perilaku ketika mereka bermaksud melakukannya. Perilaku sangat terkait erat dengan sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Zhou et al., 2013; Tohidinia & Mosakhani, 2010); and Ajzen, 1991).

Hasil survei menunjukkan pengetahuan keluarga tentang jadwal registrasi/aktivasi kartu BPNT paling banyak bersumber dari pendamping PKH mencapai 51,6 persen. Sumber informasi berikutnya adalah ketua RT/RW (18,5%) dan tetangga/masyarakat (7,9%). Sumber informasi paling banyak yang diterima dari pendamping PKH ini karena banyaknya penerima BPNT yang juga penerima PKH. Pengetahuan tentang jadwal registrasi/aktivasi antara keluarga PKH dan Non-PKH diketahui, paling banyak adalah pendamping PKH untuk

keluarga PKH (69,1%). Sementara untuk keluarga Non-PKH paling banyak bersumber dari Ketua RT/RW yang mencapai 41,6 persen.



Gambar 5
Sumber Informasi tentang BPNT
Sumber: PSKK UGM, 2017

Setelah kartu BPNT di registrasi/aktivasi maka setiap KPM akan mendapatkan PIN. Pengertian PIN atau *Personal Identity Number* merupakan tanda tangan elektronik mengingat fungsinya dalam verifikasi. Sebagaimana diatur dalam Bab 1 Pasal 1 angka ayat 22 dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang dimaksud tanda tangan elektronik adalah: “tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi” (PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019).

Tabel 4
Pengetahuan Keluarga tentang Kegunaan PIN Kartu BPNT

Pengetahuan Tentang Kegunaan PIN	Keluarga PKH		Keluarga Non-PKH		Total	
	N	%	N	%	N	%
Password/kunci untuk mengakses rekening BPNT	361	55,9	29	58,0	390	56,0
Pengaman rekening	163	25,2	9	18,0	172	24,7
Orang lain tidak bisa mengakses rekening	122	18,9	12	24,0	134	19,3
Total	646	100,0	50	100,0	696	100,0

Sumber: PSKK UGM, 2017

N : jumlah jawaban bukan jumlah KPM (*multiple response*)

Berdasarkan hasil survei diketahui sebagian besar KPM mengetahui apa yang dimaksud dengan PIN yaitu sebanyak enam

dari 10 keluarga (56%). Dari sejumlah KPM yang mengetahui tentang PIN, sebagian besar memahami kegunaannya sebagai kunci

untuk mengakses rekening tabungan (56%). Kegunaan lainnya adalah sebagai pengaman rekening tabungan (24,7%) dan kegunaan lain adalah agar orang lain selain yang berhak tidak dapat mengakses rekening tabungan (19,3%).

Keluarga memiliki cara untuk membantu mengingat/menyimpan PIN karena sebagian besar yakni 62,3 persen mengaku mempunyai cara tertentu. Sebagian besar KPM menyimpan PIN dengan cara mencatatnya dibuku atau kertas sebanyak 65,7 persen. Berikutnya adalah menyimpan PIN tersebut didalam HP sebanyak 15,6 persen dan cara menghafal dan tidak pernah mengganti nomor PIN yaitu sebesar 5,6 persen. Cara lain yang digunakan adalah menyimpan kertas berisi PIN yang berasal dari bank yaitu sebanyak 4 persen.

Tabel 5
Pengetahuan Keluarga tentang Cara Menyimpan PIN Kartu BPNT

Cara Menyimpan PIN	N	%
Catat di Ponsel/HP	50	15,6
Catat di kertas/buku	211	65,7
Memberitahu individu di luar keluarga	9	2,8
Dicatat di kartu KPS	2	0,6
Kertas berisi PIN disimpan	13	4,0
Ditulis di tembok	4	1,2
Dihapalkan dan tidak pernah mengganti PIN	18	5,6
Memberitahu anggota keluarga	5	1,6
Kertas berisi PIN ditiptkan pada ketua PKH	3	0,9
Mengganti PIN dengan tanggal lahir anak	2	0,6
Lainnya	4	1,2
Total	321	100,0

Sumber: PSKK UGM, 2017

N : jumlah jawaban bukan jumlah KPM (*multiple response*)

Penyaluran BPNT

Proses berikutnya setelah KPM melakukan registrasi/aktivasi adalah pencairan bantuan. Namun sebelum pencairan bantuan dilakukan, KPM harus mengetahui lokasi di mana pencairan tersebut dilakukan yaitu E-Warong. Hasil survei memperlihatkan sebagian besar KPM

mengetahui keberadaan atau lokasi E-Warong (83,2%). Keberadaan atau lokasi E-Warong yang diketahui responden sebagian besar bersumber dari pendamping PKH (63,8%), ketua kelompok PKH (9,4%), dan tetangga/masyarakat (9,1%).

Hampir sebagian besar KPM telah mencairkan BPNT. Diketahui semua keluarga PKH di setiap kota telah mencairkan bantuan. Namun, keluarga Non-PKH di sebagian kota belum mencairkan yaitu Kota Medan, Bandar Lampung, dan Mataram. Keluarga Non-PKH yang sudah mencairkan BPNT paling banyak adalah Kota Makassar yang mencapai 67,6 persen. Berikutnya adalah Kota Jakarta Utara (29,6%), Malang (18,8%), dan Tegal (15,7%).

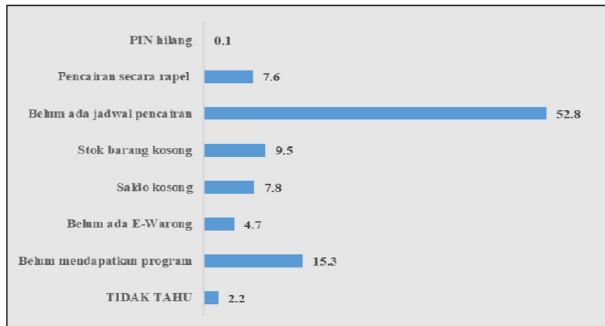
Tabel 6
Keluarga yang Sudah Mencairkan BPNT

Kota	PKH		Non-PKH		Total	
	N	%	N	%	N	%
Medan	70	100,0	0	0	70	100,0
Bandar Lampung	70	100,0	0	0,0	70	100,0
Jakarta Utara	50	70,4	21	29,6	71	100,0
Tasikmalaya	60	84,5	11	15,5	71	100,0
Surakarta	92	90,2	10	9,8	102	100,0
Tegal	59	84,3	11	15,7	70	100,0
Malang	56	81,2	13	18,8	69	100,0
Probolinggo	63	91,3	6	8,7	69	100,0
Mataram	74	100,0	0	0,0	74	100,0
Makassar	11	32,4	23	67,6	34	100,0
Total	605	86,4	95	13,6	700	100,0

Sumber: PSKK UGM, 2017

KPM yang belum melakukan pencairan BPNT ternyata memiliki beberapa alasan. Sebagian besar dikarenakan belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan, yaitu sebanyak 52,8 persen. Alasan lainnya adalah belum mendapatkan program sebesar 15,5 persen. Belum mendapatkan program yang dimaksud adalah belum mendapatkan kartu BPNT, sehingga belum dapat mencairkan bantuan karena dalam pencairan harus membawa kartu BPNT tersebut. Selanjutnya keluarga yang belum mencairkan karena stok

barang di E-Warong yang ditunjuk masih kosong mencapai 9,6 persen. Hal ini menarik, karena sebelum jadwal pencairan dikeluarkan seharusnya E-Warong yang ditunjuk sebagai penyalur sudah mempersiapkan komoditi.



Gambar 6
Alasan Keluarga Belum Mencairkan BPNT
Sumber: PSKK UGM, 2017

Komoditi dalam pencairan BPNT sebagian besar berupa beras dan gula. Dalam pencairan beras antara bulan Februari-April, diketahui rata-rata pencairan di bulan Februari sebanyak 18 Kg untuk keluarga PKH dan 20 Kg untuk keluarga Non-PKH. Sementara di bulan Maret rata-rata beras yang diterima turun dibanding bulan Februari yaitu rata-rata 17 Kg untuk keluarga KPM dan keluarga Non-PKH rata-rata 19 Kg. Pencairan di bulan April secara rata-rata juga berkurang dibanding bulan Februari dan Maret yaitu 17 Kg untuk keluarga PKH dan 16 Kg untuk keluarga Non-PKH. Distribusi pencairan beras menurut kota diketahui rata-rata beras paling banyak adalah 20 Kg yaitu di Kota Medan, Probolinggo, dan Makassar. Sementara di Kota Bandar Lampung baru mencairkan di bulan April dengan rata-rata 20 Kg.

Tabel 7
Berat Rata-rata Beras yang Dicairkan Selama Bulan Februari-April 2017

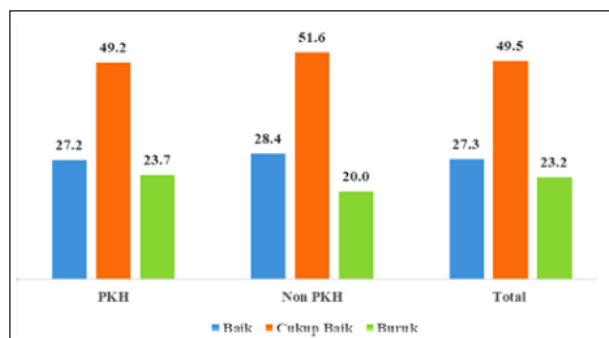
Kota	Berat Rata-rata Beras (dlm Kg)					
	Februari		Maret		April	
	PKH	Non-PKH	PKH	Non-PKH	PKH	Non-PKH
Medan	20	0	20	0	20	0
Bandar Lampung	0	0	0	0	20	0
Jakarta Utara	19,5	20	20	20	18,5	20
Tasikmalaya	10	0	10	10	10	10
Surakarta	10	0	10	10	10	14
Tegal	0	20	20	20	20	0
Malang	19,5	20	20	20	20	20
Probolinggo	20	20	20	0	20	20
Mataram	19	0	17	0	18	0
Makassar	20	0	20	20	20	20
Total Rata-rata	18	20	17	19	17	16

Sumber: PSKK UGM, 2017

Terkait pencairan beras dalam program BPNT, penilaian KPM merupakan isu yang penting. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan BPNT selanjutnya. Diketahui sebagian besar KPM menilai kualitas beras dalam program BPNT adalah cukup baik yaitu sebesar 49,5 persen. Selanjutnya KPM yang menilai beras BPNT kualitasnya baik mencapai 27,3 persen. Sementara KPM yang menilai kualitas beras BPNT buruk sebesar

23,2 persen. Hal ini cukup menarik karena berdasarkan berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menilai kualitas beras dalam program sebelumnya yaitu Raskin dan Rastra sebagian besar KPM menilai kualitasnya buruk. Seperti hasil penelitian dari Sumarno (2015), menunjukkan bahwa kualitas beras dalam program Raskin termasuk rendah karena baunya apek, banyak kutu, dan rasanya tidak enak ketika dimasak.

Sementara penilaian kualitas beras program BPNT menurut tipe KPM diketahui keluarga PKH paling banyak menilai kualitasnya cukup baik sebanyak 49,2 persen. Demikian juga dengan keluarga Non-PKH, dimana kualitas beras BPNT paling banyak dinilai cukup baik dan sedikit lebih tinggi dibanding keluarga PKH yaitu mencapai 51,6 persen.



Gambar 7
Kualitas Beras BPNT Menurut KPM
Sumber: PSKK UGM, 2017

Komoditas kedua dalam penyaluran BPNT adalah gula. Proses penyaluran gula dilakukan secara bersamaan dengan beras (Tabel 8). Dalam pencairan gula antara bulan Februari-April, diketahui rata-rata pencairan di bulan Februari sebanyak 3,5 Kg untuk keluarga PKH dan 4 Kg

untuk keluarga Non-PKH. Sementara di bulan Maret rata-rata gula yang diterima yaitu 3 Kg untuk keluarga KPM dan keluarga Non-PKH sebanyak 4 Kg. Pencairan gula di bulan April mencapai rata-rata 3,5 Kg untuk keluarga PKH dan 3 Kg untuk keluarga Non-PKH.

Distribusi pencairan gula menurut kota diketahui rata-rata gula paling besar adalah 4 Kg yaitu di Kota Medan, Jakarta Utara, Probolinggo, dan Makassar. Sementara di Kota Bandar Lampung baru mencairkan di bulan April dengan rata-rata 4 Kg.

Pencairan komoditi dalam program BPNT yang diterima oleh KPM sebagian besar diharuskan membeli barang berupa paket. Komoditi yang dimaksudkan dibeli secara paket adalah beras dan gula. Sebanyak 95,3 persen KPM memperoleh instruksi yaitu jenis dan jumlah komoditi yang sudah ditentukan dalam mencairkan bantuan secara paket. Hanya ditemukan 4,7 persen KPM yang tidak diharuskan mencairkan dalam hal jenis dan jumlah komoditi yang dibatasi. Tidak ada perbedaan antara keluarga PKH dan Non-PKH terkait instruksi dalam pencairan BPNT, yang paling banyak mendapatkan instruksi masing-masing sebesar 95,3 persen dan 95,2 persen.

Tabel 8
Berat Rata-rata Gula yang Dicairkan Selama Bulan Februari-April 2017

Kota	Berat Rata-rata Gula (dlm Kg)					
	Februari		Maret		April	
	PKH	Non-PKH	PKH	Non-PKH	PKH	Non-PKH
Medan	4	0	4	0	4	0
Bandar Lampung	0	0	0	0	4	0
Jakarta Utara	4	4	4	4	4	4
Tasikmalaya	2	0	2	2	2	2
Surakarta	2	0	2	2	2	2
Tegal	0	2	4	4	4	0
Malang	4	4	4	4	4	4
Probolinggo	4	4	4	0	4	4
Mataram	4	0	3	0	3,5	0
Makassar	4	0	4	4	4	4
Total Rata-rata	3,5	4	3	4	3,5	3

Sumber: PSKK UGM, 2017

Tabel 9
Instruksi Pencairan Komoditi dengan
Jumlah yang Sudah Ditentukan

Jenis Keluarga	Ada Instruksi		Tidak Ada Instruksi		Total	
	N	%	N	%	N	%
Keluarga PKH	549	95,3	27	4,7	576	100,0
Keluarga Non-PKH	118	95,2	6	4,8	124	100,0
Total	667	95,3	33	4,7	700	100,0

Sumber: PSKK UGM, 2017

Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang ada tidaknya instruksi terkait jenis dan jumlah komoditi dalam pencairan BPNT, sebagian besar KPM menyatakan adanya instruksi. Menurut KPM, pihak yang memberikan instruksi tersebut adalah E-Warong yang mencapai 51,8 persen. Berikutnya adalah aparat kelurahan juga berperan karena persentasenya mencapai 16,5 persen. Pendamping PKH juga dinilai sebagai pihak yang berperan dalam memberikan instruksi, yaitu mencapai 14,3 persen. Hal ini jika dikaitkan dengan KPM yang telah mendapatkan BPNT sebagian besar adalah penerima PKH, sehingga wajar jika pendamping PKH menjadi pihak yang turut berperan. Bahkan dalam proses pencairan

BPNT pendamping PKH selalu mendampingi keluarga PKH saat pencairan. Masih banyak KPM yang mengalami kebingungan dalam proses pencairan karena harus menggunakan kartu BPNT yang harus digesek pada mesin EDC (*electronic data capture*) yang sudah ada di setiap E-Warong.

Pihak yang dinilai oleh KPM memberikan instruksi tentang jenis dan jumlah komoditi BPNT, tidak menunjukkan perbedaan antara keluarga PKH dan Non-PKH. Paling banyak adalah E-Warong masing-masing sebesar 50 persen dan 60,2 persen. Sementara pihak kedua yang memberikan instruksi terdapat perbedaan, untuk keluarga PKH adalah pendamping PKH (16,8%) dan keluarga Non-PKH adalah aparat kelurahan sebesar 15,6 persen.

Ditemukan berbagai masalah teknis pada saat pencairan BPNT dilakukan. Masalah terbesar yang dihadapi menurut KPM adalah tidak mendapatkan bukti transaksi berupa nota, yakni mencapai 72,9 persen. Masalah berikutnya adalah terjadinya gangguan teknis pada saat pencairan, yaitu sebanyak 10,7 persen. Gangguan yang dimaksudkan adalah tidak berfungsinya mesin EDC karena masalah sinyal.

Tabel 10
Pihak yang Memberikan Instruksi

Pihak yang Memberikan Instruksi	PKH		Non-PKH		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aparat Kelurahan	100	16,7	20	15,6	120	16,5
Aparat Kecamatan	30	5,0	15	11,7	45	6,2
Ketua RT/RW	4	0,7	10	7,8	14	1,9
E-Warong	300	50,0	77	60,2	377	51,8
Pendamping PKH	101	16,8	3	2,3	104	14,3
Ketua kelompok PKH	10	1,7	0	0,0	10	1,4
Pihak Bank	16	2,7	1	0,8	17	2,3
Pemerintah Daerah	3	0,5	0	0,0	3	0,4
Lainnya	9	1,5	0	0,0	9	1,2
TIDAK TAHU	27	4,4	2	1,6	29	4,0
Total	600	100,0	128	100,0	728	100,0

Sumber: PSKK UGM, 2017

N : jumlah jawaban bukan jumlah KPM (*multiple response*)

Tabel 11
Masalah Teknis dalam Pencairan BPNT

Jenis Gangguan	N	%
Gangguan ketika pencairan	19	10,7
E-Warong tutup saat dikunjungi	4	2,3
Pegawai E-Warong kesulitan menggunakan kartu BPNT atau mengoperasikan mesin pembaca kartu BPNT	9	5,1
Tidak mendapatkan bukti transaksi (bon/nota)	129	72,9
E-Warong pernah menolak melakukan transaksi pembelian beras/gula dengan e-voucher pangan	5	2,8
Pada saat berbelanja salah memasukkan PIN	8	4,5
Kartu terblokir karena salah memasukkan PIN	3	1,7
Total	177	100,0

Sumber: PSKK UGM, 2017

N : jumlah jawaban bukan jumlah KPM (*multiple response*)

Masalah teknis yang juga dialami pemilik/karyawan E-Warong adalah kesulitan menggunakan kartu BPNT atau mengoperasikan mesin pembaca kartu BPNT (mesin EDC) yaitu mencapai 5,1 persen. Hal ini dapat terjadi karena pemilik/karyawan E-Warong belum terbiasa mengoperasikan mesin EDC. Masalah yang juga ditemukan dalam pencairan adalah KPM lupa dengan nomor PIN pada kartu BPNT yang mencapai 4,5 persen.

Selain masalah teknis, dalam proses pencairan BPNT juga ditemukan permasalahan berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas barang yang ada di E-Warong. Dari total 700 KPM yang telah diwawancarai, menyatakan

adanya masalah dalam hal ketersediaan dan kualitas barang diketahui sebanyak 57,4 persen atau 402 KPM. Dari aspek ketersediaan dan kualitas barang yang paling banyak dikeluhkan adalah kualitas beras kurang baik dibanding toko/warung lain mencapai 50,3 persen (200 KPM). Selanjutnya adalah harga beras dengan kualitas yang setara lebih mahal dibanding toko/warung lain sebanyak 23,1 persen atau 92 KPM. Masalah ketersediaan dan kualitas barang lain adalah kualitas gula kurang baik dibanding toko/warung lainnya sebesar 13,6 persen atau 54 KPM. Ditemukan juga kasus tidak tersedianya beras dan gula di E-Warong pada saat pencairan masing-masing sebanyak 2 persen (8 KPM) dan 1,7 persen (7 KPM).

Tabel 12
Masalah Ketersediaan dan Kualitas Komoditi dalam Pencairan BPNT

Jenis Masalah	N	%
Tidak tersedia beras di E-Warong	8	2,0
Tidak tersedia gula di E-Warong	7	1,8
Harga beras dengan kualitas yang setara lebih mahal dibanding toko/warung lainnya	92	23,1
Harga gula dengan kualitas yang setara lebih mahal dibanding toko/warung lainnya	37	9,3
Kualitas beras kurang baik dibanding toko/warung lainnya	200	50,3
Kualitas gula kurang baik dibanding toko/warung lainnya	54	13,6
Total	398	100,0

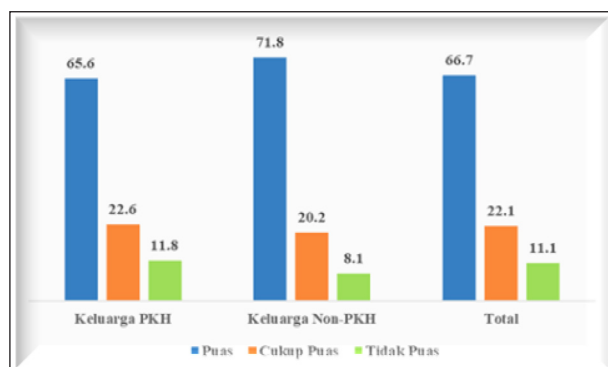
Sumber: PSKK UGM, 2017

N : jumlah jawaban bukan jumlah KPM (*multiple response*)

Tingkat Kepuasan terhadap Program BPNT

Penilaian terhadap program pemerintah yang dilakukan oleh para penerima manfaat dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program. Oleh sebab itu, proses evaluasi kinerja pemerintah juga sangat bergantung pada umpan balik dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelaksana program sangat memerlukan informasi yang akurat dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Sementara penerima manfaat sangat mengharapkan program yang diterima dapat memuaskan diri dan menyeimbangkan dengan harapannya. Jika hal ini tidak dicapai oleh organisasi sektor publik, masyarakat akan merasa bahwa kepuasannya diabaikan dan hal ini akan menyebabkan munculnya banyak keluhan (Zamil & Shammot, 2011).

Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan adalah pendapat dari penerima program itu sendiri. Tingkat kepuasan KPM dalam implementasi BPNT, sebagian besar merasa puas yaitu mencapai 66,7 persen. Berikutnya KPM menyatakan cukup puas sebanyak 22,1 persen dan hanya 11,1 persen yang tidak puas dengan program BPNT. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian dari Zuhri & Sofianto (2020), bahwa penerima program pengentasan kemiskinan termasuk BPNT sebagian besar merasakan manfaat berupa terbantunya beban kebutuhan hidup mereka.



Gambar 8

Tingkat Kepuasan Program BPNT

Sumber: PSKK UGM, 2017

Tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT jika dibedakan menurut tipe keluarga diketahui keluarga PKH paling banyak merasa puas dengan program BPNT mencapai 65,6 persen (378 dari 577 KPM). Sedangkan keluarga Non-PKH yang merasa puas dengan program BPNT lebih tinggi dibanding keluarga PKH yaitu mencapai 71,8 persen (89 dari 124 KPM). Penilaian berikutnya adalah cukup puas terhadap program BPNT sebanyak 22,5 persen pada keluarga PKH (130 dari 577 KPM) dan 20,2 persen untuk keluarga Non-PKH (25 dari 124 KPM). Apabila tingkat kepuasan terhadap program BPNT yaitu cukup puas dan puas digabungkan, maka nilainya akan mencapai 88 persen (keluarga PKH) dan 92 persen (keluarga Non-PKH). Meskipun angkanya kecil yaitu 11,8 persen (keluarga PKH) dan 8,1 persen (keluarga Non-PKH), namun adanya ketidakpuasan KPM terhadap program BPNT perlu menjadi perhatian serius.

Tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT juga dapat dibedakan menurut wilayah. Kota dengan tingkat kepuasan paling tinggi adalah Probolinggo yaitu mencapai 88,6 persen. Berikutnya adalah Kota Mataram dengan tingkat kepuasan sebesar 87,1 persen, Kota Malang 78,6 persen, dan Kota Surakarta sebesar 75,7 persen. Sementara wilayah dengan tingkat kepuasan paling rendah adalah KPM di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 48,6 persen. Selanjutnya adalah Kota Medan sebesar 27,1 persen, Kota Jakarta Utara 12,7 persen, dan Kota Tasikmalaya mencapai 8,6 persen. Perbedaan tingkat kepuasan antar wilayah ini memberikan gambaran tentang implementasi program BPNT di setiap daerah memiliki standar yang berbeda.

Tabel 13
Tingkat Kepuasan terhadap Program BPNT
Menurut Kota

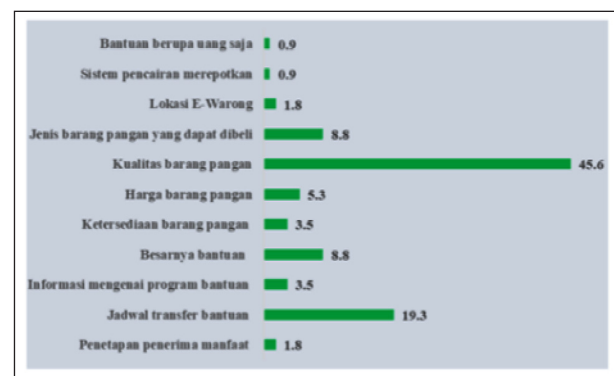
Kota	Tingkat Kepuasan BPNT			N
	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	
Medan	57,1	15,7	27,1	70
Bandar Lampung	32,9	18,6	48,6	70
Jakarta Utara	70,4	16,9	12,7	70
Tasikmalaya	41,4	50,0	8,6	70
Surakarta	75,7	18,6	5,7	70
Tegal	65,7	30,0	4,3	70
Malang	78,6	21,4	0,0	70
Probolinggo	88,6	11,4	0,0	70
Mataram	87,1	10,0	2,9	70
Makassar	69,6	29,0	1,4	69
Total N	467	155	78	700

Sumber : PSKK UGM, 2017

Dari sejumlah KPM yang memberikan penilaian tidak puas terhadap program BPNT, selanjutnya digali lebih jauh untuk mengetahui alasan atas ketidakpuasan tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, jumlah responden yang merasa tidak puas dengan BPNT sebesar 11,1 persen atau 78 KPM. Diketahui alasan paling banyak yang menjadi penyebab ketidakpuasan KPM terhadap BPNT adalah kualitas bahan pangan yang dinilai kurang sesuai dengan harganya, yakni sebanyak 45,6 persen. Alasan lain yang juga disampaikan adalah jadwal transfer bantuan yang belum banyak diketahui oleh KPM yaitu sebanyak 19,3 persen. Selanjutnya adalah alasan jenis barang yang dapat dibeli terbatas (sudah ditentukan) dan besar bantuan yaitu Rp110.000,-/bulan dinilai masih kurang masing-masing sebesar 8,8 persen.

KPM yang merasa tidak puas dengan program BPNT, tidak semua menyampaikan ketidakpuasannya tersebut. Dari 78 KPM yang tidak puas, hanya 53,8 persen atau 42 KPM yang menyampaikan keluhan. Sedangkan sisanya sebanyak 46,2 persen atau 36 KPM tidak melakukan tindakan apapun. KPM yang menyampaikan ketidakpuasan atau keluhan

terhadap program BPNT semua adalah keluarga PKH. Pengaduan yang disampaikan oleh KPM hanya diterima oleh TKSK/pendamping PKH sebanyak 97,6 persen (41 KPM) dan hanya 2,4 persen (1 KPM) yang menyampaikan melalui media massa.



Gambar 9
Alasan Tidak Puas dengan Program BPNT
Sumber : PSKK UGM, 2017

KPM yang telah menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan BPNT melalui TKSK/Pendamping PKH dan media massa tentu saja berharap masalah tersebut bisa terselesaikan. Hasil survei menunjukkan pengaduan masalah oleh KPM dan dinilai masalahnya telah terselesaikan hanya sebanyak 47,6 persen (20 KPM). Sisanya 45,2 persen (19 KPM) menyatakan bahwa masalah pelaksanaan BPNT yang telah diadukan kepada TKSK/pendamping PKH atau melalui media massa tidak dapat terselesaikan. Sementara terdapat 7,1 persen (3 KPM) yang tidak tahu apakah keluhan yang diadukan telah mendapatkan penyelesaian.

KPM yang telah menyampaikan ketidakpuasan atau keluhan program BPNT dan telah mendapatkan penyelesaian dapat dinilai tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan terhadap penyelesaian masalah sama banyak antara yang menyatakan puas dan cukup puas. Sebanyak 10 KPM merasa puas dan 10 KPM merasa cukup puas atas penyelesaian keluhan yang disampaikan.

Penutup

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan sebuah upaya terobosan dan dimaksudkan sebagai transformasi subsidi Rastra yang telah berjalan selama ini. Program ini diluncurkan agar seluruh bantuan sosial diberikan secara nontunai melalui sistem perbankan sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol penyalurannya. Skema bantuan tersebut mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu, diubah dengan mendapatkan dana bantuan setiap bulan untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan nontunai yang telah disediakan (E-Warong).

Kesimpulan

Tahap implementasi awal program BPNT secara umum masyarakat mengetahui bahwa program ini merupakan pengganti program Rastra/Raskin. Namun, secara lebih detail masih banyak yang belum mengetahui bahwa saldo dapat ditukarkan kapan saja di waktu yang telah ditentukan. Selain itu, dengan hangus tidaknya saldo apabila belum ditukarkan, sebagian besar KPM belum memahami jika saldo dapat disisakan dan tidak hangus. Sebagian besar meyakini bahwa saldo akan hangus jika masih ada sisa. Hampir sebagian besar KPM telah mencairkan BPNT. Diketahui semua keluarga PKH di setiap kota telah mencairkan bantuan. KPM yang belum melakukan pencairan BPNT sebagian besar karena belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan dan belum mendapatkan kartu BPNT.

Permasalahan saat melakukan pencairan bantuan dari sisi teknis adalah tidak adanya bukti transaksi (bon/nota) ketika melakukan transaksi di E-Warong. Sedangkan masalah ketersediaan dan kualitas barang yang paling banyak dikeluhkan adalah kualitas beras yang kurang baik dibanding toko/warung lainnya.

Tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT sangat tinggi karena hampir 90 persen

menyatakan cukup puas dan puas. KPM yang tidak merasa puas terhadap program BPNT disebabkan oleh kualitas bahan pangan yang dinilai kurang sesuai dengan harganya. Sebagian KPM yang merasa tidak puas menyampaikan keluhannya tersebut kepada TKSK/Pendamping PKH dan media massa. Penyelesaian keluhan terhadap masalah yang dihadapi tersebut setengahnya mengaku telah terselesaikan masalahnya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat disampaikan antara lain 1) Perlunya sosialisasi program BPNT secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap tentang program; 2) Meningkatkan kualitas dan memperbanyak variasi jenis bahan makanan yang diterima masyarakat; 3) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan E-Warong dalam proses distribusi bantuan dengan cara pemberian pelatihan atau bimbingan teknis; 4) Perlunya pembentukan lembaga yang khusus menangani keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program BPNT; dan 5) Melakukan monitoring dan evaluasi program BPNT secara periodik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada yang telah berkenan memberikan izin pemanfaatan data hasil penelitian ini, utamanya kepada para peneliti yang terlibat dalam penelitian tentang evaluasi Program BPNT di Indonesia.

Pustaka Acuan

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ariani, M. (2010). *Pertanian Sumber Kehidupan-Ariani* (p. 1). Koran Berkah. <http://banten.litbang>.

- pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=218 &Itemid=12
- Bappenas. (2017). *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019*. 1–198. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/evaluasi-paruh-waktu-rpjm-2015-2019/>
- Bappenas, PMK, K., Kemensos, Kemendagri, Presiden, K. S., & TNP2K. (2017). *Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Cunha JM, De Giorgi G, J. S. 2011. (2018). The Price Effects of Cash Versus in- Kind Transfers. NBER Working Paper Series. *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, 29–50.
- Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI. (2017). *FGD Ansipasi Penerapan Kebijakan Rastra menjadi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Ditjen Penanganan Fakir Miskin*. <http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2017/05/Bahan-FGD-PERHEPI-Dirjen-Penanganan-Fakir-Miskin-Kemensos-RI.pdf>
- JM. Currie and Gahvari F. (2008). Transfers in Cash and In Kind: Theory Meets the Data. *Journal of Economic Literature*. 46(2):333–383., October.
- Keban, Y. T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agend Kenegaraan yang Terabaikan* (p. 43).
- Margaret Grosh, Carlo del Ninno, E. T., & Ouerghi, and A. (2008). *For Protection and Promotion: The Design and Implementation of Effective Safety Nets*.
- Permensos No.11 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, (2018).
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- PP No.11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (2019).
- Robert A. Heineman, William T. Bluhm, Steven A. Peterson, and E. N. K. (2001). The World of the Policy Analyst: Rationality, Values, and Politics (Third Edition). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Siltrakool, B. (2017). *Assessment of Community Pharmacists, Knowledge, Attitude and Practice Regarding Non-Prescription Antimicrobial Use and Resistance in Thailand BUDH SILTRAKOOL Submitted to the University of Hertfordshire in partial fulfilment of the requirements for the* (Issue October).
- Sumarno, S. (2015). Fungsi Sosial Raskin terhadap Keluarga Miskin. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(3), 279–292.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>
- Thomas A. Birkland. (2011). An Introduction to the Policy Process (Third Edition). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Tohidinia, Z., & Mosakhani, M. (2010). Knowledge sharing behaviour and its predictors. *Industrial Management and Data Systems*, 110(4), 611–631. <https://doi.org/10.1108/02635571011039052>
- Zamil, A. M. and, & Shammot, M. M. (2011). Role Of Measuring Customer Satisfaction In Improving The Performance In The Public Sector Organization. *Journal of Business Studies Quarterly*, 2(3), 32–41.
- Zhou, Y., Thøgersen, J., Ruan, Y., & Huang, G. (2013). The moderating role of human values in planned behavior: The case of Chinese consumers' intention to buy organic food. *Journal of Consumer Marketing*, 30(4), 335–344. <https://doi.org/10.1108/JCM-02-2013-0482>
- Zuhri, M., & Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 19 No.3 Desember 2020*, 277–294.

Fenomena Relawan GACA dalam Pendampingan Anak di Lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah

The Phenomenon of Gaca Volunteer in Assisting The Children at PWA Environment of Central Java Province

Istiqomah Risa Wahyuningsih¹, Suparmi², Sri Kustiyati³

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Surakarta
Jalan Kapulogo, No.3, Griyan, Pajang, Laweyan, Surakarta, 57146, Indonesia
Email: istiqomah86@aiska-university.ac.id, HP: 085725391552
Diterima 05 Mei 2021, direvisi 06 Mei 2021, disetujui 26 Juni 2021

Abstract

Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA) is a community-based program designed by the Central Bureau of Aisyiyah as a respond to increasing cases of violence against children in Indonesia. This movement encourages community especially member of Aisyiyah to participate actively in child protection efforts, to promote children's rights and to prevent violence against children. GACA has developed in various regions, including in Central Java Province. Number of GACA Volunteer has increased and becomes potential human resource in child protection. The purpose of the study was to describe the movement of GACA volunteers in addressing child issues in Banjarnegara Regency. This research used a qualitative method. It was conducted in April-November 2019 in Banjarnegara Regency. A purposive sampling was used to select the informant. Ten GACA volunteers were selected as main informant. Data and information were collected by using in-depth interviews, observations and document studies. Most of the informants are activist in the Organization of Aisyiyah Muhammadiyah. The study shows an overview about GACA volunteers. It describes their motivation to become volunteers, existing obstacles, prosocial behaviour of GACA volunteers, GACA mentoring processes and the client's family response to GACA volunteer. This study recommends the Government and the Central Bureau of Aisyiyah through GACA to develop a collaboration in child protection efforts, prevention and reduction of violence against children.

Keywords: *Child Violence, Child Assistance, GACA Volunteers.*

Abstrak

GACA merupakan sebuah gerakan masif dalam upaya membentuk generasi penerus yang kokoh, unggul dan berkemajuan dalam hal mengantisipasi terjadinya kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gerakan Aisyiyah ini selaras dengan program Pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat yang bersedia melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan pada anak di bawah Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Propinsi Jawa Tengah disebut relawan GACA. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan April-Nopember 2019 di PWA Jawa Tengah khususnya PDA Kabupaten Banjarnegara. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada 10 orang informan, rata-rata berumur 61 tahun. Informan ini sebelum masuk sebagai relawan GACA sudah aktif dalam organisasi Aisyiyah Muhammadiyah, dimulai dari IPM, NA, PCA/PCM dan PDA/PDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena relawan GACA digambarkan dalam beberapa aspek antara lain motivasi menjadi relawan, hambatan atau kendala, perilaku prososial relawan, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan, proses pendampingan GACA dan respon keluarga klien terhadap GACA dari sisi relawan. Rekomendasi penelitian ini adalah upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak, Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam optimalisasi GACA.

Kata kunci: *Kekerasan pada anak, Pendampingan Anak, Relawan GACA.*

Pendahuluan

Data kekerasan terhadap anak yang terbaru sejak Januari-Juni 2020 terdapat 3.928 kasus. Data tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama kurun waktu tahun 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 306 kasus dibanding tahun 2017. Berbagai pihak penting berperan aktif melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain keluarga, lingkungan terdekat, masyarakat, institusi penegakan hukum, pemerintah, hingga media masa. Empat hak dasar anak yang harus dipenuhi adalah hak untuk hidup, berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi serta hak partisipasi (Chandra, 2019; Kandedes, 2020; Medistiara, 2020).

Kasus kekerasan terhadap anak pada 1 Januari-19 Juli 2020 diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, dan angka ini tergolong tinggi. Kasus seksual terhadap anak semakin meningkat baik intensitas maupun ragam bentuk kejahatannya. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Propinsi Jawa Tengah menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak sejumlah 2.044 kasus dan 88 kasus berada di Kota Surakarta (Intan, 2018; Anonim, 2020).

Data tersebut mendasari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah di Yogyakarta, Siti Noordjannah Djohantini menyoroti pentingnya perhatian serius dari berbagai pihak dalam menyikapi permasalahan tentang kekerasan terhadap anak. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya problem kekerasan terhadap anak, pengabaian anak, pengaruh buruk teknologi informasi, lingkungan yang tidak mendukung, dan lain-lain. Adapun langkah yang ditempuh oleh Aisyiyah dalam mengurangi dan mencegah permasalahan tersebut yakni melalui program Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA). Dukungan

masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual yang ada (Klikmu, 2018; Marwati, Ruliyandri and Solikhah, 2019).

GACA merupakan sebuah gerakan masif dalam upaya membentuk generasi penerus yang kokoh, unggul dan berkemajuan dalam hal mengantisipasi terjadinya kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Melalui gerakan ini, Aisyiyah diharapkan dapat merespons persoalan anak secara cepat, melakukan pendampingan terhadap anak, dan sebagainya (Ribas, 2016; Klikmu, 2018).

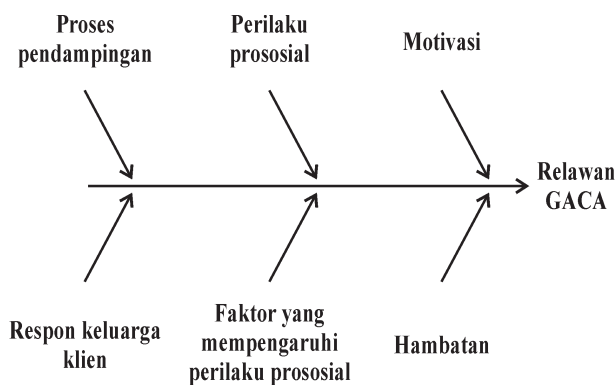
Gerakan Aisyiyah ini selaras dengan program Pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak anak sesuai yang digariskan oleh Undang-Undang seperti pendidikan dasar yang dianggarkan oleh APBN. Peran berbagai komponen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan program tersebut (Prayitno, 2016).

Masyarakat yang bersedia melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan pada anak di bawah Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Propinsi Jawa Tengah biasa disebut dengan relawan GACA. Para relawan GACA tersebut merupakan bagian dari PWA Propinsi Jawa Tengah MHH (Majelis Hukum dan HAM) dan MKS (Majelis Kesejahteraan Sosial). Dari data studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara dan melihat data melalui jurnal (Kasiyati, 2016) didapatkan data bahwa hampir 50% dari kasus anak yang masuk di PWA Propinsi Jawa Tengah merupakan anak korban penelantaran. Uraian tersebut melatar belakangi penulis untuk meneliti tentang fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak bermasalah di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini membahas tentang fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak

di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah tersebut mempunyai beberapa pertanyaan penelitian, antara lain: 1) apakah yang memotivasi relawan GACA dalam melakukan pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah?; 2) apakah hambatan atau kendala yang dihadapi relawan GACA dalam melakukan pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah?; 3) bagaimanakah perilaku prososial relawan GACA dalam melakukan pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah?; 4) faktor apakah yang mempengaruhi perilaku prososial relawan GACA dalam melakukan pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah?; 5) bagaimanakah proses pendampingan dan respon keluarga klien terhadap GACA dari sisi relawan?

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah.



Gambar 1

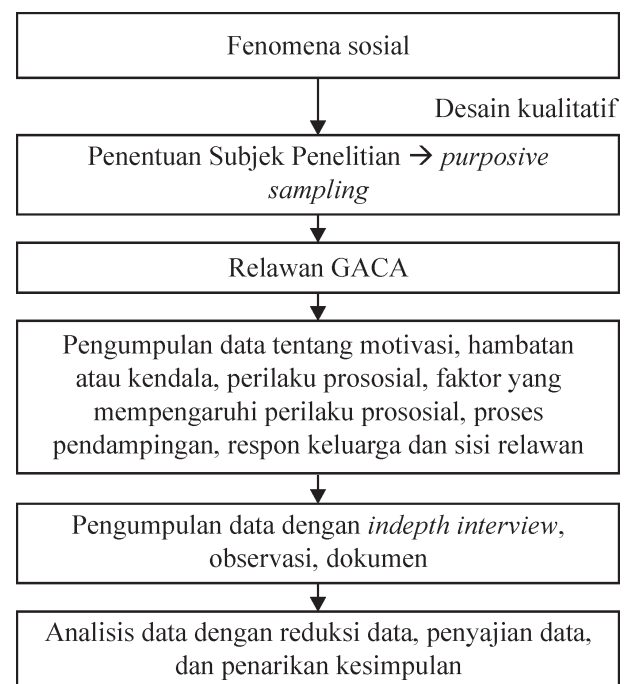
Diagram *Fishbone* fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah yang hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi untuk mengamati secara mendalam suatu fenomena sosial dan

masalah manusia. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Desain kualitatif pada penelitian ini menggambarkan tentang fenomena relawan GACA dalam pendampingan anak bermasalah di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah dengan pokok pembahasan meliputi motivasi relawan, hambatan dan kendala yang dihadapi, perilaku prososial, dan faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan GACA.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih subjek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sesuai dengan tujuan penelitian maka subjek penelitian dikhususkan pada relawan GACA yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Relawan GACA yang sudah berpengalaman dalam pendampingan anak di lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah; 2) Relawan GACA yang aktif mengikuti kegiatan di PWA Propinsi Jawa Tengah; 3) Relawan GACA yang bersedia menjadi responden dan memberikan data sesuai dengan pengalamannya.



Gambar 2

Alur penelitian fenomena GACA

Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Nopember 2019. Tempat penelitian adalah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Propinsi Jawa Tengah khususnya Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banjarnegara.

Instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri atau disebut dengan *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data serta membuat kesimpulan. Pada saat melakukan penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian dengan menggunakan bantuan lembar pertanyaan peneliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain: 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan dengan semiterstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan peneliti; 2) Observasi dilakukan secara partisipasi pasif yang berarti peneliti datang ke tempat subjek penelitian dan mengamati subjek saat melakukan kegiatan namun peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dokumen dilakukan untuk mendukung dan memperkuat data wawancara maupun observasi. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio hasil wawancara dan foto yang tetap menjaga privasi subjek penelitian dan kliennya.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah: 1) Reduksi data, yaitu menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasi data sehingga dapat digunakan dalam membuat kesimpulan; 2) Penyajian data, yaitu mengumpulkan sejumlah informasi yang diperoleh pada saat pengumpulan data kemudian dibuat narasi dengan memperhatikan kata kunci dalam setiap fokus pembahasan sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; 3) Penarikan kesimpulan, yaitu

hasil analisis data yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan dari hasil penelitian yang didapatkan.

Hasil dan Pembahasan

Wawancara dilakukan kepada 10 orang informan dengan karakteristik informan adalah 3 informan berjenis kelamin laki-laki dan 7 informan berjenis kelamin perempuan. Karakteristik informan berdasarkan umur rata-rata berumur 65 tahun dengan usia termuda 50 tahun dan usia tertua 74 tahun. Karakteristik informan berdasarkan lama berkecimpung di Aisyiyah Muhammadiyah rata-rata sebelum masuk sebagai relawan GACA informan tersebut sudah aktif dalam organisasi Aisyiyah dan Muhammadiyah kurang lebih sudah 30 tahun, sedangkan untuk pengalaman sebagai relawan GACA bervariasi lamanya berkisar 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun dan 2 tahun.

Relawan berasal dari kata sukarelawan yang artinya orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan) (Munawaroh, 2015). Relawan adalah orang yang secara sukarela mau menyediakan waktunya untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan atau tim yang membantu dalam mencapai kesuksesan. Relawan itu bisa dikatakan unik. Tidak semua relawan terbilang mampu atau cukup dalam hal ekonomi namun mereka secara sukarela membantu kesuksesan suatu kegiatan (Haroen, 2014).

Wawancara yang dilakukan berfokus pada motivasi menjadi relawan, hambatan atau kendala, perilaku prososial relawan, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan, proses pendampingan GACA dan respon keluarga klien terhadap GACA dari sisi relawan.

Motivasi sebagai relawan GACA yang disampaikan informan antara lain wujud syukur kepada Allah, ingin membantu membangun organisasi Aisyiyah, berjuang mendidik anak-anak, menambah amal jariyah, memberi yang baik-baik, yang bermanfaat bagi orang lain

didasari iman dan taqwa, wujud perjuangan dan keikhlasan hati, rasa suka dengan anak-anak, niat untuk ibadah dan keikhlasan hati, pengabdian, membantu anak yang ada masalah dengan ikhlas, rasa empati karena kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan dan Lillahi ta'ala, tidak ada paksaan dari pihak manapun, menjalankan amanah, berjuang untuk agama.

Pengembangan potensi dan kemampuan dalam proses pendampingan dilakukan hanya agar dapat memberikan pendampingan yang terbaik bukan untuk meningkatkan status sosial atau menambah penghasilan. Ada juga informan yang mengatakan bahwa awalnya hanya kebetulan mengikuti kegiatan pelatihan / pembekalan sebagai relawan GACA karena ada rasa belas kasihan kepada anak sehingga menambah motivasi informan sebagai relawan GACA. Informan lain juga mengatakan bahwa menjadi relawan adalah wujud tanggung jawab karena diamanahi sebagai ketua MKS PWA Propinsi Jawa Tengah, menerapkan undang-undang perlindungan anak, sekaligus adanya keprihatinan terhadap masalah-masalah yang dialami oleh anak.

Setiap relawan pasti memiliki motivasi yang melatar belakangi kesediaan bergabung dan mengelola suatu kegiatan. Motivasi relawan bisa bermacam-macam dan setiap motivasi relawan satu tidak bisa dibandingkan dengan relawan lainnya. Motivasi relawan bisa sangat sederhana namun bisa juga sangat mulia, dari yang hanya sekedar ikut-ikutan sampai ke persoalan kesamaan ideologi, visi, karakter, kedekatan emosional yang berlatarbelakang sekolah, daerah atau organisasi sosial dan lain-lain. Motivasi tersebut bisa diperbarui seiring dengan meningkatnya tuntutan dalam suatu kegiatan (Haroen, 2014; Chomsun, 2015).

Motivasi berasal dari kata motif, motif merupakan pengertian yang melingkupi pergerakan. Alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Juga tingkah laku yang disebut tingkah

laku secara reflek dan yang berlangsung secara otomatis mempunyai maksud tertentu meskipun maksud itu tidak disadari oleh manusia. Motif manusia merupakan dorongan, hasrat, keinginan dan tenaga penggerak lainnya yang bersalah dari dalam diri untuk melakukan sesuatu (Munawaroh, 2015).

Motivasi adalah landasan dasar terpenting dan semangat yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab, motivasi diistilahkan dengan *al-himmah* yang berarti keinginan kuat. Orang dikatakan mempunyai motivasi kuat jika merasa dirinya masih belum sampai pada cita-cita mulia yang menjadi targetnya. Orang yang mempunyai motivasi tinggi selalu berusaha meraih hal yang maksimal dan optimal (Khalif, 2006). Motivasi adalah potensi fitrah yang terpendam, yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan kepada dirinya atau memuaskan kebutuhan primernya, atau menolak bahaya yang membawa kesakitan dan kesedihan. Motivasi didefinisikan oleh Dr. Muhammad Utsman Najaati sebagai kekuatan penggerak, yang membangkitkan vitalitas pada diri makhluk hidup, menampilkan perilaku, dan mengarahkannya ke satu atau beberapa tujuan tertentu (Az-Za'balawi, 2007).

Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong seseorang melakukan sesuatu baik berifat intinsik maupun ekstrinsik. Faktor motivasional yang sifatnya intrinsik yaitu yang bersumber dari diri seseorang. Untuk mengetahui motivasi dari dalam diri seseorang dapat dilihat dari tanggung jawab, pengakuan pekerjaan itu sendiri dan pengembangan potensi diri. Sumber lain mengatakan bahwa motivasi relawan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal dapat berupa keinginan untuk mengembangkan diri, sedangkan motivasi eksternal berasal dari orang lain. Motivasi relawan juga dipengaruhi oleh jenis organisasi dan faktor demografis (Putri and Rahardjo, 2012; Pangestu, 2016; Akhtar, Pertiwi and Mashuri, 2020).

Kasus yang pernah didampingi relawan adalah kasus anak sekolah yang kabur dengan motor dan menabrak orang, anak usia sekolah bepergian tengah malam ke dermaga dan terkena razia polisi, kasus anak korban perceraian, anak korban ayah kandungnya sendiri, kekerasan dalam keluarga dan kenakalan anak, anak korban *bullying*, salah pergaulan yang biasanya terjadi pada keluarga yang Islamnya tidak begitu kuat atau keluarga yang *broken home*. Ada juga kasus anak dari orang tua pengedar narkoba, anak tersebut malu karena tahu jika ayahnya sebagai pengedar narkoba dan di penjara, anak perempuan yang menjadi korban kekerasan ayahnya, anak yang senang mengambil uang orang lain, senang pergi membawa sepeda tidak pamit, dan anak-anak yang sering kesurupan, kasus perkosaan anak, seorang anak dihamili ayah tirinya sendiri, seorang remaja perempuan diperkosa pacar dan teman-teman pacarnya dan anak tersebut trauma dan tidak mau pulang ke rumah, anak dibawah umur yang diajak mengemis dan memulung sehingga mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, anak dibawah umur yang dicabuli tetangganya, kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya atau kakak iparnya, anak korban perkosaan, anak korban salah asuh.

Hambatan atau kendala yang dialami relawan berasal dari korban itu sendiri, keluarga korban, proses pendampingan dan dari relawan sendiri. Hambatan atau kendala dari sisi korban, antara lain: anak yang tidak mau terbuka dengan masalahnya, dinasehati tidak taat, anak kurang kooperatif dan kadang ada anak yang bohong, biasanya anak tidak mau sekolah, kadang korban susah untuk diajak komunikasi, anaknya memang sudah susah diatur, anak sekarang sudah banyak terpengaruh oleh handphone sehingga anak-anak tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dari handphone anak-anak bisa mengalami salah pergaulan, korban tidak langsung mau bercerita tentang masalahnya, biasanya diam dan malu, penolakan dari korban

atau anak yang bermasalah karena anak tersebut menutup diri dengan adanya pendamping GACA jika pendekatannya kurang tepat maka data yang akan diperoleh tidak akurat dan tidak mendalam. Masing-masing korban bervariasi waktunya untuk dapat bercerita dan terbuka dengan relawan GACA.

Hambatan atau kendala dari pihak keluarga antara lain: ada yang tidak berkenan jika relawan ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka padahal anak membutuhkan pendampingan, pihak keluarga menutup-nutupi masalah, keluarga tidak menerima proses pendampingan yang dilakukan oleh relawan, keluarga adalah keluarga ada yang tidak dapat diajak komunikasi, keluarga dengan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah, tidak adanya dukungan dari orang tua, keluarga kadang ada yang malu mengakui dan kurang terbuka dengan masalahnya, ada orang tua yang cukup mampu namun dirasa tidak mau membiayai anaknya sehingga anak tidak diurus atau langsung dititipkan di panti, keluarga sangat terbuka dan mendukung proses pendampingan, Tidak semua keluarga terbuka dengan proses pendampingan GACA, kadang ada yang merasa bahwa relawan GACA adalah orang lain yang tidak harus ikut campur dengan urusan rumah tangga atau urusan pribadi orang tua terhadap pendidikan anak.

Hambatan atau kendala dari proses pendampingan antara lain: kesibukan anak-anak di sekolah sehingga terkendala waktu pendampingan dan pembekalan skill. Hambatan atau kendala dari sisi relawan, antara lain: perasaan belum mampu memberikan bekal hidup untuk para korban dikarenakan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, kesesuaian waktu, terkadang kesannya menunda-nunda padahal korban membutuhkan bantuan segera, terkendala waktu untuk proses pendampingan namun dengan kesamaan visi misi pada setiap relawan sehingga pengorbanan waktu bisa diatasi, adanya budaya “ewuh pekewuh” yang membuat penggalan masalah yang dilakukan terhadap korban kurang

berkembang dan kesulitan kesepakatan waktu saat pendampingan GACA dilakukan secara tim namun salah satu informan mengatakan bahwa beliau mempunyai prinsip “kita harus jadi yang pertama, segera dan mandiri”.

Perilaku prososial yang dimiliki relawan antara lain empati, murah hati, kasih sayang, dan kerja sama. Informan mengatakan bahwa sebagai relawan prinsip empati itu perlu, ikut merasakan penderitaan korban, menganggap korban seperti anak sendiri, sehingga hal tersebut juga mendasari keinginan menjadi relawan apalagi seorang muslim harus sebagai pencerah, saling tolong menolong dan amal ma'ruf nahi munkar serta sesama muslim adalah saudara.

Perilaku prososial adalah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, membantu orang lain dan menunjukkan empati. Perilaku prososial juga dapat dimaknai dengan kemampuan menyadari posisi orang lain, menafsirkan kebutuhan orang lain dan menyadari orang lain dalam keperluan membutuhkan bantuan. Perilaku prososial merupakan perilaku positif yang dapat berguna untuk mendukung pengembangan sikap sosial yang lebih baik dalam penyesuaian diri dalam lingkungan. Perilaku prososial merupakan perilaku positif yang memberi keuntungan baik bagi individu maupun orang lain dan ditunjukkan melalui berbagai bentuk perilaku seperti empati, murah hati, kasih sayang dan kerja sama. Sikap tidak mementingkan diri sendiri yang dimiliki relawan berhubungan dengan kebahagiaan menjadi seorang relawan (Iryana and Asyanti, 2015; Susanto, 2018).

Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan yang disampaikan informan berasal dari faktor genetik, keanggotaan dalam kelompok atau budaya di masyarakat, pengalaman sosialisasi, mengikuti pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta motivasi prososial. Faktor genetik (keturunan) yang dimiliki relawan antara lain orang tua aktif dalam kegiatan Aisyiyah dan Muhammadiyah, ibu aktif di Aisyiyah, kakek nenek juga aktif di Aisyiyah dan

Muhammadiyah, ibu relawan aktif di Aisyiyah sekaligus tokoh pendiri panti asuhan Aisyiyah, istri dan anak-anak juga aktif di Aisyiyah dan Muhammadiyah. Informan juga mengatakan bahwa orang tua adalah sumber motivasi dalam berbuat baik, bekerja dengan gigih dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak serta orang lain. Informan mengatakan sebagian relawan adalah keturunan seorang pendidik dan pendiri pengajian-pengajian di lingkungan tempat tinggalnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada garis keturunan yang aktif dalam organisasi Aisyiyah dan Muhammadiyah namun suami mendukung semua kegiatan Aisyiyah dan Muhammadiyah dan mengizinkan istrinya untuk aktif menjadi relawan GACA.

Keanggotaan dalam kelompok atau budaya yang dimiliki relawan antara lain pengurus ranting Aisyiyah, menjadi wakil ketua, dan NA (Nasyiatul Aisyiyah) waktu masih muda, di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), mewakili aisyiyah di pemberdayaan orang tua dan anak, RW, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), basis desa, ketua pemuda, ketua olah raga, kelompok tani, RT dan dasa wisma, PKK RT, pengurus RT, dan dasa wisma. Salah satu informan mengatakan bahwa beliau menjadi relawan berawal dari aktif di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sehingga dalam proses pendampingan beliau sudah sangat berpengalaman. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan relawan antara lain: mengikuti sosialisasi, seminar, pelatihan, dan workshop. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, Suhanadji and Lestari, 2018) mengungkapkan bahwa pembinaan relawan sosial tidak hanya dengan pemberian bimbingan untuk meningkatkan akademiknya, akan tetapi pembinaan akhlak, keagamaan, pemberian keterampilan dan menumbuhkan budaya membaca dan rekreasi juga dapat diberikan kepada relawan.

Motivasi prososial yang dimiliki relawan adalah motivasi untuk melakukan kegiatan pendampingan secara ikhlas, Lillahi Ta'ala,

tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada rasa untuk mencari imbalan dan tulus. Salah satu informan mengatakan bahwa dulu pernah melakukan pendampingan kasus anak bermasalah sebelum menjadi relawan GACA dan diberikan jasa uang lelah namun relawan tersebut justru ketakutan dan khawatir bagaimana pertanggungjawaban uang tersebut kepada Allah dan pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial antara lain : faktor biologis, faktor genetik (keturunan), keanggotaan dalam kelompok atau budaya, pengalaman sosialisasi, proses kognitif, responsivitas emosi, kepribadian dan variabel personal seperti kemampuan bergaul dan gender, serta situasi lingkungan. Pengaruh situasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Pengaruh situasi tersebut meliputi jenis situasinya (darurat atau bukan darurat), keadaan orang yang membutuhkan bantuan (kebutuhannya cukup jelas atau kurang jelas, bisa diterima atau tidak sebab-sebab kebutuhannya), hubungan penolong dengan yang ditolong (kenal atau tidak kenal) dan keberadaan orang lain. Beberapa aspek juga harus dimiliki relawan antara lain kecerdasan emosional, spiritual, sosial dan efikasi diri (Widyarini, 2009; Susanto, 2018; Risa Wahyuningsih, 2020).

Perilaku prososial didasari oleh motivasi prososial yang berasal dari dalam diri seseorang. Secara umum terdapat tiga jenis motivasi prososial yaitu *ipsosentric motivation*, *endocentric motivation*, dan *intrinsic prosocial motivation*. Para relawan yang memiliki *ipsocentric motivation*, melakukan kegiatan untuk mendapatkan *reward* dari orang lain, mereka menjadi relawan karena ingin mendapatkan imbalan tertentu. Relawan yang memiliki *endocentric motivation* artinya melakukan kegiatan semata-mata karena untuk meningkatkan *self-esteem* pada dirinya dimana relawan tersebut melakukan kegiatan karena ingin dipuji oleh orang lain. Ada juga relawan yang termasuk kedalam *intrinsic prosocial motivation*, relawan tersebut menolong orang lain karena keinginan dari dalam dirinya yang

tulus untuk menolong orang lain walaupun tidak mendapatkan *reward* (Ashar, 2016; Rosida, 2019).

Proses pendampingan GACA yang disampaikan oleh informan berbeda-beda tergantung sumber informasi dan kasus yang dihadapi. Ada informan yang mengatakan bahwa proses pendampingan diawali dengan adanya laporan setelah itu pihak relawan memanggil teman dari korban atau anak bermasalah sebanyak 3-4 anak kemudian ditanya tentang kebenaran kasus dan apa penyebabnya kemudian hari setelahnya memanggil siapa lagi yang terlibat yang bisa dijadikan sumber informasi terhadap kebenaran kasus sehingga relawan mendapatkan gambaran anak yang bermasalah itu dari pandangan teman-temannya kemudian baru anak yang bermasalah itu dipanggil, dilakukan pendekatan, dibina dan didampingi secara intensif 4 mata saja. Dalam proses pendampingan yang dilakukan dengan membuat anak senang terlebih dahulu, tidak langsung bertanya mengenai kasus maupun langsung menyalahkan anak. Relawan menjalin hubungan emosional dengan anak terlebih dahulu.

Informan lain mengatakan proses pendampingan diawali dengan mengunjungi ke rumah anak yang bermasalah itu kemudian dilakukan pendekatan dan pendampingan. Proses pendampingan anak bermasalah, selama masih bisa ditangani oleh relawan maka ditangani sendiri, jika ada kasus yang tidak bisa ditangani maka relawan berkonsultasi dengan tim relawan yang lebih senior dan berpengalaman, jika masih belum bisa terselesaikan maka kasus tersebut dikonsultasikan kepada ketua PWA MKS (Majelis Kesejahteraan Sosial) wilayah Jawa Tengah. Saat proses pendampingan bisa dilakukan di rumah ketua PWA MKS wilayah Jawa Tengah, di rumah korban, atau bisa juga dibawa ke panti. Proses pendampingan diawali dengan pendekatan terhadap anak terlebih dahulu, diajak makan bersama, tidur bersama, dan berbagi cerita namun terkadang ada

permasalahan jika anak-anak yang didampingi masih sering mengompol saat tidur.

Ada juga informan yang mengatakan bahwa proses pendampingan diawali dengan adanya laporan kasus yang masuk di relawan atau di panti atau mengetahui kasusnya secara langsung, kemudian dilakukan cek kebenaran data, kemudian pendekatan kepada korban dan orang tua, kemudian dilakukan proses pendampingan kasus. Jika masalah tersebut bisa diselesaikan oleh tim relawan maka akan diselesaikan oleh tim relawan saja namun jika masalah tersebut tidak bisa diatasi oleh tim relawan maka dikonsultasikan dengan majelis kesejahteraan sosial dan jika diperlukan adanya pendampingan hukum, maka kasus tersebut dikonsultasikan ke majelis hukum dan HAM Aisyiyah.

Respon keluarga korban klien terhadap relawan GACA yang disampaikan informan antara lain: pihak keluarga sangat terbuka dengan adanya relawan dalam proses pendampingan anak menjalin kedekatan antara relawan dengan anak yang didampingi. Respon keluarga klien baik, sesekali memberikan bahan makanan untuk relawan, keluarga sangat senang, merasa anaknya aman jika sudah di panti. Adanya relawan GACA sangat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan. Respon tersebut didapatkan dari informan dalam arti respon tersebut adalah respon setelah hambatan dan kendala dari pihak keluarga teratasi, proses pendampingan yang dilakukan relawan GACA sudah dapat diterima.

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah fenomena relawan GACA digambarkan dalam beberapa aspek antara lain motivasi, hambatan atau kendala, perilaku prososial relawan, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan, proses pendampingan GACA dan respon keluarga klien terhadap GACA dari sisi relawan. Motivasi yang dimiliki relawan bisa sangat sederhana yang berawal dari hanya ikut-

ikutan sampai motivasi yang sangat mulia yaitu ibadah, ikhlas, dan Lillahi Ta'ala. Hambatan atau kendala yang dialami relawan berasal dari beberapa aspek, yaitu dari korban itu sendiri, keluarga korban, proses pendampingan dan dari relawan sendiri. Setiap relawan memiliki perilaku prososial antara lain empati, murah hati, kasih sayang dan menjalin kerja sama dengan tim sesama relawan bahkan kerja sama lintas sektoral.

Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial relawan yang disampaikan informan berasal dari faktor genetik, keanggotaan dalam kelompok atau budaya di masyarakat, pengalaman sosialisasi, mengikuti pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta motivasi prososial. Motivasi prososial yang dimiliki oleh relawan masuk dalam kategori intrinsik *prosocial motivation*, yang berarti bahwa relawan tersebut menolong orang lain karena keinginan dari dalam dirinya yang tulus untuk menolong orang lain walaupun tidak mendapatkan pujian dan reward.

Rekomendasi

Dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat melakukan kolaborasi dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam optimalisasi GACA (Gerakan Aisyiyah Cinta Anak).

Ucapan Terima Kasih

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah atas penyelenggaraan hibah Muhammadiyah.

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Propinsi Jawa Tengah dan Majelis Kesejahteraan Sosial Wilayah Jawa Tengah atas diberikannya ijin penelitian tentang GACA.

Pimpinan Universitas Aisyiyah Surakarta dan Pusat Penelitian Universitas Aisyiyah Surakarta atas dukungan dan bantuan untuk terselesaikannya rangkaian proses penelitian.

Pimpinan Panti Aisyiyah Blambangan Banjarnegara dan segenap tim relawan GACA atas kesediaan tempat dan waktunya.

Pustaka Acuan

- Akhtar, H., Pertiwi, E. and Mashuri, M. F. (2020) 'Early View Judul Naskah: Eksplorasi motivasi relawan: Sebuah perspektif indigenous psychology', *Jurnal Psikologi Sosial Universitas Muhammadiyah Malang*, xx No. xx(246), p. 65145. doi: 10.7454/jps.2020.xx.
- Anonim, A. (2020) *KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Available at: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> (Accessed: 6 May 2021).
- Ashar, P. M. (2016) *Studi Deskriptif mengenai Motivasi Prososial pada Relawan Komunitas berbagi nasi di Kota Bandung*. Bandung. Available at: http://repository.maranatha.edu/21773/8/1030150_Cover.pdf (Accessed: 13 April 2021).
- Az-Za'balawi, M. S. . (2007) *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*. 1st edn. Depok: Gema Insani.
- Chandra, E. (2019) *Angka Kekerasan terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, Ada Pertambahan Sekitar 300 Kasus*, *Tribun Jabar*. Available at: <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus> (Accessed: 13 April 2021).
- Chomsun, A. (2015) *Kelas*. Jakarta: Gagas Media.
- Haroen, D. (2014) *Personal Branding-Kunci Kesuksesan Anda Berkiprah di Dunia Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Intan, G. (2018) *KPAI: Kasus Kekerasan Anak dalam Pendidikan Meningkat Tahun 2018*, *VOAINDONESIA*. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-kasus-kekerasan-anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/4718166.html> (Accessed: 13 April 2021).
- Iryana, I. and Asyanti, S. (2015) *ALTRUISME DENGAN KEBAHAGIAAN PADA PETUGAS PMI*. Surakarta.
- Kandedes, I. (2020) 'KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), pp. 66–76. Available at: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/16020> (Accessed: 6 May 2021).
- Kasiyati, S. (2016) 'PROBLEMA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Studi Pendampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), pp. 77–92. Available at: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/74/68>. (Accessed: 13 April 2021).
- Khalif, M. (2006) *Nasihat untuk orang-orang Lalai*. Depok: Gema Insani.
- Klikmu (2018) *GACA – Gerakan Aisyiyah Cinta Anak, Berita Muhammadiyah Populer*. Available at: <https://klikmu.co/gaca-gerakan-aisyiyah-cinta-anak/> (Accessed: 13 April 2021).
- Marwati, T., Ruliyandri, R. and Solikhah, S. (2019) 'Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Pimpinan Cabang Aisyiyah Kraton Yogyakarta', *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 8(1), pp. 24–29. doi: 10.20961/semar.v8i1.21376.
- Medistiara, Y. (2020) 'Menteri PPA: Dari Januari-Juni 2020 Ada 3.928 Kasus Kekerasan Anak', *netikNews*, 22 July. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak> (Accessed: 6 May 2021).
- Munawaroh, K. (2015) *MOTIVASI MENJADI RELAWAN (Studi Kasus Guru Agama Informal di Kletek Pucakwangi Pati)*. Semarang. Available at: <http://eprints.walisongo.ac.id/4472/1/114411038.pdf> (Accessed: 13 April 2021).
- Pangestu, J. P. (2016) 'Hubungan Motivasi dan Kepuasan Relawan pada Organisasi Seni', *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 2(2), pp. 35–48.
- Prayitno, I. (2016) *Gerakan Aisyiyah Cinta Anak*. Available at: <http://irwan-prayitno.com/2016/08/gerakan-aisyiyah-cinta-anak/> (Accessed: 13 April 2021).
- Putri, V. P. and Rahardjo, M. (2012) *MEMBANGUN MOTIVASI KERJA RELAWAN DI PMI KOTA SEMARANG, DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*. Faculty of Economics and Business Diponegoro University. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom> (Accessed: 13 April 2021).
- Ribas, R. (2016) *Aisyiyah DIY Luncurkan GACA (Gerakan Aisyiyah Cinta Anak)*, *Suara Muhammadiyah*. Available at: <http://suaramuhammadiyah.id/2016/08/14/aisyiyah-diy-luncurkan-gaca-gerakan-aisyiyah-cinta-anak/> (Accessed: 13 April 2021).
- Risa Wahyuningsih, I. (2020) 'Kecerdasan Emosional, Spiritual, Sosial dan Efikasi Diri Relawan GACA di

- Lingkungan PWA Propinsi Jawa Tengah', *Gaster*, 18(2), pp. 138–151. doi: 10.30787/gaster.v18i2.552.
- Rosida, I. N. (2019) 'Motivasi dan kompensasi relawan di Yayasan Al Madina Surabaya'.
- Susanto, A. (2018) *Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyuni, R., Suhanadji, S. and Lestari, G. (2018) 'MOTIVASI RELAWAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN BELAJAR PLUS DI SEKOLAH RAKYAT KEJAWAN PUTIH SURABAYA', *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 1(1), pp. 15–21. Available at: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/view/2405> (Accessed: 13 April 2021).
- Widyarini, N. (2009) *Relasi Orang Tua dan Anak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Public Perception of Violence against Women in Indonesia

Yustina Fendrita¹ dan Gandhi Pawitan^{1,2}

¹Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 40141,
email: fendrita2005@yahoo.com,

²Penulis Korespondensi, email: gandhi_p@unpar.ac.id

Diterima tanggal: 21 Januari 2021 Direvisi tanggal: 25 Maret 2021 Disetujui tanggal: 22 Juni 2021

Abstract

Violence against women is a complex and multi-caused social problem, almost all women are vulnerable to being victims regardless of age, race, culture, social and economic status. Stereotypes of violence against women are personal problems caused by wrong perceptions that prevent victims from getting recovery and justice. The study of public perceptions related to violence against women is still very limited, so the authors formulate the research question as "How are Indonesian people's perceptions related to violence against women?". The purpose of this study was to determine the public's perception of violence against women. The mixed research method framework was used in carrying the research, by combining qualitative and quantitative methods, with the type of sequential explanatory research. In the quantitative stage collected 2764 respondents who filled in the questionnaire. Then in the qualitative stage, six informants were selected to do indepth interview. The results showed that the perception of forms of violence against women was in a good situation, this was triggered by the incessant socialization and public education. In the perception dimension of who is the victim of violence, the majority of the community shows: victims of violence against women are other people, this condition reflects the majority of people's views that violence against women is a problem outside of themselves. The dimension of perception of the causes of violence shows that the majority of Indonesian people perceive that the causes of violence are economic problems or poverty. Economic problems and poverty were not only the main causes, while unequal power relations as the root cause of violence cannot be seen with the naked eye. In order to understand this relationship, an in-depth analysis process is required. Conclusion: The government still has a lot of homework to do to straighten out the perception of violence against women. It is time for participatory education methods to be used to foster critical public awareness so that they can clearly see social reality.

Keywords: *Public Perception, Violence against Women, Poverty*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan, merupakan masalah sosial yang kompleks dan multi sebab, hampir semua perempuan rentan menjadi korban tidak memandang usia, ras, budaya, status sosial dan ekonomi. Stereotipe kekerasan terhadap perempuan adalah masalah pribadi yang diakibatkan oleh persepsi yang keliru sehingga menghambat korban untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan. Studi tentang persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan masih sangat terbatas, sehingga penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, "Bagaimana Persepsi masyarakat Indonesia terkait kekerasan terhadap perempuan?". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan. Kerangka kerja metode penelitian campuran digunakan dalam penelitian ini, dengan menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris sekuensial. Pada tahap kuantitatif terkumpul 2764 responden yang mengisi kuesioner. Kemudian, pada tahap kualitatif, dipilih 6 informan untuk dilakukan *indept interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan berada pada situasi yang baik, hal ini dipicu oleh gencarnya sosialisasi dan pendidikan publik. Pada dimensi persepsi siapa korban kekerasan mayoritas masyarakat menunjukkan: korban kekerasan terhadap perempuan adalah orang lain, kondisi ini mencerminkan mayoritas pandangan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan diluar diri mereka. Dimensi persepsi penyebab kekerasan menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mempersepsikan penyebab kekerasan adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Persoalan ekonomi dan kemiskinan tidak dapat terlihat secara kasat mata sementara relasi kuasa yang timpang sebagai akar penyebab kekerasan tidak dapat dilihat secara kasat mata untuk dapat memahami relasi ini dibutuhkan proses analisis yang mendalam. Kesimpulan: Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah untuk meluruskan persepsi kekerasan terhadap perempuan. Sudah saatnya

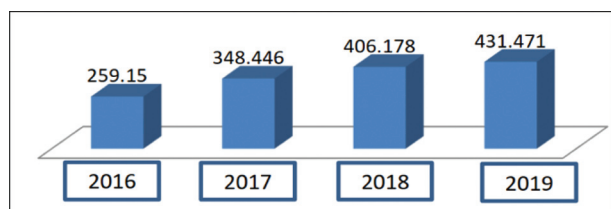
metode pendidikan partisipatif digunakan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sehingga jernih melihat realita sosial.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Kekerasan terhadap Perempuan, Kemiskinan

Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena universal dan global. Diperkirakan 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami tindak kekerasan (Ki-Moon, 2015). Pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHN) tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 – 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan atau oleh selain pasangan selama hidupnya (BPS Indonesia, 2017). Komnas Perempuan mencatat dari tahun 2016 hingga tahun 2019, terjadi peningkatan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan setiap tahunnya (Statistics Indonesia, 2017). Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1
Kejadian kekerasan terhadap perempuan Indonesia berdasarkan tahun



(Sumber: Data diolah dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2016-2019)

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di atas telah mendorong minat para akademisi untuk melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Beberapa penelitian berfokus pada strategi bertahan korban kekerasan dalam rumah tangga (Hayati, 2012; Hayati et al., 2014; Rusyidi et al., 2019; Rusyidi & Nurwati, 2016) melakukan studi tentang sikap pada mahasiswa pekerja sosial. Lebih lanjut, (Hayati et al., 2015) melakukan studi tentang tantangan dan hambatan pelayanan

pada lembaga layanan formal (P2TP2A). (Mardiyati & Udiati, 2018) juga melakukan penelitian tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak diranah domestik.

Studi-studi yang disebutkan di atas merupakan bidang penelitian yang penting dalam issue pemberian layanan bagi korban kekerasan, rekomendasi dari studi studi tersebut telah mendorong Pemerintah dan Lembaga layanan untuk mengupayakan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif bagi korban kekerasan, respon ini penting untuk melindungi perempuan korban dari tindak kekerasan, namun masih terdapat celah yang perlu diisi dalam literatur yang ada kaitannya dengan issue pencegahan kekerasan terhadap perempuan, karena sejatinya upaya pencegahan dan dukungan sosial juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Salah satu aspek dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan. Persepsi kekerasan terhadap perempuan yang tepat akan mendorong penyikapan yang tepat dari masyarakat. Terkait dengan hal di atas, B2P3KS menemukan bahwa pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang baik di Pontianak berkorelasi pada respon, sikap dan dukungan dari masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Rusmiyati & Hikmawati, 2013).

Berdasarkan latar diatas peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terkait kekerasan terhadap perempuan. Studi ini penting dilakukan karena dengan memahami persepsi tentang

kekeraan terhadap perempuan mengarahkan kita untuk menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dengan tepat. Hasil studi ini dapat memberi berkontribusi ilmiah pada kajian tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan, utamanya kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi pada lintas demografi; usia, ras, budaya, status sosial ekonomi, dan geografi. (Komnas Perempuan, 2019). Sementara korban kekerasan dominan dialami oleh perempuan, kondisi ini disebabkan oleh budaya patriarki yang mengkonstruksikan perbedaan perempuan dan laki-laki. Konstruksi yang dibangun adalah laki-laki memiliki sifat yang kuat, berani, tidak toleran dan lebih superior sedangkan perempuan sebaliknya. Demikian halnya perbedaan biologis laki laki digunakan sebagai alat kekuasaan dan kekerasan sementara perbedaan biologis perempuan digunakan untuk melegitimasi kontrol dan kendali perempuan (Peters & Wolper, 2018).

Hampir semua korban kekerasan mengalami dampak kekerasan yang sangat kompleks. Pertama, dampak fisik seperti lebam-lebam, luka hingga cacat permanen. Kedua, dampak psikologis yang meninggalkan bekas mendalam pada para korban. Ketiga, dampak seksual seperti infeksi saluran reproduksi, kerusakan pada alat-alat reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan dan tertular penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Keempat, dampak secara sosial di mana perempuan korban banyak yang terpaksa harus berpindah dari lingkungannya karena tidak nyaman, dikucilkan, diusir karena dianggap membawa aib. Kelima, dampak ekonomi di mana korban kehilangan pekerjaan, harus mengeluarkan banyak uang untuk penanganan kasusnya dan menjadi orang tua tunggal (BPS Indonesia, 2017).

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih sangat mempercayai mitos patriarki yang berkontribusi pada kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan. Mitos ini melekat kuat dalam norma social sehingga untuk menciptakan dunia yang bebas kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara sistematis melalui dekonstruksi terhadap mitos patriarki yang menciptakan stereotip negatif terhadap korban. (Rusyidi & Nurwati, 2016) dalam studinya menemukan : sikap mahasiswa program studi kesejahteraan sosial, psikologi dan keperawatan cenderung memiliki sikap negatif dengan menyalahkan korban perkosaan dan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan korban. Responden dalam penelitian ini menyebutkan bahwa perkosaan terjadi karena kontribusi atau andil korban yang menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kepatutan di masyarakat. Lebih lanjut responden dalam penelitian tersebut memandang korban adalah bukan perempuan baik-baik sehingga ‘layak’ untuk diperkosa.

Dalam kasus lain, kekerasan terhadap perempuan masih dipandang sebagai masalah privat atau pribadi. Terkait hal ini, (Abeya et al., 2012; Hayati et al., 2014; Khan, 2014) menyebutkan bahwa masyarakat mengharapkan perempuan menjadi penjaga nama baik keluarga, sehingga betapapun buruknya kondisi di dalam rumah tangga mereka, perempuan harus mampu menyimpan atau menyembunyikan konflik secara hati-hati. Keharmonisan keluarga juga dibebankan pada perempuan, ada anggapan jika pernikahan gagal maka pasti adalah kesalahan perempuan. Dampak lanjutan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap ke publik adalah sikap pembiaran dari masyarakat karena alasan menghargai privasi keluarga.

Penelitian ini memilih *setting* penelitian berbasis masyarakat. Pemilihan ini didasari oleh kesadaran bahwa masyarakat adalah unit dasar dalam kehidupan sosial dan merupakan jaringan yang terdekat dengan korban sehingga dinamika

yang terjadi di masyarakat mempengaruhi banyak pola tindakan dalam menyikapi terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan. Variabel penelitian ini adalah persepsi kekerasan terhadap perempuan dengan indikator Persepsi responden yang terdiri dari bentuk kekerasan terhadap perempuan, siapa korban dan penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Konsep persepsi Kekerasan terhadap perempuan

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses *sensoris* (Walgito, 2004). Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan ada stimulus yang diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Konsep persepsi kekerasan terhadap perempuan yang dibahas dalam studi ini adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasi-kan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi atas persoalan kekerasan terhadap perempuan yang meliputi bentuk kekerasan terhadap perempuan, siapa korban kekerasan dan penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dapat ditemui dalam keseharian antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi dan perdagangan perempuan (Murniati, 2019). Sementara Korban kekerasan adalah orang yang berada disekitar kita mereka adalah : diri kita sendiri, saudara kita, tetangga dan teman kerja. Korban kekerasan dapat menimpa mulai dari usia bayi hingga perempuan lansia (Komnas Perempuan, 2019).

Akar persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarki yang mengedepankan posisi laki laki dalam semua kehidupan masyarakat, budaya patriarki melekat dalam norma norma social dan interpretasi ajaran agama. Norma dan Nilai ini meneguhkan posisi laki laki yang dominan atas perempuan sehingga memiliki kendali, kontrol dan kuasa terhadap kehidupan perempuan yang berakibat pada kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan. Pendapat diatas sejalan dengan (Peters & Wolper, 2018) yang menyatakan bahwa perbedaan biologis laki laki terhadap perempuan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan kekerasan begitupula sebaliknya perbedaan biologis perempuan dipakai untuk mengontrol dan mengedalikan perempuan

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*Mixed Method Research*), dimana menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi (Creswell, 2012). Jenis penelitian ini adalah *eksplanatoris sekuensial* dimana pengambilan data yang lebih metitikberatkan pada metode kuantitatif, pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dilakukan untuk menguatkan hasil penelitian kuantitatif. Langkah-langkah penelitian eksplanatoris sekuensial yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pertama peneliti mengumpulkan data kuantitatif dengan menggunakan instrumen skala persepsi kekerasan terhadap perempuan meliputi dimensi tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu : kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, perdagangan perempuan atau trafficking dan penelantaran ekonomi serta bentuk kekerasan beragam. Persepsi siapa korban kekerasan yaitu diri sendiri, keluarga, tetangga, teman, orang lain dan bisa siapapun. Sementara persepsi

penyebab kekerasan terhadap perempuan meliputi : faktor ekonomi, ketidakpedulian masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan kebijakan yang melindungi, dominasi laki-laki dan perempuan dan penyebab kekerasan beragam.

2. Tahap kedua peneliti melakukan analisis data kuantitatif dengan menganalisis hasil instrumen skala persepsi kekerasan terhadap perempuan menggunakan *software* SPSS 21 *for windows*.
3. Tahap ketiga mengumpulkan data kualitatif dengan teknik wawancara secara semi struktur. Tujuan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil penelitian kualitatif yang meliputi : mengapa persepsi masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di wilayah anda baik atau tidak baik ? Apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut? apa komponen persepsi kekerasan terhadap perempuan yang harus diketahui masyarakat
4. Tahap keempat dengan melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sampai hasil temuan data benar-benar jenuh. Selain itu peneliti melakukan uji validitas dengan cara triangulasi dan *member checking* untuk memastikan hasil temuan peneliti benar-benar akurat dan valid.

5. Tahap terakhir melakukan interpretasi keseluruhan data. Pada langkah terakhir peneliti mendiskusikan data kuantitatif dan kualitatif dengan cara memaparkan data hasil temuan kuantitatif, kualitatif, dan *mixed method*. Kemudian peneliti memberikan penjelasan secara mendalam terhadap hasil temuan penelitian persepsi kekerasan terhadap perempuan.

Objek penelitian pada studi ini adalah 29 Provinsi di Indonesia (lihat Tabel 1). Pemilihan sampel dilakukan melalui metode *Multistage Random Sampling* yang mewakili populasi di Indonesia. *Multistage random sampling* dipilih karena terdapat kendala biaya dalam pelaksanaan survey. Pemilihan responden menggunakan teknik *Kish Grid* hingga diperoleh 3970 orang yang berusia 18 – 64 tahun untuk di interview. Dalam analisis data penelitian hanya 2764 responden yang diolah sesuai dengan kriteria penelitian yaitu responden yang mengetahui atau memiliki pengalaman berhadapan dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan. Sementara pemilihan informan ditentukan berdasarkan kriteria: Memiliki pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan, orang yang bekerja dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mewakili karakteristik sosial budaya Indonesia. Dari kriteria tersebut terpilih 6 informan berasal dari: Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Tabel 1
Lokasi Penelitian

Sumatera	Jawa/Bali	Kalimantan/Sulawesi	NTT, Maluku, Papua
DI. Aceh	Jatim	Sulsel	NTT
Sumut	Jateng	Sulteng	Maluku
Sumbar	Jabar	Sultra	Papua
Sumsel	DIY	Sulut	
Bengkulu	DKI Jakarta	Kalbar	
Jambi	Banten	Kalteng	
Babel	NTB	Kalsel	
Riau	Bali	Kaltim	
Lampung			
Kepri			

(Sumber: data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Hasil Penelitian

Berdasarkan komposisi jenis kelamin responden penelitian yaitu laki laki 39,52% dan 60,48% perempuan. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 35 - 44 tahun, yaitu sebesar 28,2%, sementara rentang usia responden yang terendah yaitu berusia 18- 24 tahun dengan persentase sebesar 13,1%. Tingkat pendidikan responden yang terbesar adalah responden yang memiliki ijazah SMP dengan persentase 39,9%. Sementara tingkat pendidikan responden yang paling rendah adalah berijazah Perguruan Tinggi berada pada 0,7%. Sebagian besar responden berada pada rentang pendapatan Rp. 2 juta – 4 juta rupiah yaitu 35,4%, dan rentang pendapatan terendah responden adalah > 20 juta sebesar 0,3%.

Hasil dan Pembahasan

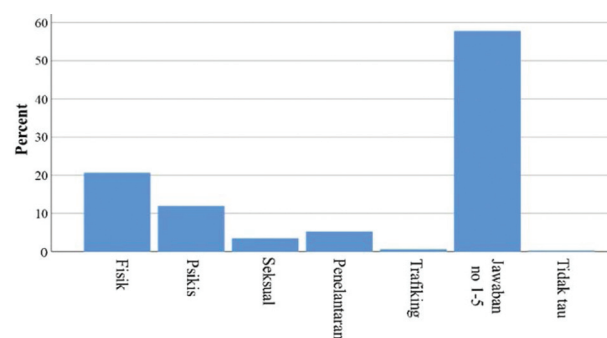
Persepsi Responden Terkait Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam dimensi persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan terdapat 57,8% responden mempersepsikan bahwa bentuk kekerasan beragam, sebanyak 20,6% responden mempersepsikan bentuk kekerasan hanya fisik, 11,9% responden mempersepsikan bentuk kekerasan adalah psikis, sementara terdapat 5,1 % yang memiliki persepsi bentuk kekerasan adalah penelantaran rumah tangga, persepsi bentuk kekerasan seksual sebanyak 3,5% dan persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan trafficking sebesar 0,6% responden. Temuan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara terhadap Informan Roslina Rasyid (47 tahun)

“Terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan, masyarakat memang sudah sangat memahami hal ini dikarenakan gencarnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak”

Grafik 2

Persepsi Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan



(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Sementara untuk melihat perbedaan persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Persepsi Bentuk Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin

Persepsi Bentuk Kekerasan	Perempuan	Laki-Laki
	Persentase	Persentase
Fisik	20.7 %	20.7 %
Seksual	2.8 %	4.5 %
Psikis	11.4 %	11.1 %
Penelantaran ekonomi	4.3 %	4.5 %
Trafficking	0.6 %	4.9 %
Kekerasan berlapis	60.2 %	54.2 %
Total	100.0 %	100.0 %

(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Dari hasil pengolahan data terkait persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin di atas, terdapat persamaan persepsi antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi bentuk kekerasan fisik dan psikis, sementara persepsi bentuk kekerasan seksual dan trafficking dominan dimiliki oleh responden laki-laki, namun pada dimensi persepsi bentuk kekerasan berlapis dominan dipersepsikan oleh responden perempuan yaitu sebesar 60.2 %. Persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan dari latar belakang pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

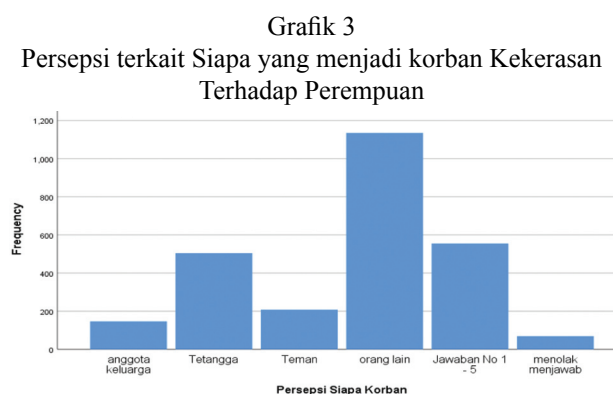
Tabel 3
Persepsi Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan pendidikan Responden.

Persepsi Bentuk KTP	Pendidikan Responden		
	Berijazah SMP /kejar paket	Berijazah SMA /kejar paket	Berijazah PT /Akademi
Fisik	18.6%	16.8%	11.0%
Psikis	11.2%	11.2%	5.7%
Seksual	3.4%	2.8%	11.2%
Penelantaran	4.0%	3.9%	5.4%
Trafficking	0.5%	2.2%	5.6%
Kekerasan berlapis	62.3%	63.1%	61.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Persepsi Responden Terkait Siapa Korban

Tanggapan responden terkait dengan persepsi siapa korban kekerasan : 42,4% responden mempersepsikan bahwa korban adalah orang lain, sebanyak 20,7% korban dapat menimpa siapa saja artinya dapat menimpa diri sendiri, anggota keluarga, tetangga, teman dan orang diluar, 18,9% responden mempersepsikan korban adalah tetangga, 7,8%, responden mempersepsikan korban adalah teman kita dan korban adalah anggota keluarga sebanyak 5,5%, sementara hanya 2,1% persepsi responden yang menyatakan bahwa korban dapat menimpa diri sendiri.



(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Susi handayani (46 tahun) menguatkan hasil tersebut

“Masyarakat selama ini masih beranggapan bahwa korban itu adalah orang diluar dirinya, sehingga anggapan inilah yang membuat masyarakat sering cuek dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan”

Sementara persepsi siapa korban berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4
Persepsi siapa korban berdasarkan jenis kelamin

Siapa Korban	Perempuan	Laki-Laki
	Persentase	Persentase
Anggota keluarga	5.2 %	6.7 %
Tetangga	19.8 %	18.5 %
Teman	7.9 %	7.9 %
Orang lain	43.2 %	43.6 %
Korban bisa siapa saja	21.5 %	20.7 %
Total	100.0 %	100.0 %

(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Persepsi siapa korban berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Persepsi siapa korban berdasarkan pendidikan responden

Persepsi siapa korban	Pendidikan Responden		
	Berijazah SMP/ kejar paket	Berijazah SMA/ kejar paket	Berijazah PT/ Akademi
Anggota keluarga	6.2 %	4.0 %	3.4 %
Tetangga	18.3 %	15.3 %	14.9 %
Teman	8.9 %	10.2 %	10.2 %
Orang lain	42.2 %	42.6 %	42.7 %
Korban dapat menimpa siapa saja	21.5 %	22.8 %	25.8 %
Menolak menjawab	2.5 %	5.1 %	3.1 %
Total	100.0%	100.0%	100.0%

(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Persepsi Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

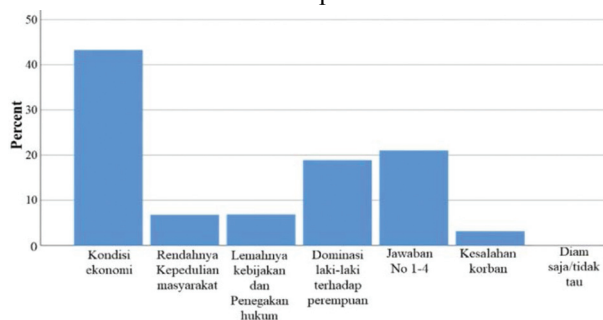
Dari hasil analisis data deskriptif statistik terhadap persepsi responden berkaitan dengan penyebab kekerasan terhadap perempuan menghasilkan sebagai berikut: Penilaian persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kondisi ekonomi sebanyak 52,4% sementara persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh beragam kondisi yaitu ekonomi, rendahnya kepedulian masyarakat, lemahnya kebijakan dan penegakan hukum dan dominasi laki-laki terhadap perempuan sebesar 14,6%, hanya 11,8% yang menyatakan bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan selebihnya 5,8% menyatakan penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah lemahnya kebijakan dan penegakan hukum dan 3,5% adalah rendahnya kepedulian masyarakat, dan persepsi responden terkait penyebab kekerasan terhadap perempuan karena kesalahan korban hanya berada pada angka 1,4%.

Terkait dengan hasil penilaian persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan fakhurrozi (43 tahun) menyampaikan:

“Kondisi ekonomi kan memang salah satu pemicu kekerasan yang paling banyak dan nyata, jika dibandingkan dengan pemicu kekerasan yang lainnya, selain itu kondisi ekonomi ini paling mudah

dilihat oleh mata masyarakat awam karena setiap hari masyarakat melihat bahwa akibat pemutusan hubungan kerja istri dipukul oleh suami, akibat rumah tidak punya kamar anak perempuan diperkosa bapaknya jadi tidak heran kalau kebanyakan masyarakat masih menilai bahwa penyebab kekerasan adalah persoalan ekonomi, sementara akar kekerasan kan sembunyi, hanya bisa diselami keberadaannya melalui analisis yang panjang, kita saja sebagai orang yang setiap hari berhadapan dengan korban bisa menemukan bahwa ada masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan setelah melakukan diskusi berkali-kali aksi refleksi, aksi refleksi iya kan”.

Grafik 4
Persepsi terkait Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan



(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Untuk melihat perbedaan persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan antara responden laki-laki dan perempuan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel.6
Persepsi penyebab kekerasan berdasarkan jenis kelamin

Penyebab kekerasan	Perempuan	Laki-Laki
	Persentase	Persentase
Kondisi ekonomi	42.8 %	44.2 %
Rendahnya kepedulian masyarakat	6.5 %	7.0 %
Lemahnya kebijakan	6.8 %	7.4 %

(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Sementara persepsi penyebab kekerasan berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Persepsi responden terkait penyebab kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pendidikan Responden

Persepsi responden terkait penyebab KTP	Pendidikan Responden		
	Berijazah SMP/ kejar paket	Berijazah SMA/ kejar paket	Berijazah PT/ akademi
Kondisi ekonomi	44.3%	48.3%	26.1%
Rendahnya kepedulian masyarakat	6.8%	6.4%	4.3%
Lemahnya kebijakan yang melindungi korban	6.0%	5.6%	4.3%
Dominasi laki laki terhadap perempuan	21.0%	19.2%	34.8%
Penyebab beragam	18.5%	18.4%	30.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

(Sumber: Data diolah dari penelitian tentang persepsi kekerasan terhadap perempuan Unpar-FPL tahun 2019)

Diskusi Persepsi Kekerasan Terhadap Perempuan

Dari hasil analisa statistik terhadap persepsi responden terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berada pada situasi yang baik, hal ini terkonfirmasi dalam wawancara dengan 6 informan yang menyatakan bahwa persepsi responden cukup baik karena dipicu oleh gencarnya sosialisasi atau pendidikan publik terkait informasi tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui kampanye di media, iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Institusi agama (gereja), atau Organisasi Masyarakat Sipil. Peneliti meyakini bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat mudah untuk dicerna atau diamati oleh masyarakat karena fakta sosial ini berwujud nyata sehingga tidak membutuhkan diskusi dan analisa yang dalam.

Hasil analisis persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa perbedaan persepsi bentuk

kekerasan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, bahkan pada beberapa indikator persepsi bentuk kekerasan memiliki kesamaan pandangan yaitu pada bentuk kekerasan fisik dan psikis. Sementara perbedaan persepsi yang mencolok dalam penelitian ini terdapat pada persepsi kekerasan berlapis yang lebih dominan dimiliki oleh perempuan sebesar 60.2% dan persepsi laki-laki sebesar 54.2% perbedaan lain juga terjadi pada persepsi trafficking yang lebih dominan dimiliki oleh laki laki yaitu sebesar 4.7 % dan perempuan hanya mempersepsikan bentuk trafficking sebesar 0,6 % Sementara hasil analisis persepsi bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan responden semakin tinggi pula persepsi tentang bentuk kekerasan seksual, trafficking dan penelantaran ekonomi hal ini dapat dilihat dari hasil analisa data yang menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan perguruan tinggi mempersepsikan kekerasan seksual lebih tinggi yaitu 11.2% jika

dibandingkan dengan responden yang memiliki ijazah SMA di angka 2.8 % dan responden dengan ijazah SMP sebanyak 3.4 %. Demikian pula dengan persepsi bentuk trafficking responden dengan ijazah perguruan tinggi mempersepsikan 5.5 %, sedangkan responden yang berijazah SMA mempersepsikan 2.2 % dan persepsi responden dengan ijazah SMP sebesar 0.5 %. Hampir semua responden dari seluruh jenjang pendidikan memiliki persepsi bahwa bentuk kekerasan tidak tunggal atau berlapis.

Hasil analisa pada dimensi persepsi siapa korban kekerasan responden dominan mempersepsikan bahwa korban kekerasan adalah orang lain, kondisi ini mencerminkan pandangan kebanyakan masyarakat bahwa korban kekerasan atau persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan diluar diri kita. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat penyangkalan terhadap fakta sosial bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang jauh dari masyarakat sementara faktanya persoalan ini sangat dekat dengan diri kita. Penyangkalan ini terkait dengan stigma negatif yang dilekatkan pada korban. (Rusyidi & Nurwati, 2016) dalam studinya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan stigma negatif terhadap korban dan tidak mempercayai kredibilitas informasi tentang kekerasan yang dialami korban. Stigma ini menyebabkan korban dan keluarganya menjadi tertutup dan menyembunyikan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Penyangkalan sosial atas realita siapa korban kekerasan diakibatkan oleh stereotype yang berkembang dalam masyarakat, dimana nilai nilai sosial budaya yang terbangun selama ini masih meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan diluar diri masyarakat, kondisi ini sejalan dengan studi (Abeya et al., 2012).

Hasil analisa terhadap persepsi siapa korban berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan yang signifikan, responden laki-laki

dan perempuan dominan mempersepsikan korban kekerasan adalah orang lain. Demikian halnya dengan persepsi responden berdasarkan tingkat pendidikan juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan, perempuan mempersepsikan lebih tinggi sedikit jika dibandingkan laki laki pada indikator korban dapat menimpa siapa saja. Data tersebut memperlihatkan bahwa hampir semua responden mempersepsikan korban kekerasan adalah orang diluar lingkaran responden ini artinya bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak berkorelasi dengan persepsi yang baik terkait siapa korban.

Dari hasil analisa data diatas baik berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan terlihat bahwa masyarakat cenderung mempersepsikan korban kekerasan adalah orang diluar lingkaran mereka. Peneliti meyakini bahwa persepsi ini dipengaruhi oleh keyakinan nilai nilai sosial budaya bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang *privat* sehingga tidak pantas untuk diungkap di public keyakinan ini pada akhirnya terinternalisasi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah masalah diluar dirinya (Hayati et al., 2014). Membicarakan persoalan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan pemahaman yang utuh serta kejujuran terhadap fakta dan pengalaman masyarakat. Mitos dan stereotip yang berkembang di masyarakat selama ini cenderung mengabaikan fakta kekerasan tersebut.

Pemerintah, Komnas Perempuan dan Organisasi masyarakat sipil setiap tahun melaporkan data kekerasan yang berisi tentang profil korban kekerasan, media cetak juga secara berkala memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data dan peristiwa kekerasan yang dipublikasikan seharusnya cukup menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui profil korban kekerasan, namun keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai gender telah mengaburkan pengalaman kekerasan yang dialami dan dilihat oleh masyarakat, terkait dengan persepsi siapa korban, dekonstruksi pengetahuan melalui pendidikan kritis harus

mulai dipikirkan sehingga masyarakat lebih jujur mengungkapkan fakta sosial dan tidak terus menerus berada pada kesadaran semu atau naif.

Hasil penilaian terhadap dimensi persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam penelitian ini didominasi oleh persepsi penyebab kekerasan karena kondisi ekonomi yaitu sebesar 43.5 %, sementara dominasi laki-laki terhadap perempuan yang sebetulnya merupakan akar dari persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya berada pada angka 21,6 %. Data tersebut menunjukkan bahwa persepsi merupakan representasi dari visualisasi yang terlihat oleh masyarakat. Masyarakat cenderung mempersepsikan penyebab kekerasan adalah kondisi ekonomi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hayati et al., 2014; Mardiyati & Udiati, 2018) bahwa salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi ekonomi atau kemiskinan perempuan. Perempuan berpenghasilan rendah lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan perempuan lain karena kurangnya sumber daya. Kondisi ini menjebak korban dalam lingkaran kemiskinan dan menimbulkan ketergantungan terhadap pelaku. Hal ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa perempuan berpenghasilan rendah seringkali memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengurangi kemungkinan pekerjaan alternatif dan memperparah kemiskinan (Primawati & Pembayun, 2013). Perempuan miskin dan berpenghasilan rendah menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi, terutama kekerasan yang parah misalnya KDRT dan trafficking.

Hasil analisa lebih dalam pada persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. Laki laki cenderung lebih tinggi mempersepsikan penyebab kekerasan pada masing – masing indikator penyebab kekerasan

sementara perempuan cenderung lebih mempersepsikan penyebab kekerasan terhadap perempuan beragam yang meliputi : kondisi ekonomi, rendahnya kepedulian masyarakat, lemahnya kebijakan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan, persepsi perempuan sangat dipengaruhi oleh pengalaman kekerasan yang dialaminya sehingga terdapat proses belajar dan pemaknaan yang tepat karena menjalaninya. Hasil penelitian ini dikuatkan dengan studi yang dilakukan oleh (Osuna-Rodríguez et al., 2020) yang menyatakan perempuan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kekerasan terhadap perempuan karena mereka memiliki pengalaman nyata berhadapan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa hal menarik dalam hasil analisis persepsi penyebab kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tingkat pendidikan : responden dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA lebih mempersepsikan penyebab kekerasan adalah kondisi ekonomi sementara responden dengan pendidikan Perguruan Tinggi lebih mempersepsikan penyebab kekerasan terhadap perempuan karena dominasi laki-laki terhadap perempuan dan penyebab kekerasan terhadap perempuan beragam. Kondisi ini memperlihatkan pada kita bahwa makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka makin dalam analisa terhadap suatu fenomena sosial, hasil penelitian ini dikuatkan dengan hasil studi yang dilakukan (Abani & Pourmehdi, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi responden, responden dengan pendidikan tinggi cenderung menyetujui bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah hubungan ketidaksetaraan gender di masyarakat.

Dari hasil analisa data terkait penilaian pada tiga dimensi persepsi kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang tidak menguntungkan bagi perempuan, oleh karena itu intervensi atau

rekonstruksi terhadap cara pandang masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan mutlak harus dilakukan. Rekonstruksi cara pandang membutuhkan pembongkaran ideologi patriarki secara sistematis, hal ini harus dilakukan karena nilai-nilai gender masih cukup kuat diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Membongkar ideologi patriarki membutuhkan ruang ruang dialogis untuk memunculkan sikap kritis dan analitik masyarakat atas persoalan kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan publik yang tepat dengan metode dialogis atau partisipatoris akan mampu merubah persepsi masyarakat menjadi baik. Sudah saatnya para pihak utamanya Pemerintah merubah pendekatan dalam program pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dari pendekatan yang monologis menjadi pendekatan dialogis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Osuna-Rodríguez et al., 2020) juga menguatkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pendidikan dan pelatihan dari sumber ahli yang kompeten akan mengarahkan sikap yang tepat terhadap korban kekerasan. Untuk menyikapi informasi salah yang diterima publik dibutuhkan counter narasi publik tentang informasi kekerasan terhadap perempuan melalui upaya rekonstruksi budaya. Lebih lanjut hasil studi (Osuna-Rodríguez et al., 2020) juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan positif tentang kekerasan terhadap perempuan dari sumber yang terpercaya memiliki sedikit resiko untuk menjadi korban jika dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki pengetahuan hanya dari televisi atau media cetak, Mahasiswa dengan pengetahuan positif memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap ancaman kekerasan. Kualitas persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan masyarakat, Pengalaman masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan merupakan peristiwa khas dan personal yang dialami setiap

orang dan hal ini sangat sulit untuk diintervensi (Ahmadi, 2009).

Data penelitian ini sangat menarik dibahas lebih lanjut karena penyebab kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ekonomi tidak terlepas dari mindset subordinasi yang dialami oleh perempuan yang diakibatkan oleh budaya patriarkhi. Sementara budaya patriarkhi sebagai mana di sampaikan oleh (Mansour, 2008) masih sangat sedikit dipersepsikan masyarakat, hal ini disebabkan karena budaya patriarkhi yang mengakibatkan relasi yang tidak setara dimasyarakat secara kasat mata tidak terlihat. Persoalan relasi yang timpang atau tidak seimbang akan terlihat ketika ada proses analisis yang mendalam dan konsisten melalui diskusi diskusi kritis untuk menemukan *gap* atau kesenjangan akan relasi sosial ini. Persoalan ketimpangan gender merupakan persoalan yang berkaitan dengan ideologi, oleh karena itu untuk membongkar ideologi akibat dehumanisasi, kesadaran kritis harus dibangkitkan melalui pendidikan yang memanusiakan manusia melalui pendidikan partisipatif sebagaimana disampaikan Freire dalam (Rahardjo et al., 2007).

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan terhadap data penelitian dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan kondisi yang beragam. Kondisi ini terlihat dalam penilaian pada setiap dimensi persepsi. Persepsi masyarakat terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan menunjukkan persepsi yang positif atau baik, hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat telah mempersepsikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak tunggal atau berlapis. Lebih lanjut bahwa persepsi masyarakat terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Persepsi masyarakat Indonesia terkait siapa korban kekerasan masih menunjukkan bias terhadap

fakta kekerasan yang terjadi, masyarakat masih mempersepsikan bahwa korban adalah orang lain itu artinya bahwa masyarakat masih menempatkan persoalan kekerasan terhadap perempuan berada diluar lingkaran hidupnya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakterbukaan atau penyangkalan dari masyarakat terhadap fakta sosial bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang dekat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentu sangat terkait dengan tuntutan ideologi patriarki yang mengharapkan masyarakat untuk menyembunyikan, menutupi dan menerima persoalan kekerasan terhadap perempuan sebagai kondisi yang wajar. Hasil analisis persepsi siapa korban tidak menemukan adanya perbedaan persepsi berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Sementara masyarakat Indonesia mempersepsikan penyebab kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan adalah kondisi ekonomi kemudian dominasi laki-laki terhadap perempuan dan disusul dengan penyebab kekerasan adalah beragam faktor. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan belum menyentuh pada akar persoalannya, bahwa betul kondisi ekonomi sebagai pemicu kekerasan terhadap perempuan, namun hubungan ketidaksetaraan gender antara laki-laki terhadap perempuan merupakan akar kekerasan. Lebih lanjut hasil analisis terkait persepsi ini menemukan adanya perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan lebih mempersepsikan bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah berbagai faktor yaitu kondisi ekonomi, dominasi laki-laki terhadap perempuan dll, sementara responden laki-laki lebih mempersepsikan penyebab kekerasan terhadap perempuan karena dominasi antara laki-laki terhadap perempuan dan lemahnya kebijakan yang melindungi perempuan. Hasil menarik lainnya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin mempersepsikan bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah

dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hasil penilaian terhadap persepsi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menyimpulkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah yaitu mendekonstruksi persepsi masyarakat utamanya pada persepsi siapa korban dan penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Rekomendasi

Pemerintah merumuskan upaya sistematis untuk merubah persepsi kekerasan terhadap perempuan dimulai dari keluarga, masyarakat dan Negara, Perubahan kurikulum untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang menitik beratkan pada pendidikan partisipatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga. Penelitian ini memiliki keterbatasan biaya dan wawasan penulis sendiri (peneliti), maka disarankan kepada peneliti lanjutan untuk melakukan : studi tentang identifikasi hambatan untuk merubah persepsi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, studi tentang implikasi pendidikan partisipatif terhadap persepsi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, penelitian yang akan dilakukan kedepan harus mempertimbangkan kuota responden yang sama antara laki-laki dan perempuan, kuota responden pada semua jenjang pendidikan dan kuota responden pada rentang pendapatan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada berbagai pihak yang telah membantu proses penulisan ini karya tulis ilmiah ini. Pertama penulis sampaikan kepada Bapak Gandhi Pawitan PhD selaku pembimbing penulisan jurnal ini, LPM Universitas Katolik Parahyangan dan Forum Pengada Layanan yang telah mengizinkan penulis untuk mengolah data tentang Persepsi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada editor dan Mitra Bestari yang telah membimbing penulisan KTI

ini. Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak ibu sekalian.

Daftar Pustaka

- Abani, S. El, & Pourmehdi, M. (2021). Gender and Educational Differences in Perception of Domestic Violence Against Women Among Libyan Migrants in Manchester. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5–6), 2074–2096. <https://doi.org/10.1177/0886260518760006>
- Abeya, S. G., Afework, M. F., & Yalaw, A. W. (2012). Intimate partner violence against women in west Ethiopia: A qualitative study on attitudes, women's response, and suggested measures as perceived by community members. *Reproductive Health*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-14>
- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- BPS Indonesia. (2017). *Satu dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik dan atau Seksual Selama Hidupnya*. Badan Pusat Statistik (BPS).
- Creswell. (2012). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hayati, E. N. (2012). Mom, Why Don't You Just Look for a New Good Daddy? Women's Lived Experience in an Abusive Marriage. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 1(1), 28–53. <https://doi.org/10.26555/jehcp.v1i1.a3794>
- Hayati, E. N., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2014). Challenges for a local service agency to address domestic violence - a case study from rural Indonesia. *Global Journal of Health Science*, 6(6), 214–225. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v6n6p214>
- Hayati, E. N., Eriksson, M., Hakimi, M., Ulf Högberg, & Emmelin, M. (2015). "Elastic band strategy": Women's lived experiences of coping with domestic violence in rural Indonesia. *Global Health Action*, 8(1), 0–12. <https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.18894>
- Khan, R. A. (2014). Community Perceptions And Activisms Regarding Domestic Violence Against Women: Perspectives From Rural Bangladesh. *Journal of Community Positive Practices, Catalactica NGO*, 3, 79–98.
- Ki-Moon, B. (2015). *The World's Women 2015 Trends and Statistics*. Beijing: Department of Economic and Social Affairs.
- Komnas Perempuan. (2019). *Info Grafis Catahu: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Mansour, F. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Mardiyati, A., & Udiati, T. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban. *JPKS (Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial)*, 17(2), 101–114. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1413>
- Murniati, N. (2019). *Konseling Feminis: Relasi Antar Manusia Berisikan Kesetaraan Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Padepokan Perempuan GAIA.
- Osuna-Rodríguez, M., Rodríguez-Osuna, L. M., Dios, I., & Amor, M. I. (2020). Perception of gender-based violence and sexual harassment in university students: Analysis of the information sources and risk within a relationship. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113754>
- Peters, J., & Wolper, A. (2018). *Women's Rights, Human Rights International Feminist Perspectives* (1st ed.). Routledge.
- Primawati, A., & Pembayun, E. L. (2013). Kajian Fenomenologi: Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia. *Jurnal PKS*, 12(3), 237–253.
- Rahardjo, T., Topatimasang, R., Fakhri, M., & Dilts, R. (2007). *Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2013). Sikap Sosial Masyarakat Di Kota Pontianak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sosiokonsepsia*, 18(03), 345–366.
- Rusyidi, B., Fedryansyah, M., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2019). Sikap Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Terhadap Strategi Koping Perempuan Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 45–60.
- Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2016). Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap Mahasiswa Program Studi Psikologi, Keperawatan dan Kesejahteraan Sosial terhadap Perempuan Korban Perkosaan. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 4(3), 236–247. <https://doi.org/10.24198/jkp.v4n3.3>
- Statistics Indonesia. (2017). *Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/03/30/1375/satu-dari-tiga-perempuan-usia-15---64-tahun-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selama-hidupnya.html>
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kehadiran Ayah dalam Pengasuhan Mengurangi Kenakalan Remaja: Studi Kasus pada Narapidana Anak

Father's Existence in Parenting to Reduce Juvenile Delinquency: Case Study of Child Prisoner

Tiaradiqta Rizky Asharia Putri¹, Mentari Anugrah Imsa², dan Alfiasari³

¹Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
Jalan Lingkar Kampus IPB Dramaga, 16680, Bogor, Indonesia

Email : tiaradizky@gmail.com, mentarianugrahImsa@gmail.com, alfiasari@apps.ipb.ac.id

Naskah diterima 15 Maret 2021, Direvisi tanggal 24 Mei 2021, Disetujui tanggal 4 September 2021

Abstract

Crime committed by teenagers is closely related to juvenile delinquency. Juvenile delinquency can occur because their self-concept and self-control have not grown up optimally. In addition, juvenile delinquency can happen because of inappropriate parenting patterns. This study aims to analyse the characteristic of adolescents, self-concept, and self control of adolescents co-related to the parenting manner, especially father's role and juvenile delinquency behavior. Data were collected using a retrospective technique, which is a technique to obtain information about child and father relationship experiences. The research location and respondents as research samples were selected purposively. This research was conducted at one of the Child Development Offices (LPKA) in DKI Jakarta Province with a total of 55 juvenile detainees as respondents. Data collection was conducted by self-administered technique. The data were processed and analyzed descriptively and inferentially. The results show that there was a positive correlation between paternal parenting and adolescent self-concept and self-control; and adolescent self-control has a positive correlation with delinquency. These findings can be interpreted that in case of child prisoners, better paternal parenting increase the self-concept and self-control of the adolescents significantly. Better self-control encourages teenagers not to commit a delinquency. It shows that having close relationship and personal experience with father significantly improves self esteem and self-control of adolescents. They are able to control their behavior and not doing a negative thing. The results of this study recommend the government, especially the Ministry of Social Affairs, to provide counseling program for child prisoners and their parents particularly to build a better interactions and relationships between the children and their fathers. Counseling activities hopefully can reduce the criminal tendencies of the child prisoners.

Keywords: *adolescent's self-concept; adolescent's self-control; child prisoner; paternal parenting*

Abstrak

Kriminalitas yang dilakukan oleh remaja berhubungan erat dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi karena konsep diri dan pengendalian diri mereka belum berkembang optimal. Selain itu, kenakalan remaja dapat bersumber dari pola pengasuhan orang tua yang belum tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik remaja, konsep diri, dan kontrol diri remaja serta kaitannya dengan pengasuhan orang tua terutama ayah dan perilaku kenakalan yang pernah dilakukan tahanan anak. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik retrospektif yaitu teknik untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman masa lalu tahanan anak bersama ayah mereka. Lokasi penelitian dan responden sebagai sampel penelitian dipilih secara *purposive*. Penelitian ini dilakukan di salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 55 orang tahanan remaja. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *self-administered*. Data diolah dan dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat korelasi positif yang signifikan antara pengasuhan ayah dengan konsep diri dan kontrol diri remaja; dan kontrol diri remaja mempunyai korelasi positif signifikan dengan kenakalan. Temuan tersebut dapat dimaknai bahwa pada kasus tahanan remaja, pengasuhan ayah yang semakin baik berbanding lurus dengan semakin baiknya konsep diri dan kontrol diri para tahanan remaja. Kontrol diri yang semakin baik mendorong semakin rendahnya kenakalan yang dilakukan para tahanan remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting dalam meningkatkan konsep diri serta pengendalian diri remaja. Mereka jadi mampu mengurangi perilaku negatif. Hasil penelitian ini merekomendasikan pemerintah khususnya Kementerian Sosial

agar memberikan konseling kepada para narapidana anak dan orang tuanya khususnya ayah agar membangun interaksi dan relasi ayah dan anak yang lebih baik ke depannya. Kegiatan konseling diharapkan dapat mengurangi kecenderungan anak untuk melakukan tindakan kriminal di kemudian hari.

Kata Kunci: narapidana anak; konsep diri remaja; kontrol diri remaja; pengasuhan ayah

Pendahuluan

Kriminalitas di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun, juga dilakukan oleh anak remaja. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan remaja memiliki rentang usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 (Santrock, 2007). Lebih lanjut, kriminalitas yang dilakukan oleh anak menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum, baik sedang mengalami proses hukum maupun sudah memperoleh keputusan hukum (menjadi narapidana). Berdasarkan data resmi Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP) yang dapat diakses di <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, jumlah narapidana dan tahanan anak di Indonesia pada Desember tahun 2020 sebanyak 1.756 anak. Angka ini menurun dari data Desember tahun 2019 yang mencapai 2.052 anak dari 33 wilayah di Indonesia. Meskipun terdapat penurunan, narapidana anak tetaplah merupakan masalah serius yang memerlukan upaya preventif untuk dapat terus menekan angka narapidana anak di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum atau dikenal dengan ABH menurut Pasal 59 ayat (2) termasuk kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UUPA, perlindungan khusus bagi ABH dapat dilakukan dengan menjamin kehidupan anak dan salah satunya dilakukan melalui pendampingan orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak. Ketentuan tersebut mengindikasikan penanganan pada anak ABH yang telah memasuki ranah hukum atas tindakan kriminalnya perlu mempertimbangkan faktor keluarga dalam upaya perlindungannya.

Salah satu periode yang beresiko untuk terjadi kenakalan pada anak adalah periode remaja. Pada masa ini terjadi perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang lebih matang. Salah satunya ditandai dengan keseimbangan dan emosi yang kontradiktif sehingga muncul beberapa perubahan yang menandai perkembangan sosial dan emosi pada diri remaja. Hal ini mencakup bagaimana remaja meningkatkan usaha untuk memahami dan mencari jati dirinya (Santrock, 2011). Krisis identitas dan emosi yang kontradiktif tersebut dapat menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak remaja. Kenakalan anak remaja perlu diperhatikan karena saat ini perilaku-perilaku kenakalan remaja banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita, seperti perkelahian, membolos sekolah, memakai narkoba, mencuri, pergi ke luar rumah tanpa pamit, berkelahi dengan teman, seks bebas, dan perilaku kenakalan lainnya.

Perilaku kriminalitas pada remaja memiliki keterkaitan yang erat dengan kenakalan dan perilaku menyimpang (*deviance behaviour*) yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja merupakan kecenderungan untuk melakukan tindakan melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain (Muniriyanto & Suharman, 2014). Perilaku ini bermula dari perilaku negatif yang ringan seperti melanggar peraturan sekolah, tidak masuk sekolah, bolos sekolah, merokok, dan merusak hingga perilaku negatif yang berat seperti mencuri, merampok, menyalahgunakan zat kimia, memperkosa, dan memiliki senjata (Choon, Hasbulla, Ahmad, & Ling, 2013).

Faktor individu yang memengaruhi terjadinya kenakalan salah satunya adalah

konsep diri. Hasil penelitian Riskinayasari (2015) memperlihatkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan kenakalan remaja. Anak remaja yang memiliki gambaran individu yang buruk, baik dalam aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan moral dapat menyebabkan anak terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang. Konsep diri merupakan salah satu aspek yang penting bagi individu dalam berperilaku. Konsep diri didefinisikan sebagai totalitas dari pemikiran individu dan referensi mengenai dirinya sendiri sebagai objek (Hawkins, Mothersbaugh, & Best, 2007). Menurut (Maria, 2005), konsep diri yang negatif juga merupakan salah satu faktor kontribusi bagi kenakalan remaja. Ketika remaja memiliki konsep diri yang negatif maka dalam perkembangannya remaja melihat lingkungan, orang tua, dan kehidupan secara negatif. Lebih lanjut, konsep diri yang positif akan berdampak pada kemampuan remaja dalam menghadapi tuntutan yang diberikan oleh lingkungan. Remaja yang memiliki konsep diri yang positif akan cenderung memiliki kecerdasan emosi (Priatna, Latifah, & Johan, 2012) dan kemampuan strategi pengaturan diri dalam belajar (Situmorang & Latifah, 2014) yang lebih baik.

Faktor lain yang ditemukan dapat menyebabkan munculnya kenakalan dan perilaku menyimpang yang berasal dari diri remaja adalah ketidakmampuan remaja dalam proses mengontrol diri (*self-control*). Kontrol diri adalah kekuatan internal dalam diri seseorang untuk mengendalikan atau mengubah respon (emosi, tindakan, dan pikiran) serta kemampuan menahan diri dari tindakan yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan norma sosial seperti perilaku curang, perilaku kejahatan, dan perilaku kecanduan seperti merokok serta penggunaan obat-obatan terlarang (de Ridder, Mulders, Finkenauer, Stok, & Baumeister, 2012). Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa kontrol diri yang baik pada remaja dapat menurunkan

perilaku cyberbullying (Malihah & Alfiasari, 2018) meningkatkan karakter sopan santun (Farhatilwardah, Hastuti, & Krisnatuti, 2019).

Orang tua perlu bekerja sama untuk mendidik dan mengasuh anak dari lahir hingga dewasa. Penerapan pengasuhan yang tepat dari ayah dan ibu sangat diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak utamanya pada fase remaja. Keterlibatan ayah ataupun ibu memiliki urgensi tersendiri dalam pengasuhan. Namun, saat ini nilai dan norma yang berkembang di masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda. Ayah masih merasa tabu untuk mengurus anak. Ayah belum memahami bahwa perannya akan sangat berdampak bagi perkembangan anak sehingga lebih menyerahkan urusan mengasuh pada ibu (Abdullah, 2010). Padahal, satu hal yang perlu disadari adalah bahwa peran ayah dan ibu mempunyai pengaruh yang sama besarnya utamanya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar anak. Merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa hak anak meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang akan berujung pada anak berhadapan dengan hukum.

Lebih lanjut, hasil riset mengungkapkan bahwa ayah yang menjalankan peran pengasuhan secara optimal memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Ayah yang hangat mampu membuat anak lebih mudah menyesuaikan diri, lebih sehat secara moral, dan perkembangan intelektualnya lebih baik. Keterlibatan ayah dalam keluarga juga akan meningkatkan IQ anak. Di samping itu, anak akan lebih memiliki rasa humor, lebih percaya diri, dan mempunyai motivasi belajar (Millia, 2007).

Pengasuhan merupakan proses menginternalisasikan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan

sikap serta harapan yang akan membentuk kepribadian remaja. Proses internalisasi tersebut dapat menjadi standar remaja dalam berperilaku sehingga remaja memiliki perasaan bersalah dan malu yang menjadi bagian dari konsep diri dan kontrol diri. Remaja dengan kontrol diri tinggi akan merasa bersalah dan malu jika melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang sudah diinternalisasikan oleh orang tua. Selain itu, komunikasi dalam hubungan orang tua-remaja dapat memengaruhi kualitas pilihan remaja berkaitan dengan seks, penggunaan alkohol, pendidikan, dan perilaku yang sehat. Komunikasi yang kuat antara orang tua dengan remaja dapat memberikan dukungan ketika remaja mengatur atau mengontrol pilihan dan keinginannya sehingga melindungi remaja dari tekanan emosional dan perilaku kekerasan (Toombs, Bardzell, & Bardzell, 2014). Sebaliknya, remaja dengan kontrol diri dan konsep diri rendah akan sulit menghindari pengaruh negatif dari lingkungannya dan mudah terjerumus dalam kenakalan (Maximo et al., 2011).

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu mengidentifikasi karakteristik remaja dan keluarga, pengasuhan ayah, konsep diri, kontrol diri, dan kenakalan tahanan remaja; dan menganalisis hubungan pengasuhan ayah dengan konsep diri, kontrol diri, dan juga kenakalan remaja pada remaja-remaja yang waktu penelitian dilakukan berstatus tahanan anak di LPKA lokasi penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Provinsi DKI Jakarta merupakan lokasi penelitian yang dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan karena merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang memiliki angka kenakalan remaja terkategori tinggi dan berdampak pada penambahan jumlah kelompok tahanan remaja. Penelitian dilakukan di salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Provinsi DKI Jakarta.

Partisipan penelitian ini adalah seluruh tahanan remaja di LPKA terpilih yang berusia 14-18 tahun. Jumlah populasi pada LPKA lokasi penelitian sebanyak 55 orang. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian, yaitu *purposive sampling* yang merupakan salah satu jenis *nonprobability sampling* dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga tahanan remaja. Remaja yang dipilih sebagai responden penelitian adalah tahanan remaja yang tinggal bersama ayah kandungnya sebelum masuk LPKA. Adapun proses pemilihan responden yaitu menggunakan prakuesioner yang dibagikan kepada seluruh tahanan remaja. Pada prakuesioner tersebut terdapat pertanyaan mengenai nama, umur, jenis kelamin, dan pilihan bahwa tahanan remaja tersebut diasuh oleh ayah kandungnya atau tidak sebelum masuk LPKA. Berdasarkan hasil prakuesioner tersebut, total jumlah responden yang diteliti adalah sebanyak 55 tahanan remaja.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui *self-administered* oleh tahanan remaja menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Data primer yang diambil antara lain: karakteristik remaja, keluarga, pengasuhan ayah, konsep diri, kontrol diri, dan kenakalan remaja.

Data primer pengasuhan ayah diperoleh dengan menggunakan instrumen *The Fatherhood Scale* yang dikembangkan oleh Dick (2004) dengan nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,950. Kuesioner ini berjumlah 64 butir pernyataan dan diukur menggunakan skala *Likert* yang dimulai dari 1=tidak pernah; 2=jarang; 3=kadang-kadang; 4=sering; dan 5=selalu. Data konsep diri remaja didapatkan dengan menggunakan instrumen *Adolescents Self-concepts Short Scale* yang dikembangkan oleh Veiga dan Leite (2016) yang terdiri dari 30 pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang dimulai dari 1=sangat tidak setuju; 2=tidak setuju; 3=cenderung tidak setuju daripada setuju; 4=cenderung setuju daripada tidak setuju; 5=setuju; serta 6=sangat

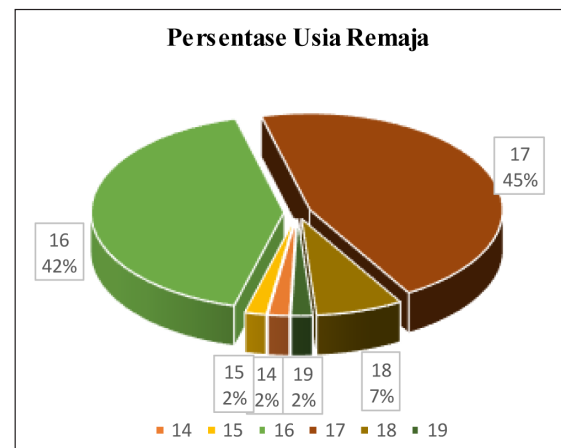
setuju. Instrumen ini memiliki *Cronbach's alpha* sebesar 0,844. Data kontrol diri remaja didapatkan menggunakan instrumen *Self-Control Scale* yang dikembangkan oleh Tangney, Baumeister, dan Boone (2004). Instrumen pengukuran kontrol diri terdiri dari 36 butir pernyataan. Skala jawaban menggunakan skala *Likert* yang dimulai dari 1=sangat tidak menggambarkan saya, 2=tidak menggambarkan saya, 3=kadang-kadang menggambarkan saya, 4=benar menggambarkan saya, hingga 5=sangat benar menggambarkan saya. Nilai *Cronbach's alpha* instrumen kontrol diri sebesar 0,830. Data kenakalan remaja didapatkan dengan menggunakan instrumen *Adoption Self Report Delinquency Scale* yang dikembangkan oleh Carroll, Durkin, dan Houghton (1996) yang kemudian dimodifikasi oleh (Pechorro, Vieira, Maroco, Barroso, dan Goncalves (2015). Kuesioner ini terdiri dari 35 pernyataan yang memiliki *Cronbach's alpha* sebesar 0,908 dan diukur menggunakan skala *Likert* yang dimulai dari 0=tidak pernah; 1=kadang-kadang; 2=sering.

Data yang berhasil didapatkan diolah melalui proses *editing, coding, input data, cleaning data*, dan analisis data. Data diolah dengan statistik deskriptif mencakup penilaian nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi indeks. Selain itu, juga dilakukan uji korelasi Pearson untuk menjawab tujuan penelitian. Aplikasi yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data adalah *Microsoft Excel* dan *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Remaja dan Keluarga:

Penelitian ini melibatkan 55 tahanan remaja di LPKA dengan komposisi 50 remaja laki-laki (90.9%) dan 5 remaja perempuan (9.1%). Usia remaja berada dalam interval mulai 14 tahun hingga 19 tahun dengan rata-rata usia remaja 16,6 tahun. Proporsi terbesar remaja berusia 16 tahun (41,8%) dan 17 tahun (45,5%) pada (Gambar 1).



Gambar 1. Sebaran Remaja Berdasarkan Usia

Penelitian ini juga mengidentifikasi jenis kenakalan yang dilakukan remaja sebelum masuk LPKA (Tabel 1). Hasil menunjukkan bahwa kenakalan yang memiliki indeks tertinggi adalah kenakalan di sekolah.

Tabel 1
Nilai Minimum, Maksimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Indeks Kenakalan Remaja

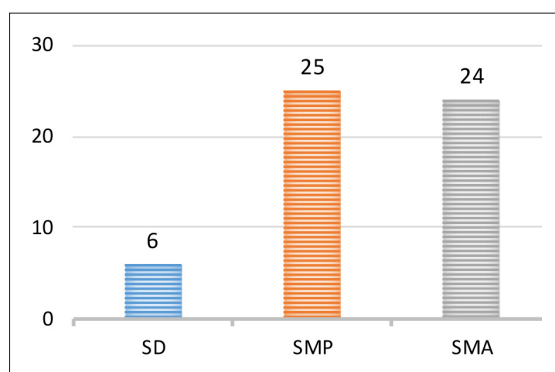
Dimensi Kenakalan Remaja	Min-Max	Rata-Rata± Standar Deviasi
Pencurian dan perampokan	0-70	18,2±18,6
Kejahatan di jalan	0-92	31,7±24,6
Alkohol dan narkoba	0-92	37,9±26,4
Agresi	0-100	24,8±26,7
Perusakan	0-58	17,6±16,2
Kenakalan di sekolah	0-100	41,5±29,6
Mengganggu masyarakat	0-100	28,5±21,9
Kenakalan Remaja Total	0-68,6	28,0±16,4

Sumber: Data Primer Penelitian

Selain itu, jenis kenakalan yang memiliki indeks tertinggi sesudah kenakalan di sekolah adalah kenakalan yang terkait dengan narkoba dan alkohol serta kejahatan di jalanan. Temuan ini tentunya menarik mengingat penelitian ini dilakukan di LPKA yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini menegaskan ketiga

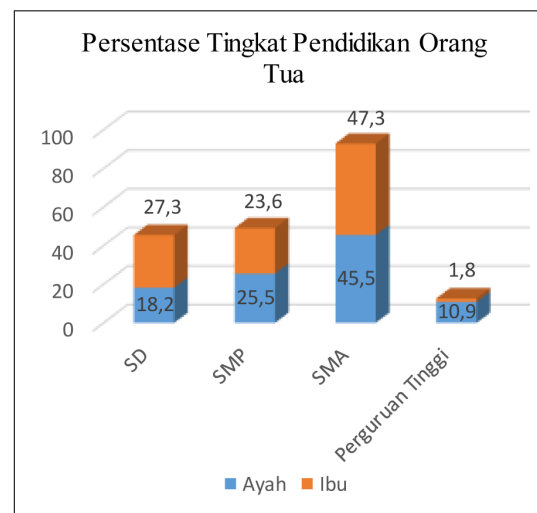
kenakalan tersebut adalah kenakalan yang paling sering dilakukan oleh remaja yang menjadi tahanan anak di lokasi penelitian.

Sementara itu, hasil analisis data pendidikan memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada level pendidikan SMP (45,5%) dan SMA (43,6%). Adapun rata-rata lama pendidikan yang diselesaikan oleh remaja sebelum masuk LPKA adalah 8,2 tahun (Gambar 2). Data tersebut menunjukkan bahwa isu pemenuhan hak pendidikan perlu mendapat perhatian khusus pada tahanan anak meskipun berstatus tahanan tetap memperoleh hak pendidikannya. Apabila dikaitkan dengan jenis kenakalan (Tabel 1), tingkat pendidikan para tahanan anak yang sebagian besar adalah SMA dan SMP sebelum masuk LPKA menegaskan jenis kenakalan yang paling banyak ditemukan pada penelitian ini, yaitu kenakalan di sekolah seperti tawuran antarsekolah.



Gambar 2. Sebaran Remaja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian terkait usia orang tua menemukan bahwa orang tua responden memiliki rata usia 46,49 tahun (ayah) dan 42,05 tahun (ibu). Rentang usia tersebut (41- 60 tahun) terkategori dewasa madya (Hurlock, 2003). Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa empat dari sepuluh ayah dan ibu responden memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA (Gambar 3) dan delapan dari sepuluh orang tua remaja masih dalam status menikah, sisanya sudah bercerai atau menikah lagi saat pengambilan data dilakukan.



Gambar 3. Sebaran Orang Tua berdasarkan Tingkat Pendidikan

Temuan ini menunjukkan bahwa para remaja yang melakukan tindak kriminal dan kemudian menjadi tahanan anak berasal dari keluarga dengan orang tua yang cukup berpendidikan. Bahkan satu dari sepuluh responden memiliki ayah dengan pendidikan dari perguruan tinggi (Gambar 3). Selanjutnya, data penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki ayah yang bekerja dengan besar pendapatan keluarga berkisar Rp521.001–Rp1.500.000 per bulan. Besar keluarga yang dimiliki remaja rata-rata terdiri dari lima orang dan terkategori keluarga sedang (5 s.d. 7 orang) (BKKBN, 2005).

Pengasuhan Ayah, Konsep Diri, Kontrol Diri, dan Kenakalan Tahanan Remaja:

Secara indeks total, kenakalan yang dilakukan oleh tahanan remaja sebelum masuk LPKA dalam penelitian ini memiliki capaian rata-rata skor indeks sebesar 27,40 dengan minimal skor sebesar 0 dan maksimal skor 68,57 (Tabel 2). Berdasarkan rata-rata nilai dimensi kenakalan, kenakalan yang paling banyak dilakukan oleh tahanan remaja sebelum masuk LPKA adalah kenakalan yang dilakukan di sekolah, seperti tawuran antarkelompok, diskors atau dikeluarkan dari sekolah, dan memukul orang lain. Sementara itu, dimensi yang paling jarang

dilakukan oleh tahanan remaja sebelum masuk LPKA adalah dimensi kerusakan, seperti merusak fasilitas umum dan merusak barang milik orang lain.

Selanjutnya pada variabel konsep diri, hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata konsep diri yang dicapai tahanan remaja sebesar 65,36 dengan minimal skor indeks sebesar 35,33 dan maksimal skor indeks sebesar 93,3 (Tabel 2). Konsep diri dalam penelitian ini merujuk pada gambaran tahanan remaja tentang dirinya dari berbagai aspek dengan menilai dari segi fisik, psikologis, sosial, etika-moral, dan status intelektual. Rentang konsep diri yang cukup lebar yang dimiliki oleh tahanan remaja yang menjadi responden penelitian ini menunjukkan bahwa ada tahanan remaja yang sangat negatif dalam memersepsikan konsep dirinya. Namun, ada juga yang sangat positif. Meskipun begitu, secara rata-rata angka 65,36 mengindikasikan bahwa konsep diri tahanan remaja dalam penelitian ini berada dalam kategori yang sedang.

Kontrol diri pada penelitian ini merupakan kemampuan remaja dalam mengendalikan dirinya yang ditunjukkan dalam performa kerja, perilaku impulsif, penyesuaian psikologis, hubungan interpersonal dan emosi moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontrol diri tahanan remaja adalah 58,25 dengan nilai terendah adalah 28,47 dan yang tertinggi adalah 90,27 (Tabel 2). Sama halnya dengan konsep diri, tahanan remaja pada penelitian ini juga berada dalam rentang yang lebar dari yang kontrol dirinya sangat rendah hingga kontrol dirinya sangat tinggi. Selain itu, nilai kontrol diri secara rata-rata masih jauh lebih rendah dibandingkan konsep dirinya. Hal ini tentu saja menjadi temuan yang menegaskan ditemukannya kontrol diri yang rendah pada remaja-remaja yang menjadi tahanan anak di LPKA.

Pada variabel pengasuhan ayah, rentang yang lebar dari persepsi pengasuhan ayah yang dirasakan remaja sangat buruk hingga

sangat baik terlihat juga dari nilai minimum (21,87) dengan nilai maksimum (90,62). Rata-rata indeks pengasuhan ayah berada pada nilai 64,11 (Tabel 2) yang menunjukkan pengasuhan ayah yang cukup baik meskipun masih belum baik sekali.

Tabel 2
Nilai Minimum, Maksimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Pengasuhan Ayah, Konsep Diri, Kontrol Diri Remaja, dan Kenakalan Remaja

Variabel	Mean $\pm$ STD	Min – Max
Pengasuhan Ayah	64,11 $\pm$ 17,73	21,87 – 90,62
Konsep Diri	65,36 $\pm$ 12,67	35,33 – 93,33
Kontrol Diri	58,25 $\pm$ 11,91	28,47 – 90,27
Kenakalan Remaja	27,40 $\pm$ 16,70	0,00 – 68,57

Sumber: Data Primer Penelitian

Pengasuhan Ayah dan Hubungannya dengan Konsep Diri, Kontrol Diri, dan Kenakalan Remaja: Hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan antara kontrol diri dengan kenakalan remaja ($\alpha < 0,01$) dengan koefisien korelasi -0.352. Hal ini bermakna bahwa kenakalan remaja yang dilakukan oleh para tahanan remaja yang mungkin menjadi penyebab remaja-remaja tersebut menjadi pelaku tindak kriminalitas akan dapat berkurang jika mereka memiliki kontrol diri yang tinggi. Masngudin (2003) menyatakan, ada tiga kategori kenakalan remaja, yaitu kenakalan biasa (bolos sekolah, berbohong, pergi ke luar rumah tanpa pamit, dan berkelahi), kenakalan yang menjurus pada kejahatan (berkendara tanpa SIM dan mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin), dan kenakalan khusus (penyalahgunaan NAPZA, pelecehan seksual, dan perampokan). Berdasarkan wawancara yang juga dilakukan kepada para tahanan remaja, mereka pernah terlibat pada tiga jenis kenakalan tersebut sebelum masuk LPKA. Jenis kenakalan yang paling sering dilakukan responden yaitu kenakalan di lingkungan sekolah (tawuran antarkelompok, memukul orang lain, diskors, hingga *drop out*).

Hasil yang tersaji pada Tabel 3 juga mengindikasikan bahwa pada penelitian yang dilakukan pada remaja yang menjadi tahanan anak ini; kontrol diri terlihat lebih memberikan hubungan yang nyata dengan kenakalan remaja dibandingkan konsep diri. Konsep diri tidak ditemukan adanya hubungan dengan kenakalan remaja. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin rendah konsep diri remaja akan meningkatkan kecenderungan remaja untuk melakukan kenakalan (Saefullah, 2016; Kholidah, 2016). Remaja yang merasa berharga atau memiliki konsep diri tinggi belum tentu tidak melakukan kenakalan. Konsep diri secara parsial tidak berhubungan dengan kenakalan remaja sebelum masuk LPKA. Konsep diri remaja yang tinggi kemungkinan akan berkonflik dengan kematangan emosi. Konsep diri yang tinggi dan tidak terkontrol akan menjadi tidak rasional. Kematangan emosi yang tidak mampu berperan mengendalikan konsep diri yang berkembang secara tidak rasional akan membelokkan arah hubungan kematangan emosi dengan kenakalan remaja (Muawanah, 2012).

Meskipun begitu, hubungan yang positif signifikan antara kontrol diri dengan konsep diri (Tabel 3) juga mengindikasikan bahwa

semakin baik remaja memiliki konsep diri yang positif maka semakin tinggi kontrol diri yang dimilikinya. Kontrol diri yang semakin tinggi inilah yang kemudian dapat membantu remaja untuk tidak melakukan kenakalan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel konsep diri dan kontrol diri dengan variabel pengasuhan ayah ($\alpha < 0,01$) dengan koefisien korelasi 0,580 dan 0,447 (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa pengasuhan ayah yang semakin baik dirasakan remaja memungkinkan memiliki anak remaja dengan konsep diri dan kontrol diri yang baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Dubowitz *et al.* (2001) yang mengungkapkan bahwa remaja yang memperoleh dukungan positif serta kasih sayang dari ayah maka konsep diri dan kontrol diri remaja akan semakin baik. Lebih lanjut, Abdullah (2009) juga menyatakan bahwa pengasuhan ayah melindungi anak dari perilaku kenakalan dan berhubungan dengan rendahnya penggunaan obat-obatan terlarang di masa remaja, perilaku membolos, mencuri, minum minuman keras, dan perilaku merusak. Hal ini menegaskan pentingnya kehadiran ayah dalam kehidupan anak melalui pengasuhan ayah yang positif.

Tabel 3
Hubungan antarvariabel

Variabel	Pengasuhan Ayah	Konsep Diri	Kontrol Diri Remaja	Kenakalan Remaja
Pengasuhan Ayah	1	0.580**	0.447**	-0.229
Konsep Diri		1	0.579**	-0.160
Kontrol Diri Remaja			1	-0.352**
Kenakalan Remaja				1

Keterangan: * signifikansi < 0,05; ** signifikansi < 0,01

Penutup

Keterbatasan Studi: Pemilihan contoh dalam penelitian ini dilakukan secara *nonprobability sampling* sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk semua remaja yang menjadi tahanan di LPKA. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan

metode *self-administered* terpimpin karena tidak dimungkinkan dilakukan wawancara per responden sehingga peneliti tidak dapat menangkap informasi-informasi yang lebih mendalam dari variabel penelitian yang diukur.

Kesimpulan: Penelitian ini melibatkan tahanan remaja sebagai responden berjumlah 55

orang dengan rata-rata usia 17 tahun. Rata-rata pendidikan responden adalah SMP/ sederajat. Mayoritas besar keluarga tahanan remaja pada penelitian ini terkategori ukuran sedang dengan anggota keluarga 5-7 orang.

Indeks pengasuhan ayah memiliki rata-rata skor sebesar 64,11 yang menunjukkan pengasuhan ayah masih belum baik. Selanjutnya, indeks konsep diri yang dimiliki tahanan remaja rata-rata sebesar 65,36 yang menunjukkan bahwa kecenderungan remaja juga belum memiliki konsep diri yang positif. Bahkan variabel kontrol diri memiliki rata-rata indeks paling rendah yaitu 58,25 yang menunjukkan rendahnya kontrol diri para tahanan remaja dalam penelitian ini. Kenakalan remaja yang dilakukan responden memiliki rata-rata sebesar 27,40.

Hasil uji korelasi menunjukkan remaja yang menjadi tahanan anak di dalam penelitian ini akan dapat memiliki kenakalan yang rendah apabila memiliki kontrol diri yang tinggi. Sementara itu, kontrol diri yang tinggi berhubungan nyata dengan semakin baiknya konsep diri remaja dan pengasuhan ayah yang dirasakan remaja. Konsep diri juga akan leboh baik dimiliki remaja yang memiliki pengasuhan ayah yang lebih baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengasuhan ayah akan dapat mengurangi kenakalan remaja karena ayah yang menerapkan pengasuhan yang baik akan dapat membentuk konsep diri dan kontrol diri yang lebih baik pada remaja. Konsep diri inilah yang akan menguatkan kontrol diri remaja dan pada akhirnya akan dapat menekan remaja untuk tidak melakukan kenakalan yang pada akhirnya akan membahayakan dirinya.

Rekomendasi: Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pengasuhan ayah yang diberikan kepada anak remajanya perlu ditingkatkan secara optimal dengan menggunakan waktu bersama secara efektif dan saling terbuka satu sama lain. Ayah perlu bekerja sama dengan ibu untuk memberikan pengasuhan yang tepat

bagi anak remajanya sehingga anak tumbuh dengan konsep diri yang positif dan mencegah anak melakukan kenakalan. Beberapa pemangku kepentingan terkait seperti LSM, sekolah, perguruan tinggi, dan pemerintah (Kementerian Sosial), dan sekolah diharapkan dapat memberikan penyuluhan terhadap orang tua mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan secara rutin dan menyeluruh sebagai upaya pencegahan kenakalan dan kriminalitas remaja yang semakin meningkat.

LPKA dan atau Panti Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Sosial diharapkan dapat meningkatkan usaha dalam melindungi dan mengayomi tahanan remaja dengan memisahkan lokasi pembinaan antara tahanan remaja dengan tahanan dewasa. Selain itu, mengadakan kegiatan penguatan modal sosial yang melibatkan partisipasi tahanan remaja secara aktif dalam meningkatkan konsep diri sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik setelah mereka keluar dari LPKA, Panti Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih mengeksplorasi variabel lain pada tahanan remaja, khususnya lingkungan sekitar anak remaja seperti teman sebaya atau lingkungan sekolah. Selain itu melakukan wawancara secara mendalam sehingga dapat menggambarkan keadaan tahanan remaja lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami ucapkan Kepada Allah Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka penelitian ini dapat selesai dilaksanakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Salemba Jakarta, dan Rumah Tahanan Kelas II Pondok Bambu Jakarta atas kerjasamanya dalam pengambilan data.

Pustaka Acuan

- Abdullah, S. M. (2010). Studi Eksplorasi Tentang Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini. *Spirits*, 1(1), 1–9.
- Muawanah, L. (2012). Kematangan Emosi, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/10.30996/persona.v1i1.9>
- Carroll, A, Durkin, K, Houghton, S, H. J. (1996). An Adaptation of Mak's Self-reported Delinquency Scale for Western Australian Adolescents. *Australian Journal of Psychology*, 48(1), 1–7.
- Choon, L. J., Hasbulla, M., Ahmad, S., Ling, W. S. (2013). Parental attachment, peer attachment, and delinquency among adolescents in Selangor, Malaysia. *Asian Social Science*, 9(15), 214–219.
- de Ridder, D. T. D., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2012). Taking Stock of Self-Control. *Personality and Social Psychology Review*, 16(1), 76–99. <https://doi.org/10.1177/1088868311418749>
- Dick, G. L. (2004). The fatherhood scale. *Research on Social Work Practice*, 14(2), 80–92.
- Dubowitz, H., Black, M. M., Cox, C. E., Kerr, M. A., Litrownik, A. J., Radhakrishna, A., ... & Runyan, D. K. (2001). Father involvement and children's functioning at age 6 years: A multisite study. *Child Maltreatment*, 6(4), 300–309.
- Farhatilwardah, F., Hastuti, D., & Krisnatuti, D. (2019). Karakter Sopan Santun Remaja: Pengaruh Metode Sosialisasi Orang Tua dan Kontrol Diri. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 12(2), 114–125. <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.114>
- Hawkins D, Mothersbaugh D, Best, R. (2007). *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*. McGraw-Hill.
- Hurlock, E. B. (2003). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.
- Kholidah, D. I. (2016). *Hubungan Konsep Diri dengan Kenakalan Remaja Penelitian Pada siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pakis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Malihah, Z., & Alfiasari, A. (2018). Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 11(2), 145–156. <https://doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.145>
- Maria, U. (2005). *Peran Persepsi Keharmonisan keluarga dan Konsep Diri Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*. Universitas Gadjah Mada.
- Masngudin. (2003). *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Perilaku Kekerasan Pada Pelajar*. Universitas Indonesia.
- Maximo, S. I., Tayaban, H. S., Cacadac, G. B., Cacanindin, M. J., Pugat, R. H., Rivera, M. F., Lingbawan, M. C. (2011). Parents' communication styles and their influence on the adolescents' attachment, intimacy and achievement motivation. *International Journal Of Bahavioral Science*, 6(1), 59–72.
- Millia, V. (2007). *Pengaruh kemampuan awal tentang akuntansi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muniriyanto & Suharman. (2014). Konsep diri, intensitas, komunikasi orangtua-anak dan kecenderungan perilaku seks pranikah. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(2).
- Pechorro, P., Vieira, R., Maroco, J., Barroso, R., & Goncalves, R. A. (2015). Adaptacao de uma versao portuguesa da Escala de Delinquencia Auto-Relatada Adaptada para adolescentes. *Revista Da Associacao Portuguesa de Psicologia*, 1(29), 59–67.
- Priatna, R. D., Latifah, M., & Johan, I. R. (2012). Konsep diri, kecerdasan emosional, tingkat stres, dan strategi koping remaja pada berbagai model pembelajaran. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 5(1), 48–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2012.5.1.48>
- Riskinayasari, G. (2015). *Kenakalan Remaja Ditinjau dari Konsep Diri dan Jenis Kelamin*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saefullah, N. H. (2016). Penyuluhan Mengenai RIKAS sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Kekerasan Antar Siswa di Sekolah Satu Atap Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan anak* (11th ed.). Erlangga.
- Santrock, J. W. (2011). *Masa perkembangan anak*. Salemba Humanika.
- Situmorang, Z. R. D., & Latifah, M. (2014). Pengaruh Dukungan Sosial, Konsep Diri, dan Strategi Pengaturan Diri dalam Belajar terhadap Prestasi Akademik. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 7(3), 154–163. <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.3.154>
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of Personality*, 72(2), 271–322.
- Toombs, A., Bardzell, S., & Bardzell, J. (2014). Becoming makers: Hackerspace member habits, values, and identities. *Journal of Peer Production*, 5(2014), 1–8.
- Veiga, F., & Leite, A. (2016). *Adolescents' self-concept short scale: A version of PHCSCS*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 217, 631–637.

Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas

The Effect of Smart Indonesia Program for Disabilities

Achmad Kautsar¹, Grace Wulandari², Jihan D.N³, Qori'atul Septiavin⁴, Ni Putu Mia Tarani⁵,
Amri Umu Amiroh⁶, Annisa Fitri⁷, dan Citra Kumala⁸

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, achmad.kautsar@universitaspertamina.ac.id, 085691001616

⁸Alumni University of Warwick, Coventry CV4 7AL (UK), citrakmla@gmail.com

Diterima 21 Juli 2021, diperbaiki 27 September 2021, disetujui 04 Oktober 2021

Abstract

People with disabilities are generally in a close position to poverty or trapped in so-called vicious cycle. One of the reasons is that because their education level is very low. This study aims to analyze factors that can increase the education level of the disabilities. This study uses four logit models that compare people with mild disabilities with severe disabilities. The logit model is used to analyze the probability of events. The results show that government subsidies in the education sector (PIP) have a significant positive effect on increasing the education level of the disabilities. The education inequality between urban and rural areas still occurs, the results show that the probability of individuals living in urban areas has a higher chance of going to school than rural areas. Increasing subsidies in the education sector is a solution to reduce the educational inequality between the disabilities and non-disabled persons. An equitable development of school buildings is needed to reduce the disparity between urban and rural areas.

Keywords: *disable; education; subsidy*

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki permasalahan dimana para penyandang disabilitas sangat dekat dengan kemiskinan atau terjebak dalam vicious cycle. Situasi tingkat pendidikan untuk kelompok para penyandang disabilitas sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi para penyandang disabilitas dapat meningkatkan tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan empat model logit yang membandingkan antara para penyandang disabilitas ringan dengan disabilitas berat. Model logit digunakan untuk menganalisis probabilitas kejadian. Hasil menunjukkan bahwa subsidi pemerintah di sektor pendidikan (PIP) memberikan dampak yang positif signifikan meningkatkan tingkat pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terjadi, hasil menunjukkan bahwa probabilitas individu yang tinggal di perkotaan memiliki peluang untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Peningkatan subsidi di sektor pendidikan menjadi solusi agar ketimpangan pendidikan antara para penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat diperkecil. Pemerataan gedung sekolah juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kata kunci: *disabilitas; pendidikan; subsidi*

Pendahuluan

Data WHO menunjukkan bahwa terdapat 2 sampai dengan 4 orang dari 100 orang dengan memiliki keterbatasan (disabilitas) (World Health Organization & World Bank, 2011). Penambahan populasi di Indonesia diiringi juga dengan meningkatnya jumlah individu yang memiliki keterbatasan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi disabilitas seperti kecelakaan, kekurangan

nutrisi ketika selama di dalam kandungan atau selama pertumbuhan balita. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016, jenis disabilitas dibagi dalam 4 kelompok, diantaranya adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

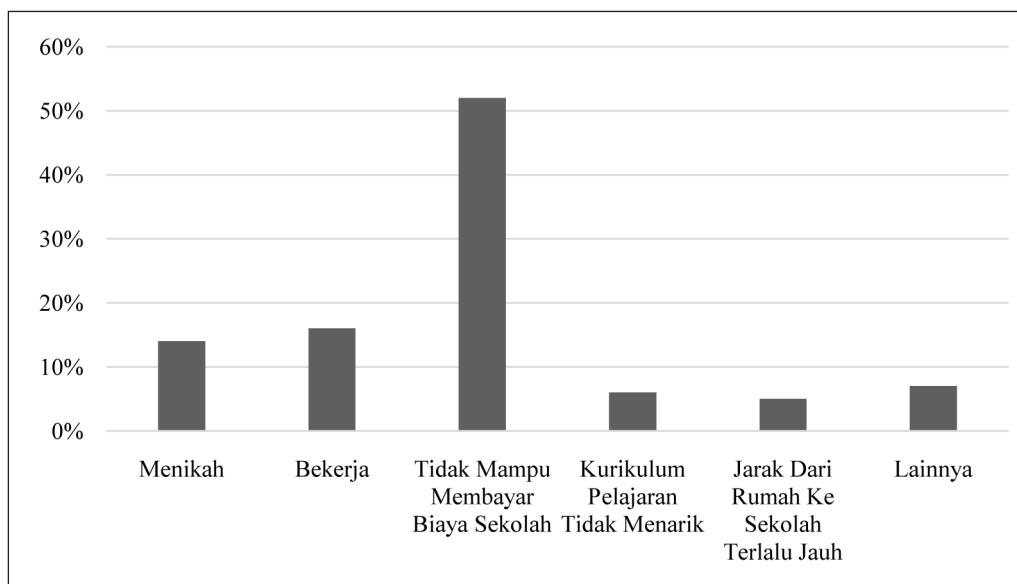
Data yang dipublikasikan oleh kementerian kesehatan menunjukkan bahwa persentase para penyandang disabilitas didominasi oleh anak-

anak dengan rentang usia 15 sampai dengan 17 tahun dengan mayoritas jenis kelamin pria lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan juga sebagian besar berada di wilayah perkotaan (Kementerian Kesehatan, 2019). Para penyandang disabilitas memiliki permasalahan tersendiri, dimana para penyandang disabilitas sangat dekat dengan kemiskinan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan para penyandang disabilitas masih berada pada kehidupan yang miskin adalah sulitnya mengakses pendidikan. Pada negara berkembang, tingkat pendidikan para penyandang disabilitas masih rendah (World Health Organization & World Bank, 2011).

Situasi tingkat pendidikan untuk kelompok para penyandang disabilitas pada tahun 2018 sangat rendah dengan nilai persentase tidak sekolah sebesar 30,7%, tidak tamat SD/MI sebesar 28,2%, sedangkan yang dapat menempuh hingga perguruan tinggi (Diploma) sebesar 17,6%. Pada sektor pekerjaan sebagian besar para penyandang disabilitas tidak bekerja dengan nilai persentase sebesar 26,7% (Kementerian Kesehatan, 2019). Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lamichhane & Okubo (2014) menghasilkan bahwa dibutuhkan investasi di bidang pendidikan untuk para penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan partisipasi di pasar tenaga kerja. Angka kemiskinan di Indonesia untuk rumah tangga bagi para penyandang disabilitas sebesar 2,4% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang bukan para penyandang disabilitas dan juga mendapatkan stigma sehingga adanya ketidaksetaraan untuk mengakses fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan (UNICEF, 2020). Rendahnya pendidikan yang dialami oleh para penyandang disabilitas mengakibatkan para penyandang disabilitas terjebak dalam *vicious cycle*.

Pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi untuk pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu faktor penyebab putusnya sekolah adalah faktor ekonomi sehingga tidak mampu membayar sekolah, adanya Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).



Gambar 1. Alasan Tidak Sekolah

Sumber: Survei UNICEF, 2016

Data survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa persentase siswa sekolah di Indonesia mengalami putus sekolah dikarenakan tidak mampu membayar biaya sekolah dengan nilai persentase 52%, diikuti oleh karena bekerja dan menikah dengan nilai persentase masing-masing 16% dan 14%. Faktor penyebab putus sekolah menurut Kementerian PPPA, terdapat tujuh alasan, diantaranya adalah pertama, bekerja/ mencari nafkah dengan persentase 15,06%, kedua menikah/ mengurus rumah tangga 7,52%, ketiga pendidikan cukup 4,9%, keempat malu karena ekonomi 2,11%, kelima karena sekolah jauh 3,1%, keenam dikarenakan cacat/disabilitas 4,56%, dan ketujuh karena faktor lainnya 26,84% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Menurut Avon & Loprest (2012) pendidikan sangat penting untuk anak-anak meskipun anak tersebut memiliki keterbatasan (disabilitas). Penelitian mengenai disabilitas masih sedikit dilakukan, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan menganalisis dampak dari Program Indonesia Pintar (PIP) khususnya bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari subsidi pemerintah di bidang pendidikan pada Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap angka partisipasi sekolah bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini juga memasukkan variabel lainnya yang dapat memengaruhi individu untuk bersekolah, seperti faktor jenis kelamin dan demografi.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa. Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilakukan sejak tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 2 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar merupakan implementasi dari instruksi Presiden yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Sasaran dari Program Indonesia Pintar (PIP) adalah siswa yang berasal dari keluarga yang tergolong miskin atau tidak mampu. PIP merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Adanya PIP diharapkan para siswa miskin dapat menempuh wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan dengan wajib belajar 12 tahun. Kelompok prioritas yang akan mendapatkan PIP diantaranya:

1. Peserta didik memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar)
2. Peserta didik berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau pertimbangan khusus
 - a) Peserta didik merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b) Peserta didik pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - c) Peserta didik berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan
 - d) Peserta didik terkena dampak bencana alam
 - e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah
 - f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Pemanfaatan dana PIP bertujuan untuk membantu biaya peserta didik agar dapat melanjutkan sekolah sampai dengan ke tingkat pendidikan menengah. Selain itu, pemberian bantuan melalui PIP merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisikan bahwa dana untuk pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dana PIP yang diberikan oleh pemerintah meliputi biaya buku dan alat tulis, pakaian seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, biaya kursus, dan biaya praktik tambahan. Berdasarkan variabel dana PIP yang diberikan oleh pemerintah diharapkan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah sehingga indeks pembangunan manusia di Indonesia juga akan meningkat.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya ketidakcukupan untuk mengakses pendidikan (Mont & Cuong, 2011). Pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan akan meningkatkan probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, tingkat pendidikan para penyandang disabilitas cukup rendah, data statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para penyandang disabilitas sebagian besar tidak tamat SD dan lulusan SD (Kementerian Kesehatan, 2019). Hal ini yang menyebabkan para penyandang disabilitas erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan (Braithwaite & Mont, 2009; Elwan, 1999; Hoogeveen, 2005; Yeo & Moore, 2003). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Filmer (2008) pada 13 negara berkembang menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas berada pada kondisi miskin dan sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain (United Nations, 2006).

Pemerintah telah mengatur mengenai pendidikan inklusif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Memiliki

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Berdasarkan teori sumber daya manusia, memberikan sebuah indikasi bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi sebuah inisial meningkatkan pendapatan (Yang & Qiu, 2016). Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah bagi seseorang yang menyandang disabilitas mengakibatkan pada tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas juga rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2015) menghasilkan bahwa pendidikan merupakan cara yang efektif untuk mengurangi ketimpangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari Program Indonesia Pintar (PIP), status sosial ekonomi, dan faktor demografi terhadap probabilitas partisipasi sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan model probit. Model probit digunakan untuk menganalisis probabilitas kejadian, hal ini dikarenakan variabel dependen yang digunakan adalah *binary variable*. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Maret 2019. Interpretasi hasil dari logit menggunakan *marginal effect* agar memudahkan dalam menganalisis sehingga hasil dari *marginal effect* merupakan nilai persentase dari sebuah koefisien. Terdapat dua model di dalam penelitian ini:

1. Model pertama dengan individu berumur 6 tahun sampai dengan 17 tahun, variabel yang akan dianalisis adalah probabilitas kejadian yang memengaruhi partisipasi sekolah
 - a) $Partisipasi\ Sekolah_i = \beta_0 + \beta_1 jenis\ kelamin_i + \beta_2 urban_i + \beta_3 \ln\ pengeluaran_i + \beta_4 disabilitas\ berat_i + \beta_5 disabilitas\ berat\ pip_i (1)$
 - b) $Partisipasi\ Sekolah_i = \beta_0 + \beta_1 jenis\ kelamin_i + \beta_2 urban_i + \beta_3 \ln\ pengeluaran_i + \beta_4 disabilitas\ ringan_i + \beta_5 disabilitas\ ringan\ pip_i (2)$

2. Model kedua dengan individu berumur 18 tahun sampai dengan 65 tahun, variabel yang akan dianalisis adalah probabilitas kejadian yang memengaruhi individu menamatkan sekolah sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

$$a) \text{ Tamat SMA}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ jenis kelamin}_i + \beta_2 \text{ urban}_i + \beta_3 \ln \text{ pengeluaran}_i + \beta_4 \text{ disabilitas berat}_i + \beta_5 \text{ disabilitas berat}_i \quad (3)$$

$$b) \text{ Tamat SMA}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ jenis kelamin}_i + \beta_2 \text{ urban}_i + \beta_3 \ln \text{ pengeluaran}_i + \beta_4 \text{ disabilitas ringan}_i + \beta_5 \text{ disabilitas ringan}_i \quad (4)$$

Pengukuran Disabilitas

Pengukuran disabilitas cukup kompleks dan banyak cara untuk mengukurnya. Survei untuk mengukur seseorang termasuk kedalam kategori penyandang disabilitas atau tidak dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari Susenas. Pertanyaan pada kuesioner untuk para penyandang disabilitas dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Contoh Pertanyaan Kuesioner

Definisi Disabilitas
Frase pengantar: Pertanyaan berikutnya menanyakan tentang kesulitan yang mungkin Anda miliki dalam melakukan sesuatu kegiatan karena MASALAH KESEHATAN - Apakah Anda mengalami kesulitan melihat, meskipun memakai kacamata? - Tidak – tidak ada kesulitan - Ya – beberapa kesulitan - Ya – banyak kesulitan - Tidak bisa sama sekali Pertanyaan yang tersisa memiliki kategori respons yang sama: - Apakah Anda mengalami kesulitan mendengar meskipun menggunakan alat bantu dengar? - Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan atau menaiki tangga? - Apakah Anda mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi? - Apakah Anda mengalami kesulitan (dengan perawatan diri seperti) mencuci seluruh tubuh atau berpakaian? Menggunakan bahasa (adat) Anda yang biasa, apakah Anda mengalami kesulitan berkomunikasi, misalnya mengerti atau dimengerti? Penyandang disabilitas berat = 1, jika responden menjawab banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali dan lainnya = 0 Penyandang disabilitas ringan = 1, jika responden menjawab beberapa kesulitan atau banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali, dan lainnya = 0

Sumber: Washington Group 2008, Mont & Cuong (2011)

Data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2019 dengan mengambil pertanyaan keterangan gangguan fungsional. Pertanyaan mengenai keterangan gangguan fungsional yang terdapat pada Susenas mengacu pada Washington Group. Tabel 1 merupakan contoh pertanyaan yang digunakan pada kuesioner Susenas. Seseorang dikategorikan penyandang disabilitas berat apabila responden menjawab banyak kesulitan

atau tidak bisa sama sekali dan responden dikategorikan disabilitas ringan jika responden menjawab pertanyaan beberapa kesulitan atau banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali.

Deskripsi Variabel

Tabel di bawah ini akan menggambarkan situasi variabel yang akan diteliti dengan data yang bersumber dari Susenas tahun 2019. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian

ini yang termasuk ke dalam kategori dan non-kategori. Kategori variabel adalah partisipasi sekolah, tamat sekolah sampai dengan jenjang menengah atas, para penyandang disabilitas, penerima PIP, jenis kelamin, dan wilayah

tempat tinggal. Variabel nonkategori adalah pengeluaran. Rentang umur yang digunakan dalam penelitian antara 6 tahun sampai dengan 65 tahun.

Tabel 2
Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi	Rata-Rata	Persentase
Partisipasi Sekolah	1: Bersekolah 0: Lainnya		1: 27,04% 0: 72,96%
Tamat Pendidikan <i>Secondary School</i>	1: <i>Secondary School</i> 0: Lainnya		1: 42,03% 0: 57,97%
Disabilitas Berat	1: Disabilitas berat 0: Lainnya		1: 1,69% 0: 98,31%
Disabilitas BeratPIP	1: Disabilitas berat penerima PIP 0: Lainnya		1: 0,02% 0: 99,98%
Jenis Kelamin	1: Pria 0: Lainnya		1: 50,43% 0: 49,57%
Umur (6-65 tahun)	Rata-rata umur responden	16 tahun	
Wilayah	1: Perkotaan 0: Lainnya		1: 56,27% 0: 43,73%
Total Pengeluaran per bulan	Logaritma pengeluaran per bulan	Rp. 4.927.169	
Disabilitas Ringan	1: Penyandang disabilitas ringan 0: Lainnya		1: 7,79% 0: 92,21%
Disabilitas RinganPIP	1: Disabilitas ringan penerima PIP 0: Lainnya		1: 0,07% 0: 99,93%

Sumber: Susenas,2019 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden tidak bersekolah dengan nilai persentase sebesar 72,96%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Variabel lainnya yang cukup menarik adalah variabel para penyandang disabilitas yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), persentase yang mendapatkan subsidi dari pemerintah tersebut sebesar 0,02% untuk penyandang disabilitas dan untuk para penyandang disabilitas yang tergolong ringan sebesar 0,07%. Jika dibandingkan nilai persentase yang mendapatkan PIP dengan nilai persentase para penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas ringan tidak proporsional, hal ini menunjukkan masih

terdapat tidak adanya pemerataan dalam pemberian PIP. Pada variabel umur, rata-rata umur responden adalah 16 tahun dengan tingkat pengeluaran per bulan rata-rata sebesar Rp. 4.927.269. Pada variabel tempat tinggal, rata-rata responden sebagian besar berada di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan dengan nilai persentase masing-masing sebesar 56,27% dan 43,73%. Pada tingkat pendidikan, persentase responden yang menamatkan sampai dengan ke jenjang sekolah menengah sebesar 42,03%.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pada Tabel 3, menunjukkan perbandingan hasil dari beberapa model. Terdapat empat kategori model diantaranya

pada model 1 dan model 2 menggunakan umur 6 tahun sampai dengan 21 tahun dengan variabel dependen menggunakan partisipasi sekolah. Kedua model tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada model 1 menggunakan variabel disabilitas dan model 2 menggunakan variabel

disabilitas ringan. Pada model 3 dan 4 umur yang digunakan antara umur 18 tahun sampai dengan 62 tahun dengan variabel dependen individu yang menamatkan sampai dengan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 3
Hasil *Marginal Effect*

VARIABEL	Model (1)	Model (2)	Model (3)	Model (4)
	Umur 6-21 Tahun Partisipasi Sekolah	Umur 6-21 Tahun Partisipasi Sekolah	Umur 18-62 Tahun Menamatkan SMA	Umur 18-62 Tahun Menamatkan SMA
Disabilitas Berat	-0,165*** (0,000465)		-0,232*** (0,000295)	
Jenis Kelamin	-0,0143*** (9,67e-05)	-0,0146*** (9,67e-05)	0,0654*** (7,51e-05)	0,0619*** (7,48e-05)
Wilayah	0,0199*** (0,000101)	0,0204*** (0,000101)	0,116*** (7,71e-05)	0,114*** (7,67e-05)
Log (Pengeluaran)	0,0376*** (8,24e-05)	0,0379*** (8,23e-05)	0,0530*** (6,06e-05)	0,0487*** (6,05e-05)
Disabilitas Berat PIP	0,360*** (0,00263)		0,528*** (0,00633)	
Disabilitas Ringan		-0,129*** (0,000302)		-0,216*** (0,000131)
Disabilitas Ringan PIP		0,354*** (0,00169)		0,594*** (0,00464)

Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan pada keempat model. Tujuan dibuatnya kategori sampai dengan 4 perbedaan model untuk menganalisis dari setiap perbedaan peluang antara individu disabilitas dengan individu yang termasuk disabilitas ringan. Hasil dari model logit yang digunakan merupakan hasil *marginal effect* untuk memudahkan interpretasi dari setiap variabel.

Penyandang Disabilitas Berat dan Penyandang Disabilitas Ringan

Variabel individu yang memiliki disabilitas dan disabilitas ringan memiliki hubungan probabilitas untuk berpartisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan dengan individu yang tidak disabilitas. Pada variabel individu dengan

disabilitas memiliki probabilitas lebih rendah untuk partisipasi sekolah rata-rata sebesar 16,5% dibandingkan dengan individu yang tidak disabilitas. Hasil tersebut juga diikuti dengan individu yang termasuk kedalam disabilitas ringan memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk berpartisipasi sekolah rata-rata sebesar 12,9%. Terdapat perbandingan yang berbeda antara para penyandang disabilitas berat dengan disabilitas ringan, yaitu sebesar 3,6%, para penyandang disabilitas ringan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berpartisipasi sekolah. Pendidikan menjadi hal yang penting untuk terlepas dari *vicious cycle* yang terjadi pada para penyandang disabilitas. Tingkat probabilitas yang rendah untuk berpartisipasi sekolah menjadi faktor para penyandang disabilitas masih berada dalam kemiskinan.

Para penyandang disabilitas mungkin memiliki kehidupanyang tidak lebih baik dibandingkan anggota rumah tangga lainnya dalam indikator seperti malnutrisi dan akses ke pendidikan (L.M. Banks & Zuurmond, 2015; Lena Morgon Banks et al., 2017; Kuper et al., 2015)

Penyebab terbatasnya mengakses ke pendidikan menyebabkan para penyandang disabilitas tidak dapat menempuh pendidikan tinggi. Hasil pada kategori 3 dan 4 memiliki hasil yang negatif, para penyandang disabilitas berat memiliki peluang untuk menamatkan sekolah menengah lebih rendah rata-rata sebesar 23,2%, dan para penyandang disabilitas ringan memiliki probabilitas lebih rendah untuk menempuh sekolah menengah rata-rata sebesar 21,6% dibandingkan dengan individu yang nondisabilitas. Timbulnya disabilitas pada individu menyebabkan individu tersebut memiliki standar hidup yang lebih rendah sehingga berdampak buruk terhadap tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan, dan pendapatan yang rendah (Mitra et al., 2013). Faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya pendidikan para penyandang disabilitas di Indonesia disebabkan kurangnya gedung sekolah yang dapat mendukung, sebagai contoh sekolah-sekolah yang bertingkat masih tidak terdapat atau kurangnya lift. Lift sangat diperlukan di sekolah yang bertingkat bagi para penyandang disabilitas. Selain itu, jumlah sekolah untuk para penyandang disabilitas masih sangat sedikit, adanya perbedaan dengan para penyandang disabilitas menyebabkan para penyandang disabilitas tidak dapat menempuh pendidikan yang tinggi.

Program subsidi dari pemerintah berupa PIP, para penyandang disabilitas sangat terbantu untuk meningkatkan pendidikannya. Berdasarkan hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa para penyandang berat dan ringan memiliki dampak yang positif pada keempat model. Nilai probabilitas para penyandang disabilitas yang mendapatkan PIP untuk berpartisipasi sekolah rata-rata sebesar 36%

untuk kategori disabilitas berat dan 35,4% untuk kategori disabilitas ringan. Di sisi lain, probabilitas para penyandang disabilitas yang mendapatkan PIP diprediksi memiliki dampak positif untuk menempuh sekolah menengah. Hasil probabilitas para penyandang disabilitas untuk menempuh sekolah menengah, rata-rata sebesar 52,8% untuk para disabilitas berat dan 59,4% untuk para penyandang disabilitas ringan. Bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para penyandang disabilitas cukup efektif. Anak dengan disabilitas termasuk kedalam kelompok yang terdampak dari kemiskinan sehingga diperlukan intervensi yang efektif untuk melawan kemiskinan (UNICEF, 2020). Diperlukan serangkaian kebijakan sosial yang luas dan terarah termasuk kebijakan pendidikan untuk mengurangi kemiskinan karena pendidikan dan pelatihan memiliki dampak langsung kepada masyarakat (Mihai et al., 2015).

Wilayah dan Jenis Kelamin

Hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi bersekolah dan juga menamatkan sekolah menengah. Keempat model menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas sampai dengan 11,6%. Pada model pertama dan ketiga dengan menggunakan variabel disabilitas berat sebagai variabel kontrol, wilayah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menempuh pendidikan dibandingkan wilayah pedesaan, masing-masing dengan nilai probabilitas 1,9% dan 11,6%. Pada model kedua dan keempat dengan menggunakan variabel kontrol para penyandang disabilitas ringan memiliki dampak yang sama, yaitu wilayah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menempuh pendidikan dibandingkan wilayah pedesaan dengan nilai probabilitas masing-masing 2,04% dan 11,4%. Hal ini dapat disebabkan infrastruktur di wilayah perkotaan lebih mendukung dibandingkan di wilayah pedesaan sehingga akses menuju ke sekolah lebih

mudah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat kesenjangan Angka Partisipasi Kasar (APK) antara kota dan desa pada pendidikan usia dini sebesar 38,54% dan 36,29% meskipun persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan Angka Kesiapan Sekolah (AKS) persentase kesenjangan antara kota dan desa masing-masing sebesar 80,11% dan 69,15% (BPS, 2020). Penurunan persentase menjadi sebuah tanda bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan pendidikan antara kota dan desa.

Pada variabel jenis kelamin di model pertama dan kedua, menunjukkan bahwa probabilitas pria untuk partisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan dengan wanita dengan nilai probabilitas rata-rata sebesar 1,4%. Sedangkan pada model ketiga dan keempat nilai probabilitas pria untuk menamatkan sampai dengan jenjang ke sekolah menengah lebih besar dibandingkan dengan wanita dengan nilai probabilitas rata-rata 6%. Alasan probabilitas wanita lebih tinggi untuk partisipasi sekolah dibandingkan dengan pria dapat disebabkan sebagian besar disibukkan untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mwachofi (2009) menghasilkan bahwa pendidikan wanita lebih baik dibandingkan pria meskipun tidak menjamin mendapatkan pendapatan atau pekerjaan yang lebih baik dibandingkan pria. Sedangkan probabilitas untuk menempuh sampai dengan jenjang sekolah menengah probabilitas pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dapat disebabkan oleh masyarakat di Indonesia masih menganut sistem patriarki. Pria merupakan sentral dari dalam kepemimpinan sehingga terdapat diskriminasi terhadap wanita. Hal ini yang akan berdampak pada perbedaan tingkat pendidikan antara pria dan wanita. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS persentase peserta didik masih didominasi jenis kelamin pria (BPS, 2020).

Pengeluaran

Variabel pengeluaran pada Tabel 3 menghasilkan hubungan yang positif antara pengeluaran terhadap pendidikan. Pada keempat model tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga dapat memberikan dampak kenaikan partisipasi sekolah dan menempuh pendidikan menengah. Probabilitas peningkatan partisipasi sekolah jika rumah tangga meningkatkan pengeluarannya rata-rata sebesar 3,7% (model 1 dan model 2). Pada model 3 dan model 4 juga memberikan dampak yang positif signifikan dengan masing-masing memiliki nilai probabilitas 5,3% dan 4,8%. Keterbatasan dari hasil ini tidak menunjukkan secara detail jenis pengeluaran yang dikeluarkan. Penghitungan pada variabel pengeluaran berdasarkan pengeluaran konsumsi dan nonkonsumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, semakin tinggi pengeluaran menandakan bahwa rumah tangga tersebut termasuk kedalam kategori rumah tangga mampu. Artinya, rumah tangga tersebut tergolong rumah tangga mampu (tidak miskin) probabilitas untuk menempuh pendidikan semakin tinggi. Proporsi kenaikan pengeluaran pada rumah tangga akan diikuti dengan meningkatnya proporsi pengeluaran untuk pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizk & Owusu-Afriyie (2014) melaporkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan anak meningkat secara signifikan dengan meningkatnya tingkat pendapatan rumah tangga. Penelitian lainnya menghasilkan bahwa pendapatan rumah tangga berdampak pada tingginya pengeluaran terhadap pendidikan (Qian & Smyth, 2011).

Penutup

Kesimpulan: Hasil dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan pendidikan antara para penyandang disabilitas dan nondisabilitas. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi memiliki pengaruh dan faktor demografi dapat mempengaruhi probabilitas

partisipasi sekolah. Semakin tinggi status sosial ekonomi, berdampak pada semakin tinggi probabilitas untuk bersekolah dan individu yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk bersekolah.

Subsidi PIP yang diberikan kepada para penyandang disabilitas memberikan dampak yang positif signifikan. PIP diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan khususnya kepada para penyandang disabilitas. Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa tidak secara spesifik berapa proporsi pengeluaran untuk pendidikan sehingga hasil yang analisis yang dihasilkan berupa prediksi probabilitas kejadian.

Rekomendasi: Pemerintah sebaiknya meningkatkan subsidi untuk para penyandang disabilitas. Hasil menunjukkan bahwa subsidi pemerintah khususnya sektor pendidikan (PIP) memberikan dampak yang positif signifikan. Persentase PIP untuk para penyandang disabilitas masih sangat kecil sehinggalah ini yang menyebabkan para penyandang disabilitas masih berada dalam kemiskinan. Selain itu, para penyandang disabilitas diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas layanan publik. Sebagian besar gedung-gedung sekolah tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas, seperti tidak tersedianya tangga atau lift khusus para penyandang disabilitas. Sebaiknya pemerintah menyediakan fasilitas yang ramah untuk para penyandang disabilitas atau membuat kebijakan bahwa setiap gedung sekolah memberikan fasilitas khusus kepada para penyandang disabilitas, seperti tangga khusus, parkir kendaraan khusus, atau lift khusus.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari dukungan penuh

Universitas Pertamina yang telah memberikan fasilitas-fasilitas agar penelitian ini dapat berjalan. Kontribusi dari para mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini juga sangat membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Pustaka Acuan

- Abdullah, A., Doucouliagos, H., & Manning, E. (2015). Does education reduce income inequality? A meta-regression analysis. *Journal of Economic Surveys*, 29(2), 301–316. <https://doi.org/10.1111/joes.12056>
- Avon, L., & Loprest, P. (2012). Disability and the education system. *Future of Children*, 22(1), 97–122. <https://doi.org/10.1353/foc.2012.0007>
- Banks, L.M., & Zuurmond, M. (2015). Barriers and enablers to inclusion in education for children with disabilities in Malawi. *Norwegian Association of Disabled*, 1–42.
- Banks, Lena Morgon, Kuper, H., & Polack, S. (2017). Poverty and disability in low- and middle-income countries: A systematic review. *Plos One*, 12(12), e0189996. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189996.t003>
- BPS. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*.
- Braithwaite, J., & Mont, D. (2009). Disability and poverty: A survey of World Bank Poverty Assessments and implications. *Alter*, 3(3), 219–232. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2008.10.002>
- Elwan, A. (1999). Poverty and Disability: A Survey of the Literature, SP Discussion Paper No. 9932. *World Bank*, 9932. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/488521468764667300/pdf/multi-page.pdf>
- Filmer, D. (2008). Disability, poverty, and schooling in developing countries: Results from 14 household surveys. *World Bank Economic Review*, 22(1), 141–163. <https://doi.org/10.1093/wber/lhm021>
- Hoogeveen, J. G. (2005). Measuring welfare for small but vulnerable groups: Poverty and disability in Uganda. *Journal of African Economies*, 14(4), 603–631. <https://doi.org/10.1093/jae/eji020>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Situasi Disabilitas. *Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI*, 1–10.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar*. http://repositori.kemdikbud.go.id/15823/1/Kajian_program_Ind_Pintar.pdf
- Kuper, H., Nyapera, V., Evans, J., Munyendo, D., Zuurmond, M., Frison, S., Mwenda, V., Otieno, D., & Kisia, J. (2015). Malnutrition and Childhood Disability in Turkana, Kenya: Results from a Case-

- Control Study. *PLoS ONE*, 10(12), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144926>
- Lamichhane, K., & Okubo, T. (2014). The Nexus between Disability, Education, and Employment: Evidence from Nepal. *Oxford Development Studies*, 42(3), 439–453. <https://doi.org/10.1080/13600818.2014.927843>
- Mihai, M., Țițan, E., & Manea, D. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 855–860. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01532-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01532-4)
- Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2013). Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study. *World Development*, 41(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.024>
- Mont, D., & Cuong, N. V. (2011). Disability and poverty in Vietnam. *World Bank Economic Review*, 25(2), 323–359. <https://doi.org/10.1093/wber/lhr019>
- Mwachofi, A. K. (2009). Gender difference in access and intervention outcomes: The case for women with disabilities. *Disability and Rehabilitation*, 31(9), 693–700. <https://doi.org/10.1080/09638280802305929>
- Qian, J. X., & Smyth, R. (2011). Educational expenditure in urban China: Income effects, family characteristics and the demand for domestic and overseas education. *Applied Economics*, 43(24), 3379–3394. <https://doi.org/10.1080/00036841003636292>
- Rizk, R., & Owusu-Afriyie, J. (2014). Determinants of household expenditure on children's education in Egypt. *International Journal of Education Economics and Development*, 5(4), 332–360. <https://doi.org/10.1504/IJEED.2014.067194>
- UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-hak Anak. In *Unicef*. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. In *United Nations Development Programme*. <https://doi.org/10.5463/DCID.v29i4.656>
- World Health Organization & World Bank. (2011). Summary World Report On Disability. In *World Health Organization*. <https://doi.org/10.1136/ip.2007.018143>
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality and intergenerational mobility. *China Economic Review*, 37, 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.009>
- Yeo, R., & Moore, K. (2003). Including disabled people in poverty reduction work: “nothing about us, without us.” *World Development*, 31(3), 571–590. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00218-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00218-8)

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 20 Nomor 2 Agustus 2021, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. (Science, Technology and Innovation Policy, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
2. Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
3. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
4. Prof. Dr. Bagong Suyanto (Sosiologi, Universitas Airlangga)
5. Prof. Dr. Achmad Nurmandi (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
6. Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
7. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si. (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
8. Dwi Harsono, S.Sos., MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS